



SEKOLAH JURNALISME AJI



JANJI EMPUK BISA SERET

Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik
Penerima Beasiswa Liputan
Sustainability Reporting 2020



JANJI EMPUK BISA SERET

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PENERIMA BEASISWA LIPUTAN SUSTAINABILITY REPORTING
2020

JANJI EMPUK BISA SERET

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PENERIMA BEASISWA LIPUTAN SUSTAINABILITY REPORTING
2020

PENERIMA BEASISWA :

Ahmad Mustaqim
Ainur Rofik
Elma Adisyah
Ilona Esterina Piri
Latifa Nurina Ayuningtyas
Marshal Datundugon
Muhammad Naufal Hafizh
Susanti
Yulistyne Kasumaningrum
Zakarias Demon Daton

EDITOR BUKU:

Sunudyantoro

MENTOR:

Bayu Wardhana
Sunudyantoro

CETAKAN PERTAMA:

Mei 2020

DITERBITKAN OLEH:



SEKOLAH JURNALISME AJI

SEKOLAH JURNALISME AJI

Jalan Sigura Gura No. 6A, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 – Indonesia

Tel. +62 21 22079779

E-mail: sekolahjurnalismeaji@gmail.com

DIDUKUNG OLEH:



Disclaimer: Karya jurnalistik ini adalah hasil liputan jurnalis peserta program berdasarkan data dan fakta di lapangan, tidak mewakili opini GRI.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	5
Kata Pengantar Mentor	8
Ahmad Mustaqim	
Janji 'Ketela' Proyek Bandara Kulon Progo	12
Ainur Rofik	
Menyelamatkan Anak Kotamobagu dari Stunting	27
Elma Adisya	
Pekerja Perempuan Tekstil dan Garmen Makin Rentan di Tengah Pandemi	41
Ilona Esterina Piri	
Upaya Petani di Saat Kopra Murah	50
Potret Petani Kopra di Selatan Minahasa (Bagian 1 dari 2)	61
Potret Petani Kopra di Selatan Minahasa (Bagian 2 dari 2)	66
Latifa Nurina Ayuningtyas	
Rumah Kreatif Dorong UMKM <i>Go Online</i>	71
Marshal Datundugon	
Restorasi Mangrove yang Setengah Hati di Teluk Labuan Uki (1)	90
Restorasi Mangrove yang Setengah Hati di Teluk Labuan Uki (2)	97
Restorasi Mangrove yang Setengah Hati di Teluk Labuan Uki (3)	104

Muhammad Naufal Hafizh

Mendayagunakan Sampah Sekolah 115

Susanti

Kontraktor Nakal, Rugikan Pekerja PT Badak NGL 126

Yulistyne Kasumaningrum

Tren ‘A-bank’, Layanan Bank Tanpa Kantor, Mudahkan
Inklusi Keuangan 133

Sering Dicurigai, Irman Tak Patah Arang hingga Jadi Agen
Jempolan *Branchless Banking* 138

Perjalanan Inklusi Keuangan di Indonesia Sejak 2016
hingga Mencakup Kaum Marginal 142

Zakarias Demon Daton

Dua Kampung di Bontang dalam Kepungan Gas Amonia 148

Kata Pengantar

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Sustainability Reporting atau laporan keberlanjutan merupakan salah satu tema yang cukup baru dalam menu pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh AJI. Peliputan jenis ini berusaha menyoroti menggali tema liputan dengan melihat dampak ekonomi dan sosial dari operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana upaya memitigasi dampaknya.

Setiap usaha perusahaan memang sudah pasti punya dua sisi dampak pada lingkungannya: baik atau buruk. Ini sesuatu yang sulit dihindarkan. Hampir tidak ada operasional usaha ekonomi yang tak menghadapi masalah seperti ini. Masalah-masalah itu bisa muncul dari sejak masa persiapan hingga saat sudah beroperasi.

Proyek pembangunan bandara, seperti di Kulon Progo, misalnya. Pasti ada dampak ekonomi terhadap keberadaannya dalam jangka panjang. Namun yang jangan dilupakan, proyek itu memakan korban ribuan warga yang terdampak akibat kehilangan tanahnya untuk pembangunannya seperti dalam laporan Ahmad Mustaqim dari Medcom.id. Belum lagi soal dampak lingkungan dan sosialnya.

Soal keberadaan pabrik di amonia di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang, misalnya. Industri berskala besar seperti itu sudah pasti memberikan dampak ekonomi kepada warga sekitar langsung atau tidak langsung. Belum lagi pemasukannya untuk keuangan daerah. Namun, yang tak boleh dilupakan adalah

bagaimana dampak kesehatannya bagi masyarakat, seperti dalam laporan Zakarias Demon Daton dari Kompas.com.

Dua hal di atas adalah sedikit contoh dari bagaimana operasional perusahaan membawa dampak, yang itu harus menjadi sorotan media sebagai bagian dari mekanisme kontrol. Liputan-liputan semacam ini diharapkan akan membuat perusahaan lebih peduli soal dampak terhadap lingkungan. Untuk pemerintah, harapannya adalah menyadari dampaknya dan mencari solusi agar tak berkelanjutan masalahnya.

Program dengan tajuk Sustainability Reporting ini memang untuk menambah ketertarikan wartawan terhadap isu keberlanjutan, dan juga mendorong perusahaan lebih terbuka tentang apa yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif atau memberi kontribusi untuk lingkungannya. Peliputan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi jurnalis untuk melakukan liputan serupa di masa mendatang.

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Sekolah Jurnalisme AJI dan Global Reporting Initiative (GRI). Prosesnya diawali dengan diskusi dan workshop Sustainability Reporting dan Story Telling di sejumlah kota. Para peserta diskusi dan workshop itu lantas diminta mengajukan proposal liputan soal tema keberlanjutan ini.

Usulan proposal liputan itulah yang kemudian diseleksi sehingga terpilih 10 peserta, sebagai penerima beasiswa. Peserta yang menerima fellowship ini berasal dari Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, Kotamobagu, Manado dan Bandung. Para penerima beasiswa ini kemudian membuat liputan yang hasilnya dipublikasikan di medianya masing-masing, yang kompilasinya ada di tangan Anda ini.

Terima kasih kepada Global Reporting Initiative (GRI) atas dukungannya dalam program yang mendorong jurnalis untuk punya kepedulian terhadap isu-isu keberlanjutan ini. Tak lupa ucapan terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Bayu Wardhana dan Sunudyantoro. Keduanya menjadi

mentor bagi para penerima fellowship, yang membantu mereka mengimplementasikan rencana liputannya hingga akhirnya selesai dan terbit di medianya.

Jakarta, 16 Mei 2020

Abdul Manan
Ketua Umum AJI

Kata Pengantar

Mentor 2020

Kegiatan beasiswa untuk jurnalis tentang liputan menggunakan Sustainability Report (SR) kembali diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan Global Report Initiative (GRI) pada tahun 2020 ini. Ini merupakan kegiatan kedua, setelah kegiatan yang sama di tahun 2019.

Pada tahun 2020, ada 10 jurnalis lolos mendapatkan beasiswa liputan. Mereka berasal dari berbagai kota di Indonesia dan kebetulan semuanya bekerja di platform media online. Kota-kota itu adalah Jakarta, Bandung, Jogja, Samarinda, Manado, Kotamobagu, Bolaang Mongondow.

Seleksi jurnalis penerima beasiswa tahun ini tidak lagi dengan pelatihan seperti tahun sebelumnya, tetapi dengan diskusi terbatas di beberapa kota. Inisiator diskusi dilakukan oleh 9 jurnalis penerima beasiswa tahun lalu. Masing-masing menyelenggarakan diskusi tersendiri pada sesama jurnalis. Sehingga terlaksana 9 kali diskusi. Transfer pengetahuan tentang SR diberikan oleh 9 jurnalis penerima beasiswa tahun 2019. Kemudian para peserta diskusi tersebut diberi kesempatan mengirimkan usulan liputan pada AJI Indonesia, lalu terpilihlah 10 jurnalis ini.

Topik-topik liputan tahun ini bertambah variasinya. Topik seputar dampak lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal masih menjadi favorit penerima beasiswa tahun 2020, seperti juga tahun sebelumnya. Namun di tahun ini mulai

muncul topik baru seperti praktik tenaga kerja di dalam perusahaan dan etika pemasaran.

Angle liputan pun bervariasi. Ada yang mengupas bagaimana praktik di lapangan dengan komitmen perusahaan yang ditegaskan dalam Sustainability Report. Sementara yang lain, ada liputan yang menggunakan Sustainability Report sebagai rujukan / data pendukung untuk sebuah topik yang lebih luas. Tentu ada liputan yang hasilnya sangat kritis pada perusahaan tapi ada liputan yang menguatkan praktik baik di lapangan sesuai dengan komitmen perusahaan.

Seorang jurnalis sudah seharusnya skeptis pada informasi yang diterima dan mengujinya lewat kerja jurnalistik. Dan lewat karya jurnalistik yang kritis, maka kesungguhan komitmen sebuah perusahaan diuji. Kritik dari media massa merupakan masukan berharga bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya. Dan bila media massa mengangkat praktik baik, ini merupakan sebuah konfirmasi bahwa yang dilakukan perusahaan berdampak bagi masyarakat.

Lewat 10 karya yang terangkum di buku ini, para jurnalis ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan dapat memberi kesan baik di sebuah laporan. Namun hal tersebut harus dilihat kritis pada praktik di lapangan. Sebuah janji empuk bisa jadi benar terealisasi di lapangan tapi bisa juga terjadi sebaliknya, alias bikin seret.

Harapan ke depan adalah bagaimana 10 jurnalis ini terus mengembangkan dirinya menjadi jurnalis yang tangguh dan kritis. Pemahaman mengenai Sustainability Report secara langsung akan meningkatkan kompetensi mereka. Hal ini terkonfirmasi oleh beberapa jurnalis penerima beasiswa tahun 2019. Ditanyakan secara random, mereka mengaku beberapa kali menggunakan Sustainability Report sebagai bahan rujukan dalam kerja jurnalistik.

Akhir kata, terima kasih kepada GRI yang telah mendukung program beasiswa liputan menggunakan Sustainability Report

ini. Semoga kerjasama AJI-GRI dapat berlanjut. Dan kepada pembaca, selamat menikmati 10 karya jurnalistik ini. Ada banyak hal baru dan menarik dari liputan-liputan ini.

Jakarta, 13 Mei 2020

Bayu Wardhana
(Wakil Mentor 2020)



Ahmad Mustaqim

Medcom.id

Lahir di Blora, 16 Februari 1991, saat ini ia bekerja sebagai jurnalis di Medcom.id. Kimkim, panggilan dia, adalah lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

JANJI 'KETELA' PROYEK BANDARA KULON PROGO

Ahmad Mustaqim - 16 April 2020



Aris Dalmoko berdiri di tenda angkringannya. Medcom.id/Mustaqim

Tenda biru berdiri di halaman rumah mertua Aris Dalmoko, warga Dusun Kretek, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di dalam tenda terdapat sebuah gerobak beserta dua kursi bambu. Gerobak untuk berjualan angkringan itu masih kosong.

Gerobak itu sarana usaha Aris untuk menyambung perekonomian keluarga. Ia berjualan angkringan setelah rumah dan lahan pertaniannya digusur untuk megaprojek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA).

“Dulu rumah saya dan keluarga di Dusun Mugangan, Desa Palihan. Setelah digusur karena bandara, saya pindah ke Dusun Kretek,” kata Aris ditemui Medcom.id pada 10 Maret 2020.

Aris bersama istri menumpang di rumah mertuanya sejak digusur pada 2017 lalu. Ia tak ada pilihan lain.

“Lha mau bagaimana, rumah dirobohkan, lahan pertanian sudah tidak punya. Saya hanya menumpang dan sekarang jualan angkringan,” kata lelaki 47 tahun ini.



Aris Dalmoko berdiri di tenda angkringannya. Medcom.id/Mustaqim

Aris dan istri tinggal terpisah dengan anaknya, Asih Dewanti, 20. Asih tinggal di rumah yang Aris bangun dari hasil ganti rugi proyek YIA. Lahan seluas 500 meter persegi telah dibangun rumah di lokasi tak strategis, meski masih di Kecamatan Temon. Jaraknya sekitar dua kilometer dengan Jalan Raya Wates-Purworejo. Ini berbeda dengan tempat tinggalnya dulu berada di dekat Jalan Deandles, jalan yang dibangun pada era kolonial Belanda dan berdekatan dengan garis pantai selatan Pulau Jawa.

Aris malas tinggal di rumah barunya. Ia mengibaratkan rumah barunya berada di lokasi mati. “Saya tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Mau bikin usaha apa kalau pukul 18.00 WIB sudah sepi,” katanya.

Aris sempat menumpu harapan pada Asih yang sempat ikut pelatihan pramugari di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kulon Progo pada September 2019. Pelatihan itu, katanya, diadakan BLK bekerja sama PT Angkasa Pura (AP) I, pemilik sekaligus pengelola YIA. Berulang kali Asih mendaftar setiap ada lowongan, namun tak pernah berhasil. Pikirnya, warga terdampak pembangunan semestinya dinomorsatukan.

“Janji-janji (PT) AP hanya omong kosong. Janjinya seperti ketela, empuk tapi bikin seret (susah ditelan),” katanya.

Sudah sekitar enam bulan Aris dan Asih penuh harap. Aris merasa kecewa. Kemudian, ia membebaskan perempuan lulusan SMA Muhammadiyah Wates itu mengambil keputusan. Aris merelakan Asih bekerja di sebuah perusahaan konveksi di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.

Aris merasa kasihan dengan putrinya. Jarak Kecamatan Temon dengan Kecamatan Sedayu lebih dari 20 kilometer dan harus ditempuh dengan sepeda motor. Saat waktu menunjukkan pukul 06.00 WIB, dia harus sudah berangkat. Baru pulang pukul 20.00 WIB.

“Lembur itu sampai malam. Pukul 20.00 WIB baru pulang. Sering lembur. Kerjanya lima hari. ‘Ya, ketimbang menganggur, biar ada kegiatan,’ kata anak saya,” ujar Aris.

Gaji hasil kerja di perusahaan konveksi mengacu UMR di Bantul, yakni sebesar Rp1.790.500. Aris mengatakan nilai itu hanya bertambah sekian ratus ribu dari hasil kerja lembur.

“Katanya, warga terdampak (YIA) diutamakan, tapi kenyataannya enggak ada. Warga terdampak sama sekali tidak tersentuh,” kata dia.

Aris mengaku sempat bekerja di PT Urban, salah satu pihak penyedia material tiang pancang konstruksi YIA. Ia hanya bertahan tiga bulan, September hingga Desember 2019. Aris merasa pekerjaan ini tidak cocok secara waktu maupun gaji.

Ia bekerja tanpa libur sejak pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Saat lembur bisa sampai pukul 23.00 WIB. Per hari bekerja, Aris diupah Rp95 ribu, dan dalam sebulan mendapat bayaran sekitar Rp2.850.000. Ditambah kerja lembur, pendapatan Aris hanya berkisar Rp3 juta.

“Saya enggak betah. Gaji segitu tidak cukup buat hidup keluarga, anak saya tiga. Habis kerja tiga bulan itu saya keluar. Januari kemarin saya menganggur,” ungkapnya.

Nyaman bertani

Aris merasa lebih nyaman bertani seperti yang terakhir ia lakukan pada 2017 lalu. Kebutuhan sayuran tak harus beli. Ia tinggal memetik dari ladang atau meminta tetangga. Kebutuhan beras sudah dicukupi dari hasil menanam padi di sawah.

Aris saat itu menggarap lahan 3.000 meter persegi. Bertanam cabai, ia bisa memanen hingga 20 kali dengan panen perdana saat usia tanaman sekitar dua bulan. Panen bisa dilakukan lima hari sekali. Sekali panen bisa mendapatkan uang Rp500 ribu hingga lebih dari Rp1 juta. Usia tanaman sekitar enam bulan dan ketika dirawat dengan baik bisa mencapai delapan bulan.

“Pas panen juga bisa memberikan pekerjaan kepada orang luar desa yang usianya 60 tahun atau 70 tahun. Mereka senang bisa dapat upah. Habis panen, saya tinggal menunggu uang dari pembeli cabai. Kadang saya tunggu sambil memancing,” kata dia.

Kegiatan pertanian Aris kini hanya cerita. Lahannya sudah habis tergusur. Berdagang angkringan yang semula ia jadikan sampingan, kini telah jadi pekerjaan utama untuk perekonomian keluarga.

Hasil dari berdagang angkringan pun tak seberapa. Ia baru menjajakan dagangan mulai pukul 17.00 WIB. Aris mengatakan sudah harus menutup jualannya saat waktu menunjuk pukul 23.00 WIB. Saat hujan, tak jarang angkringannya sepi pengunjung.

Nasib Perekonomian Warga Terdampak YIA



Sebelum YIA Terbangun

- Sebagian besar warga terdampak YIA merupakan petani.
- Secara global, pendapatan per bulan sekitar Rp5.000.000-Rp10.000.000.
- Ada pula yang menjadi pekerja honorer dengan gaji di bawah Rp1.000.000 dan pekerja di perusahaan dengan gaji sekitar Rp3.000.000.

VS

Sesudah YIA Terbangun

- Warga terdampak ada yang bekerja di YIA, di perusahaan yang mengerjakan pembangunan, dan bekerja serabutan.
- Warga terdampak yang bekerja di YIA mendapatkan gaji sekitar Rp2.000.000, sejumlah tunjangan; meliputi uang transportasi, makan, premi, dan potongan BPJS.
- Warga terdampak bekerja di perusahaan yang mengerjakan pembangunan YIA mendapat sekitar Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Setelah proyek selesai, pekerja menganggur.
- Warga terdampak ada yang bekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu. Sebagian ada yang menganggur.

Sumber: Wawancara warga terdampak YIA



Keuntungan dari angkringan berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu dalam sekali berjualan. Ia tak menghitung laba secara global. Dalam taksirannya, keuntungan tak sampai Rp2 juta per bulan. Jauh dari keuntungan bertani cabai dengan hitungan pendapatan sebulan bisa berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta.

“Ya, istilahnya orang jualan, kadang sepi. Ada waktunya ramai. Paling hanya tetangga sekitar sini yang beli atau orang yang lewat. Hasil jualan enggak saya hitung, uang keluar-masuk untuk banyak kebutuhan,” ucapnya.

Sekadar pelatihan

Rikiadi, warga Desa Glagah, juga senasib dengan keluarga Aris. Lahan pertanian dan tempat tinggal lelaki 30 tahun ini tergusur sejak 2017. Ia sudah tak punya rumah. Kini, ia tinggal di rumah kontrakan, milik warga korban gusuran YIA yang pindah ke lokasi lebih jauh.

Rikiadi sempat mengikuti pelatihan *ground handling* (atau pekerja bandara di bagian landasan) di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada Januari 2019. Beberapa materi pelatihan yang Riki ikuti, misalnya, mendorong pesawat hingga mengurus barang penumpang di bagasi. Durasi pelatihan yang Riki jalani selama tiga minggu. Warga terkena dampak yang ikut pelatihan seangkatan dengan Riki ada 20 orang. "Tapi, ya, seperti cuma pelatihan," tuturnya.

Ia semula merasa senang bisa ikut pelatihan. Ia berharap besar bisa bekerja di YIA tanpa harus keluar wilayah. Rikiadi kemudian sempat melihat lowongan penempatan di YIA. Sayang, usahanya kandas.

"Syarat umurnya maksimal 27 tahun. *Lha*, umur saya hampir 30 tahun, enggak lolos secara persyaratan," katanya.

Beberapa bulan sebelumnya, ia kembali mengetahui lowongan bekerja di PT Pembangunan Perumahan (PP), kontraktor yang membangun YIA. Informasi yang ia peroleh, lowongan itu untuk 10 warga terkena dampak. Untuk persyaratan usia, Rikiadi masih masuk kriteria. Setelah mengirimkan berkas lamaran, hasilnya nihil.

"Yang berharap diutamakan itu banyak. Kemarin (pas melamar kerja), posisi saya kan warga terkena dampak, tapi hasilnya ya nihil," ucap Rikiadi.

Tri Wahyuno dan Gango Anggara Yuda, juga keluarga terkena dampak proyek YIA, hingga kini masih menganggur. Yuda merupakan putra Wahyuno. Ia menceritakan, Yuda sempat

mengikuti pelatihan *ground handling* di Bandara Adisutjipto.

Setelah pelatihan itu, Wahyuno mengupayakan anaknya bekerja di YIA. Wahyuno terus mencari informasi lowongan di YIA lewat tetangga maupun lewat media sosial. Sampai saat ini, usahanya tak membuahkan hasil menggembirakan.

“Karena enggak kerja, ya, tiap hari anak saya *ngarit* (mencari rumput), punya kelinci di rumah,” tuturnya.

Ia hanya pasrah atas kondisi putranya yang kini berusia 21 tahun. Ia sementara membebaskan anaknya beraktivitas. Padahal, dulu Wahyuno dan anaknya menggarap lahan pertanian sebelum proyek YIA berjalan.

“Pihak bandara kadang menerima orang di luar warga terkena dampak. Kami yang terkena dampak malah banyak yang menganggur. Janjinya dulu, kalau ada sosialisasi, setiap KK (kepala keluarga) bisa bekerja di sini (YIA),” kata Wahyuno sambil menunjuk arah lokasi YIA.

Kenal orang dalam

Sementara, seorang warga terkena dampak YIA, Muhamdi, bisa bekerja bersamaan proyek pembangunan YIA berjalan. Ia tidak bekerja di YIA, namun di PT PP.

“Saya kerja di PP kebetulan pas awal-awal konflik. Otomatis bisa karena kenal ‘orang dalam’. Kemudian saya diminta mengajukan lamaran kerja sesuai kemampuan saya,” kata Muhamdi.

Muhamdi memiliki sejumlah pengalaman kendati hanya lulusan SMA. Ia sempat kuliah jenjang D1 bidang komputer. Ia sempat merantau ke Jakarta bekerja di perusahaan otomotif selama 10 tahun. Ia pernah menjabat sebagai kepala gudang.

“Saya memang tidak ikut pelatihan. Kebetulan pengalaman kerja saya cukup. Saya punya pengalaman kerja di perusahaan. Untuk administrasi, saya sudah biasa mengerjakannya,” ujarnya.

Muhamdi sudah bekerja di PT PP sejak September 2018. Mulanya ia di posisi humas. Ia berkeinginan bisa menjembatani keluhan dan keinginan masyarakat atas proyek YIA.

“Seperti pas membangun, itu kan ada dampak debunya saat musim kemarau kemarin. Saya menyampaikan keluhan ini. Kalau ada persoalan saya inginnya bisa membantu warga juga,” jelasnya.

Sejak Januari 2020, Muhamdi telah bergeser di posisi staf administrasi. Di PT PP, Muhamdi mendapatkan gaji Rp4 juta setiap bulan. Apabila ada kerja lembur, pendapatannya bisa bertambah hingga Rp2 juta.

Namun, masa kerja Muhamdi sudah selesai. Kontrak kerjanya di PT PP rampung pada akhir Maret 2020. Muhamdi kini jadi pengangguran. Ia belum berpikir akan bekerja apa ke depannya.

“Saya bingung mau *ngapain*. Mau usaha tapi usaha apa. Saya sebenarnya tidak egois, mentang-mentang orang sini harus kerja di bandara, ya enggak. Cuma, kalau bisa, warga terkena dampaklah yang diutamakan,” katanya.

Selama bekerja di PT PP, ia menumpang di kediaman mertuanya di Dusun Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon. Rumah itu ditempati enam orang, yakni istri, anak, orangtua, dan saudaranya. Selain Muhamdi, anggota keluarganya kini bekerja serabutan.

Ia menilai, ada sejumlah pelatihan yang digelar namun tak tepat sasaran. Ada juga warga terkena dampak yang justru tak bisa mengakses pelatihan itu. Muhamdi menyebut sempat ada lowongan yang diinformasikan lewat kantor *help desk* YIA perihal kebutuhan 30 orang tenaga kerja.

“Itu yang melamar 3.000 orang. Saya sendiri sebetulnya ingin kerja di bagian dalam bandara tapi terganjal syarat seperti usia. Saya sudah 40 tahun,” ucapnya.

Segelintir yang beruntung

Nasib lebih beruntung dialami dua warga terkena dampak proyek YIA: Nurcahyo dan Catur Rochmad. Nurcahyo merupakan warga Dusun Selo, Desa Palihan, sedangkan Catur warga Desa Glagah. Keduanya menjadi yang beruntung dari sekitar 2.700 KK tergusur akibat proyek pembangunan YIA. Nilai kontrak pembangunan YIA ini senilai Rp6,1 triliun.

Nurcahyo bersyukur bisa bekerja di YIA. Ia semula ragu bisa bekerja di YIA dengan hanya lulusan dari SMK Muhammadiyah 2 Wates di Jurusan Otomotif pada 2010.



*Nurcahyo dan Catur Rochmad, dua warga terdampak yang bekerja di YIA. Medcom.id/
Mustaqim*

Lelaki berusia 27 tahun ini menceritakan pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PT JAS di Bandara Adisutjipto pada Januari 2019. Materi pelatihan ini seputar *ground handling*. Masa pelatihan yang Nurcahyo ikuti berakhir pada Maret 2019.

Menurut dia, pelatihan itu sekaligus mencari lisensi sebagai pekerja di bandara. Setelah pelatihan itu, Nurcahyo mencari dan menunggu informasi lowongan di YIA. Tak lama selesai pelatihan, ia mengetahui ada lowongan lewat *help desk* YIA dan mengajukan lamaran.

“Sempat ikut tes di *help desk* sama HRD pusat. Dari beberapa yang melamar ya alhamdulillah saya lolos. April 2019 mulai kerja,” katanya.

Ia senang bisa bekerja di YIA karena bisa dekat dengan keluarga. Ia mengatakan upah bekerja di YIA sesuai UMR dan mendapatkan sejumlah tunjangan, meliputi uang transportasi, makan, premi, dan potongan BPJS Kesehatan.

Sebelum di YIA, Nurcahyo bekerja di salah satu perusahaan traktor yang berkantor di Yogyakarta. Ia bekerja di sana sejak 2013 hingga awal 2019. Secara pendapatan, ia mengakui lebih besar di perusahaan traktor. Selain upah, apabila karyawan ditempatkan di luar daerah, akan mendapatkan uang tambahan di luar gaji pokok. Bahkan, ia menyebut gaji yang didapat bisa utuh.

“Dari segi kenyamanan lebih enak di sini (YIA) karena dekat rumah, keluarga. Kebetulan anak saya satu, usia tujuh bulan. Nah, dulu saya keluar dari perusahaan traktor karena tak bisa meninggalkan istri dan anak lama,” ujarnya.

Menurut dia, warga terdampak YIA semestinya ada banyak peluang bekerja, khususnya yang masih berusia produktif, yakni di usia 20 hingga 30-an tahun. Ia tak tahu pasti mengapa tak banyak warga terdampak bisa bekerja di YIA. Sejumlah rekan kerjanya di YIA berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Cuma ya memang ada yang ingin kerja tapi belum lolos. Seperti kemarin, ada lowongan di *help desk*, banyak yang daftar, sekitar seribu. Tapi, yang dibutuhkan hanya 30 orang,” tuturnya.

Adapun Catur merupakan rekan Nurcahyo di YIA. Keduanya berbeda angkatan saat pelatihan di Bandara Adisutjipto. Catur menjadi angkatan kedua setelah Nurcahyo.

Catur sebenarnya memiliki modal catatan akademik. Lulus dari SMA Negeri 1 Temon pada 2007, ia lantas menamatkan studi di jurusan Bimbingan Konseling di Universitas PGRI Yogyakarta pada 2012.

Lelaki berusia 30 tahun ini semula bekerja sebagai staf di sebuah kantor notaris. Ia kemudian banting kemudi untuk bekerja di bagian pemasaran kantor simpan pinjam pada 2015. Di sana ia hanya bertahan sekitar lima bulan.

“Setelah itu kerja sebagai admin TU (Tata Usaha) di SD pada 2019. Kemudian ada lowongan di YIA habis pelatihan. Alhamdulillah diterima dan saya keluar dari operator di SD,” ucapnya.

Catur merasa lebih nyaman bekerja di YIA. Dekat rumah dan keluarga sudah pasti jadi pertimbangan. Dari segi gaji, lebih baik dibanding saat dia bekerja sebagai TU di SD.

“Gaji di YIA lebih menguntungkan dibandingkan di SD. Operator SD hanya Rp300 ribu-Rp700 ribu per bulan. Kalau penghasilan di YIA, cukuplah buat anak istri,” kata lelaki dengan anak berusia dua tahun ini.

Catur dan keluarga kini tinggal di rumah relokasi Desa Glagah. Ia masih berharap warga terdampak YIA bisa mengakses pekerjaan seperti dirinya. Meskipun, ia mengakui ada sejumlah kendala.

“Peluangnya sebenarnya susah. Soalnya persyaratan usia mungkin ada yang tidak masuk,” kata dia.

Klaim 60 persen terserap

Cerita susahnyanya mengakses pekerjaan dibantah pihak pengelola Bandara YIA. Pelaksana tugas sementara Manajer Umum YIA, Agus Pandu Purnama, mengatakan sekitar 60 persen warga terkena dampak dipekerjakan dalam proyek pembangunan maupun di internal bandara. Menurut dia, PT Angkasa Pura I bahkan sudah menyiapkan sejumlah slot pekerjaan bagi warga terdampak di luar YIA.

Ia menyebut Toko Milik Rakyat (Tomira), swalayan yang dikelola pemerintah Kulon Progo bekerja sama dengan toko berjejaring, menjadi salah satu calon tempat kerja warga

terdampak. Agus menyatakan akan disiapkan 300 gerai.

Ia juga menyebut berbagai pelatihan telah diberikan ke warga terdampak. Dalam laporan *Sustainability Report* PT Angkasa Pura 2017, dana bantuan pelatihan *security* bagi warga terdampak pembangunan YIA, tahap 1 dan 2, sebesar Rp280,02 juta. Sementara, dana bantuan pelatihan pembekalan dan pendalaman teknis bagi warga terdampak pembangunan YIA sebesar Rp498,93 juta.



Manajer Umum YIA, Agus Pandu Purnama. Medcom.id/Mustaqim

“Kami berkomitmen warga terdampak jadi target utama agar mereka bisa ikut kegiatan operasional bandara,” ucapnya.

Menurut dia, warga terkena dampak harus mengikuti mekanisme di dunia kerja. Ia mengatakan warga yang mendapat kesempatan bekerja harus memenuhi kualifikasi.

Agus menilai warga terdampak yang tak lolos, sebagian karena alasan faktor kesehatan, tes psikologi, dan sejumlah hal. Ia mengatakan perlu ada jaminan orang yang bekerja harus memenuhi standar dan sesuai aturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pemerintah Kulon Progo sudah siapkan rekrutmen. Banyak sekali pelatihan. Kami kerja sama dengan Pemda Kulon Progo

dengan PT AP 1 guna menyiapkan yang hendak kerja ini. Mereka dibekali pelatihan,” kata dia.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Astungkoro, enggan memusingkan nasib warganya. Ia menilai warga yang tak lolos bekerja memang tak lolos persyaratan. Baginya, respons senang dan kecewa menjadi hal lumrah.

“Yang tidak lolos ini karena faktor pendidikan, enggak punya keterampilan, misalnya, dilatih di situ tapi enggak tertib. Keluhan itu macam-macam, tapi yang jelas pemda memfasilitasi masyarakat Kulon Progo dilatih lewat Balai Latihan Kerja,” ujarnya.



*Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Astungkoro. Medcom.id/
Mustaqim*

Astungkoro mengungkapkan, ada berbagai upaya pemerintah untuk membekali warga Kulon Progo agar bisa bekerja. Ia mengklaim ada berbagai pelatihan, seperti menjahit, perbengkelan, hingga teknisi, bagi masyarakat Kulon Progo secara umum.

“Pada umumnya, warga di seluruh Kulon Progo kami usahakan. Hal-hal semacam itu yang kami persiapkan. Jadi, kami tak telantarkan warga. Yang tidak diterima kerja, mereka harus

berupaya membangun diri. Tapi kan kami sulit memenuhi keinginan masyarakat," ujarnya.

Lemah secara konsep

Pengamat pembangunan untuk sektor pariwisata, Ike Janita Dewi, menilai pemerintah dan sejumlah sektor masih lemah dalam mengonsep pembangunan dengan efek langsung ke masyarakat terdampak. Ia mencontohkan dana gelontoran untuk pelatihan belum tentu bisa langsung berimbas positif.

"Dana dari PT Angkasa Pura tersebut harus disertai komitmen pemerintah dan sektor pendidikan untuk menciptakan SDM (sumber daya manusia) yang dibutuhkan oleh pelayanan bandara. SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi harus merespon kebutuhan SDM bandara," ucap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta ini.

Menurut dia, pemerintah harus bisa menjadi koordinator, regulator, dan fasilitator untuk mempercepat pembangunan SDM mengikuti pembangunan infrastruktur. Ia mengakui tidak mudah menyerap masyarakat terdampak langsung bekerja di bandara.

"Bandara harus dikelola secara profesional dengan tenaga kerja yang tersertifikasi. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah kami. Penduduk (terdampak) di sekitar bandara harus diberi pendidikan dan pelatihan. Dengan itu, hubungan timbal balik bisa terjadi," tuturnya.

Karya telah tayang di Medcom.id, 16 April 2020



Ainur Rofik

FaktaBMR.com

Lahir di Bojonegoro, 18 Maret 1987.
Saat ini ia bekerja sebagai jurnalis di
FaktaBMR.com.

MENYELAMATKAN ANAK KOTAMOBAGU DARI STUNTING

Ainur Rofik - 7 Mei 2020



Suasana Posyandu Melati yang terletak di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.(Dok Posyandu Melati pada 10 Januari 2020).

Selasa 10 Maret 2020 pagi, matahari masih malu-malu. Lus Mokoginta, sudah sibuk menata tempat, menyiapkan timbangan, alat ukur dan alat kesehatan lain. Ia juga telah mengundang orang tua balita untuk datang di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Posyandu juga melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan topik seperti Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), ASI Eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pentingnya Akte Kelahiran, higiene, dan sanitasi.

Lus Mokoginta merupakan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM). Ia kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan mendedikasikan diri untuk pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting. Pengertian konvergensi intervensi pada sasaran adalah bahwa setiap ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan akses layanan atau intervensi penanganan stunting secara terintegrasi.

Menurut Lus, menyadarkan orang tua agar rutin setiap bulan menimbangkan balitanya di Posyandu adalah tak mudah. Jumlah balita yang ikut kegiatan di Posyandu Pontondon itu setiap bulannya selalu di bawah 100 balita dari total 130 balita yang ada di wilayahnya.

Orang tua memiliki alasan bermacam-macam. Ada yang bilang anaknya masih tidur, sedang pergi, dan banyak pula yang berdalih lupa. Padahal, pihaknya tak pernah bosan terus mengingatkan jadwal timbang di Posyandu. Kalau sudah begitu, ia terpaksa jemput bola datang ke rumah-rumah orang tua balita bersama Kader Posyandu dan Petugas dari Puskesmas.

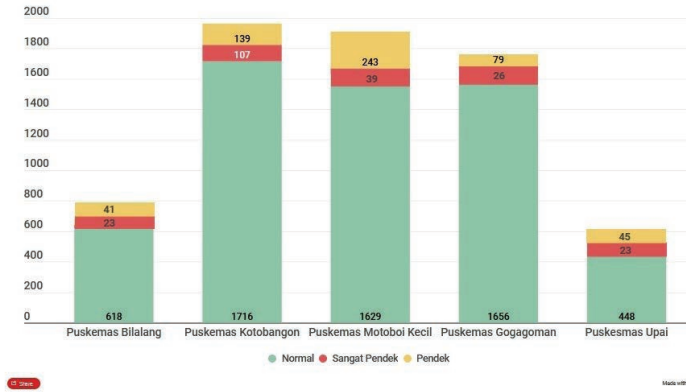
Pentingnya rutin membawa balita ke Posyandu salah satunya untuk memantau pertumbuhan setiap bulan. Pemantauan tinggi badan balita menurut umur merupakan upaya mendeteksi dini kejadian stunting pada anak agar dapat segera mendapatkan penanganan untuk menunjang tinggi badan optimal.

Petugas Kesehatan dari Puskesmas Bilalang saat turun kerumah warga melakukan pengukuran tinggi badan berdasarkan umur kepada Balita. (Dok Puskesmas Bilalang pada 28/01/2020)

Dampak Stunting pada Masa Depan Anak

Data Dinas Kesehatan Kotamobagu yang diinput melalui e-PPGBM yang diambil pada tanggal 9 Maret 2020 menyebutkan di Kotamobagu ada 6.832 balita yang sudah diukur sesuai tinggi badan berdasarkan umur. Dari jumlah itu, tercatat 765 balita atau 11,2% masuk indikasi stunting. Pemerintah daerah terus memvalidasi data ini.

Berdasarkan sebaran Puskesmas



Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu, dr. Tanty Korompot MM.Kes, stunting adalah sebuah kondisi ketika tinggi badan anak berada di bawah standar seusianya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat gizi buruk dalam waktu lama.

Gizi buruk ini bisa dipengaruhi beberapa hal seperti Ibu hamil yang kekurangan gizi, tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap, sanitasi lingkungan yang buruk, dan bayi tidak mendapatkan ASI (air susu ibu) eksklusif,

Ibu hamil bila tidak mendapatkan gizi yang cukup pada masa kehamilan dapat mengakibatkan ukuran tinggi dan berat badan bayi yang dilahirkan di bawah standar. Bayi dikatakan memiliki

berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2500 gr (2,5 kg) atau di bawah 1,5 kg. Dengan kondisi bayi yang memiliki berat lahir rendah, kemungkinan akan mengalami masalah kesehatan dan memiliki kecenderungan stunting.

Demikian juga dengan tinggi badan. Misalnya anak berusia 2-5 tahun dengan tinggi badan 120 cm, maka berat badan yang ideal berkisar 23-25 kg. Sedangkan, seorang anak dikatakan stunting jika berat badannya hanya 19-20 kg, dengan tinggi yang sama.

Melewatkan imunisasi juga bisa menyebabkan stunting. Tanpa imunisasi, anak kemungkinan besar mengalami infeksi berulang yang berpengaruh pada pertumbuhan. Sedangkan manfaat imunisasi adalah untuk menstimulasi sistem imun dalam membentuk antibodi yang dapat mengurangi anak dari resiko infeksi. Peran imunisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting.

Kurangnya kebersihan lingkungan atau sanitasi dapat menyebabkan anak-anak terkontaminasi bakteri. Anak-anak yang terkontaminasi bakteri karena kurangnya kebersihan di lingkungan rumah bisa mengarah ke infeksi usus. Hal inilah yang juga memengaruhi status gizi mereka. Anak yang sering mengalami penyakit berulang seperti diare dan infeksi cacing usus (*helminthiasis*) akibat paparan lingkungan kotor juga dapat dikaitkan dengan stunting.

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama akan memberikan perlindungan terhadap infeksi sehingga mencegah stunting. ASI merupakan asupan nutrisi dan sumber protein berkualitas baik yang dapat memenuhi $\frac{3}{4}$ kebutuhan protein pada bayi usia 0-24 bulan agar anak tidak mengalami stunting. Jika anak tidak mendapatkan ASI sejak dilahirkan, ia akan kekurangan gizi maupun sistem kekebalan dan pada akhirnya menyebabkan stunting.

“Untuk itu Ibu Balita yang harus tetap bekerja di luar rumah,

diupayakan tetap memberikan ASI eksklusif. Terutama bayi usia minimal 0-6 bulan wajib diberikan ASI eksklusif,” kata Nurani Linu Amd.Gz, Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Bilalang.

Ia tidak menyarankan bayi diberi susu formula atau biasanya disebut PASI (Pengganti Air Susu Ibu), kecuali ada kondisi darurat. “Penggunaan PASI dapat diberikan jika si Ibu menderita sakit parah atau menular. Dalam keadaan seperti itu, bayi dapat diberikan PASI berupa susu formula. Pemberian susu formula harus sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan,” ungkapnya.

Masyarakat luas masih banyak yang berpikir susu formula memiliki kualitas gizi yang sama baiknya atau bahkan lebih baik dari ASI. Sehingga sering kita dengar, sebagian masyarakat mengatakan bangga buah hatinya minum susu merek tertentu. Mereka beranggapan, kian mahal harga susu formula, makin tinggi derajat ekonomi orangtua di mata masyarakat.

“Faktanya ternyata susu formula juga bisa memiliki risiko tinggi terhadap masa depan kesehatan anak manusia. Bukan sekadar risiko jangka pendek dan menengah, namun yang perlu diperhatikan adalah risiko jangka panjang dari penggunaan susu formula. Untuk itu, pemberian susu formula juga harus sesuai petunjuk dokter atau petugas kesehatan,” terangnya.

Sebenarnya ada beberapa kelemahan akibat pemberian susu formula, antara lain: bayi tidak memperoleh zat kekebalan yang ada pada ASI sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi; ancaman kekurangan gizi apabila tidak diberikan sesuai dengan ketentuan petunjuk penggunaan pada susu formula; ancaman kegemukan apabila susu formula diberikan secara berlebihan; bayi cenderung lebih mudah terserang diare dan alergi; dan, kemungkinan pertumbuhan mulut, rahang, dan gigi yang tidak baik. Yang juga penting, tidak diberikan ASI bisa mengurangi ikatan kasih sayang antara ibu dan anak yang akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan mental si bayi.

Dampak stunting terhadap kesehatan anak dapat mempengaruhi dari kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya.

Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit.



Petugas Kesehatan dari Puskesmas Bilalang saat turun kerumah warga melakukan pengukuran tinggi badan berdasarkan umur kepada Balita. (Dok Puskesmas Bilalang pada 28/01/2020)

Dukungan Perusahaan pada Kampanye ASI Eksklusif

Sampai anak berusia 2 tahun, atau dikenal dengan 1.000 hari pertama, adalah masa emas yang sangat kritis. Pasalnya, masa ini sangat mempengaruhi kesehatan dan kecerdasan anak hingga ia beranjak dewasa. Anak mengalami malnutrisi berupa stunting atau anak tubuh pendek pada 1.000 hari pertama kehidupannya.

“Salah satu penyebabnya adalah manfaat ASI eksklusif yang tidak dimaksimalkan hingga enam bulan, atau dengan kata lain bayi lepas ASI eksklusif terlalu dini,” ujar Nurani.

Bayi membutuhkan ASI dan asupan makanan yang cukup untuk meningkatkan status gizinya selama masa pertumbuhan. Jika asupannya kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan terhambat, bahkan terbawa hingga ia dewasa.

UNICEF dan WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur enam bulan karena ASI mengandung gizi lengkap yang mudah dicerna oleh perut bayi yang kecil dan sensitif. “Itulah mengapa, hanya memberikan ASI saja sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi di bawah usia enam bulan,” ungkapnya.

Lebih tegas, Nurani menyampaikan bahwa pemberian ASI eksklusif juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan sumber makanan terbaik sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan.

Dukungan untuk pemberian ASI eksklusif terutama usia bayi 0-6 bulan untuk pencegahan stunting, juga dilakukan oleh perusahaan susu formula. Seperti yang dilakukan oleh Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa unit usaha, yang merupakan gabungan dari 3 perusahaan, yaitu PT Sari Husada, PT Nutricia Indonesia Sejahtera dan PT Nutricia Medical Nutrition. Produk Danone SN Indonesia ini berupa susu formula dengan merek dagang SGM, Nutrilon dan Bebelac.

Dalam Laporan Berkelanjutan Danone SN Indonesia 2017-2018, disebutkan perusahaan ini mempunyai program untuk pencegahan stunting. Program ini diturunkan dalam diagram berikut :



Diagram ini menggambarkan Danone SN Indonesia memiliki 3 program utama yang mencakup langkah kedua dan ketiga kerangka program pencegahan stunting: pelatihan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu; sistem rujukan berjenjang untuk balita yang stunting dan berisiko stunting; dan, tata laksana stunting oleh Dokter Spesialis Anak dengan pengawasan di bawah Dokter Puskesmas, Tenaga Pelaksana Gizi & Bidan Desa.

Pihaknya juga melakukan pemantauan dan evaluasi dengan didukung oleh Bidan Desa. Pihaknya memantau pasokan Pangan Olahsan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) dan melakukan pertemuan rutin dengan dokter spesialis anak untuk menilai peningkatan status gizi anak, yang pada akhirnya digunakan sebagai pertimbangan pengembangan rencana program untuk masa depan.

Sebagai hasilnya, berdasarkan kerangka kerja itu, pihaknya mendefinisikan 3 aspek spesifik pencegahan stunting yakni penerapan pola pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang benar-benar melengkapi semua nutrisi. Deteksi dini oleh kader di bawah pengawasan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) dan Bidan Desa. Bekerja sama juga dengan pemerintah

mengidentifikasi kebutuhan nutrisi Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) guna mengetahui kondisi yang menyebabkan stunting seperti gizi buruk, *Failure to Thrive* (FTT), alergi makanan dan kelainan metabolisme bawaan.

Sayangnya, program ini belum merata sampai di Kotamobagu. Menurut Anindita Sarawati Dwiwinata, External Communication for Specialized Nutrition Danone SN Indonesia, sampai hari ini, belum ada program pencegahan stunting di Kotamobagu.

Wilayah yang pernah mendapat program Danone SN Indonesia di provinsi Sulawesi Utara, adalah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Kecamatan Airmadidi. Programnya tidak langsung tentang pencegahan stunting, meskipun masih berkaitan, yaitu intervensi gizi sensitif dengan membangun Water Access Sanitation and Hygiene (WASH).

Secara nasional, program Aksi Cegah Stunting dari Danone SN Indonesia baru akan terlaksana di 45 kabupaten/kota yang dimulai di Pulau Jawa dengan fokus pada peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan, intervensi gizi yang diawasi oleh dokter spesialis anak, hingga perbaikan alur rujukan bagi anak yang terindikasi stunting.

“Pada 2019, kami melakukan penandatanganan MoU dengan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan integrasi program pencegahan stunting bertajuk Bersama Cegah Stunting di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat sampai dengan tahun 2022,” ungkap Anindita.

Danone SN Indonesia dalam Laporan Keberlanjutan 2017-2018 menyatakan 10 komitmennya. Salah satu komitmennya adalah mendukung rekomendasi World Health Organization (WHO) tentang kesehatan masyarakat global yang menyerukan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi dan diteruskan sampai usia dua tahun atau lebih, dikombinasikan dengan pengenalan makanan pendamping yang aman dan sesuai. “Berkaitan dengan produk untuk anak

di bawah usia satu tahun, Danone dan seluruh produknya percaya ASI merupakan yang terbaik untuk anak, khususnya pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” kata Anindita.

Danone SN Indonesia sebenarnya juga memproduksi susu formula untuk usia 0-6 bulan dengan merek Nutricia Bebelove 1 dan Nutricia NutriBaby Royal yang diperuntukkan bayi usia 0-6 bulan. Namun Danone punya kebijakan khusus yaitu Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu, yang mengatur bagaimana produk ini dijual. Kebijakan ini di antaranya mengatur Danone tidak akan mengiklankan atau mempromosikan susu formula usia 0-6 bulan kepada masyarakat umum. Juga tidak akan membagikan sampel produk susu formula usia 0-6 bulan ke ibu hamil maupun keluarganya, serta beberapa peraturan ketat lainnya.

“Kami memastikan penerapan praktik pemasaran yang etis dan bertanggung jawab. Kami tidak melakukan promosi atau mengiklankan produk susu formula untuk anak usia di bawah 1 tahun sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Kami mengimbau konsumen untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan produk susu formula apabila terdapat indikasi medis tertentu,” jelas Anindita

Kamis siang 26 Maret 2020, FaktaBMR.com memantau penjualan produk susu formula yang ada di Kotamobagu salah satunya di swalayan yang menjual produk susu formula SGM untuk usia 0-6 bulan.

Menurut Sales Promotion Girl (SPG) PT SGM, Ria Marcella, dia selalu menjelaskan kepada konsumen pembeli produk Susu Formula usia 0-6 bulan, disarankan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter, tenaga kesehatan atau ahli gizi. Biasanya, pembeli produk susu formula usia 0-6 bulan sudah berkonsultasi dengan dokter.

“Bagi bayi di bawah 6 bulan, idealnya harus mendapatkan ASI

eksklusif, yaitu ASI saja tanpa tambahan apa pun. Tetapi ada beberapa kondisi medis yang menyebabkan anak tersebut atau ibunya tidak bisa memberikan ASI. Pemberian susu formula ada aturannya, sesuai dengan umur anak. Wajib sebelumnya melakukan konsultasi ke dokter anak terlebih dulu untuk mengetahui susu formula yang cocok diberikan kepada anak,” kata Ria.



Petugas Kesehatan dari Puskesmas Bilalang saat turun ke rumah warga melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan berdasarkan umur kepada Balita. (Dok Puskesmas Bilalang pada 28/01/2020)

Upaya Pemerintah dalam Pengurangan Stunting

Dokter Tanty selaku Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu sangat memahami bahwa stunting adalah persoalan serius yang merampas hak dasar anak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang baik. Jika tidak ditangani dengan benar, yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan hidup anak di masa

mendatang. “Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk bersama-sama menanggulangi persoalan stunting melalui kolaborasi yang erat terpadu dan terencana dengan baik melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dinas Kesehatan Kotamobagu telah menjalankan program pencegahan stunting seperti Peningkatan Gizi Masyarakat melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) seperti biskuit untuk anak usia 12 – 24 bulan.

Dinkes Kotamobagu juga melakukan intervensi spesifik di antaranya pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, calon pengantin dan ibu hamil, promosi dan kampanye tablet tambah darah, mengadakan kelas ibu hamil. Selain itu suplementasi vitamin A, promosi ASI eksklusif, promosi makanan pendamping ASI (MP-ASI), suplemen gizi mikro (Taburia), suplemen gizi makro (PMT), dan promosi makanan berfortifikasi termasuk garam ber-iodium.

Ada pun intervensi gizi sensitif, lanjut dia, Dinkes Kotamobagu juga melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi masyarakat, imunisasi dasar lengkap, pengendalian penyakit Malaria, TB dan HIV/AIDS, memberikan edukasi kesehatan seksual, serta reproduksi dan gizi pada remaja.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rum Mokoagow, menyampaikan saat ini juga telah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang salah satunya mengatur penggunaan Dana Desa untuk pencegahan stunting di tingkat Desa.

“Terkait untuk laporan konvergensi pencegahan stunting akan mulai dilaksanakan untuk tahun 2021 mengacu pada laporan penyaluran Dandes tahun 2020 ini,” ungkapnya.

Lidiyawati Djufri, Sekretaris Desa Pontondon, saat bersua

dengan FaktaBMR.com menyatakan telah menerima surat edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai pembinaan dan pengendalian dana desa tahun anggaran 2020.

Surat edaran tersebut menyatakan peningkatan layanan publik bidang kesehatan di desa yaitu perbaikan dan atau pelayanan gizi anak dalam rangka pencegahan stunting, dapat dibiayai dari dana desa tahun anggaran 2020.

Lidiyawati menceritakan desanya telah menyiapkan program pencegahan stunting seperti penyediaan air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, bantuan Insentif kader kesehatan, perawatan atau pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui. Desa juga memfasilitasi UKBM (Poskedes/Polindes, Posbindu, Posyandu, dan pos kesehatan lainnya), penyelenggaraan, dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Desa juga melakukan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita dan anak sekolah.

“Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan oleh kader dan penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bayi, balita dan anak seperti biskuit ataupun susu formula, kunjungan rumah oleh kader untuk pemantauan pertumbuhan balita. Dari situlah kami mendapatkan laporan apa saja yang menjadi kebutuhan untuk pemenuhan gizi maupun untuk penanganan stunting,” katanya.

Karya telah tayang di FaktaBMR.com, 7 Mei 2020



Elma Adisya

Magdalene.co

Ia adalah lulusan dari Universitas Multimedia Nusantara, Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik. Saat ini ia bekerja sebagai Reporter Magdalene.co dan Producer di Magdalene Podcast.

PEKERJA PEREMPUAN TEKSTIL DAN GARMEN MAKIN RENTAN DI TENGAH PANDEMI

Elma Adisya - 23 April 2020

Bayang-bayang PHK, ancaman kesehatan, serta beban ganda meningkatkan kerentanan pekerja perempuan sektor tekstil dan garmen.



“Amalia”, buruh sebuah pabrik garmen di kota Tangerang, merasa waswas akan kehilangan pekerjaannya di tengah wabah virus corona saat ini. Saat ini ia masih bekerja sebagai penjahit dan datang ke pabrik dengan *shift* delapan jam sehari, namun ia telah mendengar kabar tentang para pekerja pabrik di daerah lain yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan dirumahkan tanpa upah. “Saya takut nasib saya bakal kayak begitu,” ujar Amalia, 40, pada *Magdalene* Senin (31/3).

Ibu dua anak itu merasa bersyukur masih memiliki pekerjaan, begitu juga suaminya yang merupakan petugas keamanan di sebuah kantor di Jakarta Barat. Tapi tak urung, dia selalu dibayangi kecemasan kehilangan pekerjaan karena pasangan tersebut tidak memiliki tabungan akibat gaji yang hanya cukup untuk hidup sehari-hari.

“Serba salah sebenarnya. Pengusaha pun sekarang pasti bingung, ini pegawai-pegawainya mau *diapain*. Kalau diliburkan pendapatan tidak masuk, kalau tetap dipekerjakan berarti kesehatan dan keamanan pekerjaannya harus betul-betul dipantau,” ujar pekerja di PT PancaPrima EkaBrothers, salah satu anak perusahaan milik Grup Pan Brothers Tbk.

Situasi dan kondisi pekerja di berbagai sektor industri semakin tidak menentu di tengah wabah virus corona dan kebijakan pembatasan fisik serta wilayah. Hal ini meningkatkan kerentanan pekerja, baik secara ekonomi dan sosial, khususnya para pekerja perempuan di industri garmen dan tekstil.

Dikutip dari portal berita *Katadata.id*, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia mencapai 45,5 juta jiwa, dan industri manufaktur menempati posisi ketiga, sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja perempuan yang mencapai 6,9 juta jiwa.

Di tengah wabah COVID-19, buruh perempuan dalam industri manufaktur menjadi sangat rentan. Bagi pekerja di sektor garmen dan tekstil, hampir tidak memungkinkan bagi buruh pabrik untuk bekerja dari rumah.

Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Dian Septi mengatakan, per tanggal 13 April, tiga hari setelah pemerintah Jakarta menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih ada pabrik-pabrik di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung yang masih beroperasi seperti biasa.

Hal ini menimbulkan ancaman kesehatan karena penerapan

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam menghadapi korona belum merata di tiap perusahaan. Dari laporan yang diterima oleh FBLP, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan standar K3 bekerja dalam situasi COVID-19 sesuai imbauan dari manajemen KBN Cakung.

“Untuk standar K3 di beberapa perusahaan ada sebagian yang tidak menyediakan masker, ada juga yang sudah memberikan *hand sanitizer* dan masker. Namun sebagian besar belum memberlakukan pembatasan sosial, dan ketika masuk ke pabrik itu masih berdesak-desakan,” kata Dian.

Situasi ini meningkatkan kerentanan dan beban ganda pekerja perempuan, ujar Dian.

“Di satu sisi ada risiko menularkan ke keluarga, di sisi lain saat ini anak-anak mereka diliburkan, tempat penitipan anak pun juga tutup. Otomatis tugas untuk mengurus anak pun juga semakin bertambah,” ujarnya pada *Magdalene* pada Selasa (31/3).

“Apalagi jika buruh perempuannya sedang dalam kondisi hamil. Kerentanannya makin berlipat ganda. Karena ada perubahan di tubuhnya,” ia menambahkan.

Di beberapa negara seperti Australia, kelompok ibu hamil sudah masuk ke dalam kelompok rentan dalam penanganan kasus COVID-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, hingga saat ini memang belum ada data konkret terkait dengan risiko tinggi pada perempuan hamil. Akan tetapi, dikarenakan perubahan pada tubuh perempuan hamil dan sistem imun mereka, hal ini membuat mereka rentan dengan infeksi saluran pernafasan.

Sejak pemerintah memberlakukan darurat bencana COVID-19 pada awal Maret dan mulai menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah, beberapa perusahaan baik swasta maupun

pemerintah mulai memberlakukan sistem bekerja dari rumah. Per 7 April Jumlah pasien positif virus corona mencapai 2.738, pasien yang meninggal sejumlah 221 dan yang sembuh 204, angka ini masih terus berubah dan mengkhawatirkan.

Goyangnya Industri garmen dan tekstil

Anne Patricia Sutanto, Wakil Direktur Utama PT. Pan Brothers, mengatakan, pihaknya telah menerapkan standar keamanan di tempat kerja terkait wabah COVID-19.

“Di setiap klinik perusahaan kami, sekarang sudah ada SOP penanganan COVID-19, tenaga medis sudah dilengkapi dengan APD juga. Jika ada yang tidak enak badan atau muncul gejala-gejala, kami periksa lalu diistirahatkan,” kata Anne pada *Magdalene* (7/4).

Fasilitas tempat cuci tangan juga diperbanyak dan dekat dengan jangkauan pekerja. Penambahan fasilitas tempat cuci tangan ini kemungkinan akan berdampak pada kenaikan target pemakaian air bersih setiap pekerjanya. Dalam Laporan Berkelanjutan 2019, PT Pan Brothers menunjukkan bahwa pihaknya sejak 2017 telah konsisten menargetkan pengurangan air di angka 9 meter kubik per-pekerja dalam setahun. “Untuk saat ini pemakaian air bersih dalam situasi COVID-19 biasa-biasa saja, samalah seperti pemakaian biasa,” ujar Anne.

Namun ia mengakui bahwa industri garmen dan tekstil di Indonesia juga tidak luput dari hantaman wabah COVID-19, yang mengganggu laju impor dan ekspor dari negara lain. Di tingkat domestik, daya beli di pasar pun melemah akibat kebijakan pembatasan sosial.

Menanggapi situasi ini, Anne mengatakan bahwa perusahaan sekarang lebih berfokus dalam produksi perlengkapan kesehatan seperti, masker, dan alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis.

“Ini menjadi tantangan bagi kami karena memproduksi masker juga APD bukan bisnis utama kami. Tapi kami tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat Indonesia,” ujar Anne.

Organisasi pemantau hak-hak buruh Workers Rights Consortium menyatakan dalam lamannya bahwa wabah COVID-19 berdampak pada pekerja pabrik garmen di seluruh dunia, mulai dari pabrik yang tutup dan tidak membayarkan upah pekerjanya, hingga pabrik yang hanya membayarkan upah pekerjanya setengah dari upah.

Pekerja garmen di Bangladesh, yang sebagian besar merupakan perempuan dari daerah pedesaan, banyak yang dipulangkan tanpa diupah, menurut laporan *The New York Times* pada 31 Maret.

Anne mengatakan pihaknya berharap keringanan perpajakan dari pemerintah. Selain itu, ia juga berharap pemerintah tidak memberlakukan *lockdown*, karena hal ini akan berdampak pada komitmen Pan Brothers dalam produksi masker, dan Baju APD untuk tenaga medis di seluruh Indonesia.

Tidak ada alasan bagi perusahaan besar untuk melakukan PHK, karena akan sulit bagi perusahaan untuk mencari pekerja baru lagi dan tentunya pengeluarannya pun akan lebih mahal.

“Kalau pekerja dirumahkan, produksi masker dan APD terganggu untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini bekerja di lapangan. Maka dari itu kami betul-betul memperhatikan kesehatan dan kebersihan pekerja kami,” ujarnya.

“Yang kedua, jika *lockdown*, kami kan juga butuh membayar gaji pekerja kami,” kata dia menambahkan.

Untuk membantu pihak pengusaha, saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi dalam

perpajakan. Dalam rilis pernyataan Kementerian Keuangan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp70,1 triliun untuk membantu sektor industri, yang mencakup Rp52 triliun untuk menanggung pajak penghasilan (PPh21) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPn); Rp12 triliun untuk pembebasan bea masuk; dan Rp6,1 triliun untuk stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bayang-bayang PHK

Seperti yang dipikirkan oleh Amalia, buruh pabrik garmen dan tekstil di Indonesia juga resah dengan upah yang tidak dibayar hingga pemutusan hubungan kerja. Dian Septi, mengatakan, dari laporan yang diterima FBLP, banyak buruh dari kawasan KBN Cakung terancam dirumahkan tanpa mendapatkan upah.

“Saat ini banyak yang masih dalam tahap perundingan, ada juga yang sudah meliburkan tanpa dibayarkan. Salah satunya PT. Amos Indah Indonesia, dengan sekitar 800 buruh terancam dirumahkan tanpa dibayarkan upahnya, saat ini dalam tahap perundingan,” ujar Dian.

“Ini sangat bergantung pada kapasitas buruh dan serikatnya bernegosiasi dengan perusahaan, sementara kita tahu bahwa relasi antara buruh dan perusahaan itu timpang sekali. Jadi situasinya sulit,” ia menambahkan.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran yang menghimbau perusahaan untuk tetap mengupah pekerjanya walaupun dirumahkan. Menanggapi hal ini, menurut Dian himbauan tersebut justru memperlemah posisi buruh dalam bernegosiasi.

“Di dalam edaran tersebut disampaikan bahwa apabila diliburkan, dalam hal upah bisa didiskusikan di tempat kerja. Itu artinya, boleh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Kalau sudah seperti ini apakah buruh berani menawar? Ya tentu tidak karena posisinya lemah,” ujarnya.

Dian menambahkan, seharusnya negara memberikan kepastian hukum yang ketat dan melindungi pekerja bukan hanya sekadar himbauan saja dan menyediakan kartu pra-kerja.

“Selain itu, di tengah kondisi seperti ini pemerintah harus memastikan agar perusahaan tidak kabur, karena dalam situasi seperti ini rentan sekali perusahaan kabur. jadi sanksinya dipertegas bukan malah diperlonggar,” ujarnya.

Setelah mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan terkait dengan perlindungan pekerja, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah mempersiapkan kartu pra-kerja yang saat ini beralih fungsi membantu pekerja yang terkena PHK. Dikutip dari *Kompas.com*, pekerja formal maupun informal dapat mendaftar untuk mengikuti program ini dan mendapatkan insentif untuk pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp600 ribu setiap bulan selama empat bulan ke depan.

Ekonom Aviliani mengatakan, kebijakan-kebijakan ekonomi yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah baik untuk membantu masyarakat maupun pengusaha sudah baik. Ia menekankan pemerintah harus melihat secara teliti mana saja perusahaan yang pekerjajanya terkena imbas dari wabah ini.

“Kalau perusahaan besar kan punya cadangan laba yang disimpan jika terjadi apa-apa. Nah, sebelumnya juga pemerintah telah memberikan banyak relaksasi kebijakan untuk membantu pengusaha,” ujar Aviliani pada *Magdalene*.

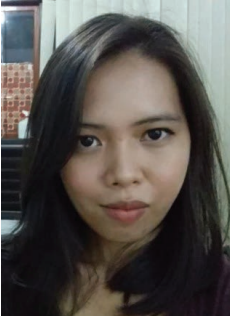
Ia menambahkan, seharusnya tidak ada alasan bagi perusahaan besar untuk mem-PHK para pekerjanya, karena akan sulit bagi perusahaan untuk mencari pekerja baru lagi dalam kondisi seperti ini, dan tentunya pengeluarannya pun akan lebih mahal.

“Pihak pengusaha seharusnya mengubah cara pikir mereka, dan mengutamakan sumber daya manusia mereka saat ini. Ya

tidak apa-apa kalau misalkan pemasukan turun, kan memang kondisinya berbeda dari biasanya,” ujarnya.

Ilustrasi oleh Karina Tungari

Karya telah tayang di Magdalene.co, 23 April 2020



Ilona Esterina Piri

Manado Bacirita
(Kumparan)

Ia lahir di Dumai, 10 desember 1993. Saat ini ia bekerja sebagai jurnalis di Manado Bacirita (Kumparan). Ilona merupakan lulusan Universitas Sam Ratulangi Manado.

UPAYA PETANI DI SAAT KOPRA MURAH

Ilona Esterina Piri - 19 April 2020



Foto: Dok : Ilona

“Harga bahan pokok semakin lama semakin naik, tapi kopra sekarang justru murah. Saat ini kami mulai coba beralih ke alternatif lain, yaitu menjual langsung kelapa biji. Untuk segi harga tidak terlalu jauh, tapi proses pengerjaan dan penjualan kelapa biji lebih cepat, lebih hemat waktu.”

Hal tersebut diungkap seorang petani kopra di Minahasa Selatan, Boyke Sondakh (51). Ditemui Sabtu, 21 Maret 2020 lalu ia menyebutkan harga kopra kini berada pada kisaran RP 4.600 per kilogramnya. Harga kerap mengalami naik turun, namun jikapun naik, ia mengatakan hanya berkisar 5000 per kilogram. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, bisa dikatakan harga saat ini anjlok.

Keresahan perihal harga kopra yang murah kini tengah dirasakan sejumlah petani kopra di Minahasa Selatan (Minsel). Menjadi salah satu kabupaten di Sulut yang juga penghasil kelapa terbesar, tiap tahunnya Minsel mampu menghasilkan kelapa dengan nilai produksi mencapai lebih dari 40.000 ton, sesuai data BPS.

Kopra merupakan produk turunan kelapa yang memiliki banyak fungsi. Sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan, puluhan ribu petani di Minsel sudah merasakan manfaat ekonomi komoditas ini. Minyak kelapa dinilai sebagai makanan kesehatan yang bernutrisi. Minyak kelapa mentah dihasilkan dari kopra yaitu daging kelapa yang dikeringkan.

Meski telah membantu perekonomian petani, beberapa petani mengeluhkan anjloknya harga komoditas ini. Seperti dikisahkan Boyke Sondakh yang merupakan petani kopra di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minsel. Selain harga yang murah ia harus membagi hasil penjualan dengan pekerja pemetik kelapa karena ia sudah tidak mampu lagi memetik sendiri kelapa. Untungnya ia pribadi memiliki sendiri moda angkutan roda sapi untuk mengangkut hasil pertanian. Sementara petani lain ada yang harus menggunakan sistem sewa karena tidak punya angkutan sendiri.

Keluhan soal anjloknya harga kopra juga dirasakan petani lain di Tondei. Hukum Tua (Kepala Desa) Tondei, John Kawengian juga kerap mendengar keluh kesah warganya tentang harga kopra. Ia menerangkan beberapa tahun terakhir harga berada di bawah terus sementara bagi petani pemilik lahan yang harus

bayar tenaga kerja, upahnya terus naik.

Petani kopra pernah merasakan masa jaya saat kopra pernah dihargai Rp 10.000 per kilonya pada awal 2011 dan mengalami penurunan signifikan pada awal 2012. "Sekarang harganya berada pada kisaran di bawah Rp 5.000 saat turun bisa sampai RP 3.000. Otomatis masyarakat desa pada umumnya kecewa karena kopra merupakan sumber penghasilan terbesar masyarakat Tondei," ungkap John.

Jika dihitung secara keseluruhan hasil kopra dari seluruh petani Desa Tondei bisa hampir 1000 ton per kuartal. John yang juga memiliki lahan pertanian kelapa sendiri mengatakan kelapa merupakan komoditas pertanian utama desa ini. Kopra dijual ke sejumlah perusahaan di Minsel hingga ke Bitung oleh petani. Skema penjualan kopra melalui dua cara yaitu melalui pengumpul dan oleh petani langsung. Anjloknya harga, lanjut John membuat banyak petani di desanya memilih mulai beralih ke penjualan kelapa biji.

Salah seorang warga pemilik kebun dan tempat pembakaran kopra Donal Lumenta mengatakan di tingkatan pengumpul harga kopra saat ini murah, banyak petani kopra mulai beralih ke kelapa biji yang dianggap lebih mudah. Walaupun masih tergolong murah Donal mengaku masih dapat keuntungan dari hasil kopranya dan tidak berniat berpindah ke hasil pertanian lain.

Petani kopra lain di Minsel, Wensly (52) mengatakan saat kelapa murah, untuk membantu menambah penghasilannya ia membuat gula aren.

Pohon aren yang tumbuh di tanah Minahasa juga dianggap sebagai anugerah bagi warga. Meski tidak dibudidayakan sebagai tanaman pertanian, Aren yang tumbuh liar di banyak tempat termasuk di area perkebunan dimanfaatkan dengan baik oleh petani.

Sebagian petani memanfaatkannya untuk menghasilkan gula aren, dan bisa pula menjadi bahan utama olahan minuman beralkohol khas Minahasa, Cap Tikus. "Sekarang lebih sering bikin gula aren dari pada bakopra. Ke kebun masih memanen kelapa sesekali, tapi untuk buat kopranya mulai pikirkan untung rugi, kalau lebih banyak rugi atau tidak untung lebih baik jual kelapa biji saja," terangnya.

Mengenal Kultur dan Sejarah Bakopra

Sulawesi Utara terkenal dengan ragam komoditas pertanian unggulan. Selain cengkih, pala dan kopi, salah satu yang terbesar adalah kelapa, dengan produk turunannya kopra. Tanaman kelapa tumbuh subur di hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Utara, seperti halnya di Minahasa Selatan.

Minahasa Selatan (Minsel) merupakan kabupaten di Sulawesi Utara yang terkenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopra terbesar. Menurut data BPS Sulawesi Utara tahun 2018, luas tanaman kelapa perkebunan rakyat di Kabupaten Minahasa Selatan merupakan yang terbesar kedua setelah Minahasa Utara, yakni 45 751. Ha. Kelapa juga menjadi komoditas unggulan di kabupaten dengan 17 kecamatan dan berpenduduk lebih dari 209.000 jiwa ini.

Kopra merupakan turunan kelapa yang penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak, bahan dasar kosmetik, makanan, obat, dan banyak lagi. Berkunjung ke desa-desa penghasil kopra di Selatan Minahasa, sejauh mata memandang akan mudah menemukan orang dengan aktivitas bakopra, yaitu kegiatan memanen, mengangkut dan mengolah kelapa menjadi kopra di tempat pembakaran.

Tondei merupakan salah satu desa di Minsel yang lebih dari 80% warganya merupakan petani kelapa. Boyke Sondakh salah satunya. Ia menjadi saksi bagaimana kultur bakopra masyarakat Tondei telah dibangun bertahun-tahun lamanya. Sebagian besar warga memiliki kebun kelapa sendiri yang diwariskan turun-

temurun. Dirinya merupakan salah satu petani kelapa yang juga mewarisi kebun sekaligus tradisi bakopra dari ayah dan kakeknya.

Kegiatan bertani kelapa mudah dijumpai di sejumlah daerah di Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Peneliti antropologi di Anthro Pasific Institute Manado, Nono S. A. Sumampouw, mengungkapkan kelapa sebagai komoditas mulai diperkenalkan di Sulut sejak jaman Kolonial.

“Kelapa mulai jadi tanaman kultivasi dikenalkan oleh Belanda. Meski bukan merupakan tanaman introduksi dan sebelumnya telah tumbuh di tanah Sulawesi Utara, kelapa baru menjadi tanaman kultivasi mulanya dikenalkan di Kepulauan Siau, Sulawesi Utara pada 1860. Kopra mulai jadi produk ekspor unggulan pada 1890, dan mulai dikenalkan pada petani di berbagai wilayah di Sulawesi Utara,” ujar Nono, pada Senin 16 Maret 2020.

Selain memproduksi kopra, petani di Minsel juga pandai mengolah kelapa untuk subsisten. Hampir semua petani kelapa paham proses pembuatan minyak kelapa untuk konsumsi sendiri. Kayu kelapa juga oleh petani dan warga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat rumah kayu dan banyak lagi.

Saat ekspansi sawit mulai menggeser hutan dan lahan perkebunan di sejumlah wilayah di Indonesia, kelapa tetap jadi tanaman pertanian pilihan masyarakat Sulut.

Selain memiliki nilai sosio-historis, Nono menambahkan kelapa masih menjadi pilihan petani karena merupakan tanaman yang memungkinkan sistem menanam tumpang sari. “Beda dengan sawit, petani kelapa bisa menanam tanaman lain di sekitar tanaman kelapanya. Selain itu alasan petani tetap memilih kelapa karena selain dijadikan kopra, hampir semua bagian kelapa bisa digunakan, seperti kayunya untuk bangunan, pelepah, dan sabut kelapa.”

Seperti penuturan Nono, Boyke Sondakh mengaku kebun tanaman kelapa yang dimilikinya turut ditanami juga tanaman lain seperti cengkih, dan buah durian. Karena umumnya merupakan warisan turun temurun, banyak pohon kelapa di Desa Tondei yang telah berusia lebih dari 100 tahun.

Ilmu menanam kelapa dan memproduksi kopra didapatnya dari melihat langsung aktivitas bertani warga, dan diajarkan oleh Het Sondakh (78), ayahnya yang juga petani. Keahlian bakopra juga diturunkan Boyke kepada anaknya yang saat ini tengah menempuh studi di salah satu perguruan tinggi negeri di Manado.

Kelapa merupakan sumber mata pencarian keluarga ini. Dari hasil kopra dari kebun kelapanya, Het menghidupi lima orang anak dan kini dari hasil tersebut turut membantu biaya kuliah cucu-cucunya. Selain menanam kopra Ia juga memiliki tanaman cengkih yang ditanam bersilangan dengan kelapa. Ditemui pada Minggu, 22 Maret 2020, Het mengaku dari segi perawatan kelapa masih tergolong lebih mudah dibanding cengkih.

“Kalo cingke (cengkih) harus perawatan ekstra termasuk rutin pembersihan dan penyemprotan hama. Kalau tidak bisa tidak berbuah dengan baik. Walaupun harga jualnya jauh lebih mahal tapi cingke tergantung musim, hanya berbuah saat panas panjang, dan untuk panen besar bisa menunggu empat hingga lima tahun sekali,” terangnya.

Untuk memanen kelapa yang siap diolah menjadi kopra hanya butuh waktu tiga bulan sekali (kuartal). Bisa diatur hingga dua bulan sekali untuk panen kelapa biji. Jika hanya berharap pada panen cengkih, Het menyebutkan petani di Desa Tondei tidak akan ‘hidup’.

Pohon kelapa di desa Tondei banyak yang telah berusia ratusan tahun, petani hanya perlu peremajaan bagi beberapa kelapa yang sudah merunduk, sementara kelapa tua lainnya masih bisa dipanen.

Peneliti Nono Sumampouw mengatakan kopra pernah menjadi komoditas ekspor penting di Sulut pada 1920 dengan mengambil bagian sebesar 87% dari keseluruhan nilai ekspor. Hingga saat ini kopra sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan telah membantu perekonomian puluhan ribu petani di Minahasa Selatan. Tak hanya petani pemilik lahan, pekerja yang memetik dan membantu proses pembakaran kopra pun menerima manfaat ekonomis dari pohon bernama latin *cocos nucifera* ini.

Hal serupa diucap petani Kopra di Desa Paslaten, Jelly Rembang. Pria yang telah lebih dari 20 tahun menjadi petani tersebut mengaku dari hasil kopra dirinya mampu membantu penghidupan dan meningkatkan perekonomian keluarga, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja bagi petani yang tidak punya lahan yang dipekerjakan sebagai pemetik kelapa maupun membantu produksi kopra.

Komitmen Perusahaan Bantu Petani

PT Cargill Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang menerima pasokan kopra dari petani di Minsel. Perusahaan ini memiliki fasilitas pengolahan kopra yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Amurang, Kabupaten Minsel.

Cargill merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan, pertanian, keuangan, dan industri dan kini tersebar di lebih dari 125 negara. Dalam laman Cargill.co.id disebutkan komitmen perusahaan bersama-sama membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk dunia pertanian.

Perusahaan ini memulai usahanya di Indonesia pada 1974 dengan mendirikan pabrik pakan di Bogor, Jawa Barat. Saat ini berkantor pusat di Jakarta dan tersebar di 60 lokasi dengan kantor-kantor, pusat produksi dan fasilitas di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Utara.

Beberapa tahun terakhir Cargill telah memperluas aktivitas yang berkaitan dengan produksi melalui akuisisi dan perluasan fasilitas pengolahan kopra di Amurang, Minsel. Fasilitas ini memproduksi minyak kelapa dan bungkil kopra, terutama untuk ekspor, serta menampung tangki penyimpanan curah untuk minyak laurat dengan kapasitas 31.000 metrik ton.

Perusahaan ini membeli hasil kopra petani, mengolahnya menjadi minyak kelapa, dan mengekspor sebagian besar minyak kelapa ke Amerika Serikat dan Eropa. Kesejahteraan petani khususnya petani kelapa merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Cargill. Laporan tahunan 2018 (Annual Report) dari data base Global Reporting Initiative (GRI) disebutkan hingga 2018 Cargill telah melatih lebih dari 475.000 petani dalam praktik pertanian berkelanjutan. Dituliskan pula hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan prioritas serta sorotan pembangunan berkelanjutan dari perusahaan. Bahkan pada 2030 Cargill menargetkan memberikan pelatihan praktik pertanian berkelanjutan dan meningkatkan akses ke pasar untuk 10 juta petani.

Sesuai dengan komitmen Cargill Indonesia yang ditulis dalam laman web-nya, disebutkan sebagai warga korporat Indonesia yang bertanggungjawab, perusahaan lewat program-program lokalnya membantu perkembangan pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan membantu warga dan lingkungan.

Hal itu juga disampaikan melalui humas perusahaan di Amurang, Marthen Sorongan. Marthen mengatakan Cargill berkomitmen terus memberikan dukungan kepada petani lokal melalui pelatihan, program penguatan masyarakat dan penggunaan teknologi yang dapat membuat aktivitas petani kelapa menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

“Salah satunya sudah melalui kegiatan Continuous Improvement (CI). Cargill memberikan pelatihan tentang diversifikasi pertanian. Petani didorong melakukan tumpangsari dan

penanaman kembali, mengeksplorasi kesesuaian tanaman dan hubungan pasar untuk mendukung keberlanjutan produk pertanian lainnya,” terangnya saat diwawancara 3 April 2020 lalu.

Cargill juga bermitra dengan pemerintah dengan berpartisipasi dalam menyediakan program perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan jaminan sosial (asuransi kecelakaan kerja) selama dua tahun kepada 88 petani Minsel yang telah mengikuti standar Sustainable Agriculture Network (SAN) dan telah menerima sertifikasi Rainforest Alliance. Sinergitas dengan pemerintah juga ditunjukkan dengan membantu mendukung program pemerintah mensejahterakan petani di Minsel.

Ia menambahkan perusahaan akan terus meningkatkan dukungan, berdasarkan kerja besar yang telah dicapai dengan petani kelapa kecil untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian mereka sembari memajukan pasokan minyak kelapa berkelanjutan di dunia.

Sejak 2017 PT Cargill mulai melakukan pelatihan standar pertanian berkelanjutan kepada 88 petani kopra lokal di Minsel. Petani peserta pelatihan juga menerima sertifikat produksi kelapa berkelanjutan, Rainforest Alliance.

Hal ini merupakan bagian dari program perusahaan membantu petani kopra di Indonesia dan Filipina, yang merupakan dua negara produsen kelapa terbesar di dunia guna mengembangkan kehidupan petani, meningkatkan pendapatan dan pada waktunya mengarahkan pada produksi minyak kelapa yang berkelanjutan.

Jelly Rembang menjadi salah satu petani kopra yang mengikuti pelatihan. Ia mengaku menerima pelatihan seperti pemanfaatan lahan, manajemen, budidaya kelapa, bahkan budidaya tanaman lain.

“Sampai saat ini untuk pelatihan lanjutannya masih terus dilakukan pendampingan dari PT Cargill dan Yayasan Batuna kepada kami petani,” terangnya.

Setelah menerima pelatihan dan masih mendapatkan pendampingan Jelly mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut untuk peningkatan kapasitasnya sebagai petani. Di samping itu perusahaan juga memberikan bantuan berupa bibit kelapa, jagung dan mesin paras yang dibagikan ke tiga kelompok petani di desanya.

Hal tersebut dinilai sangat membantu, mengingat pelatihan bagi petani belum sering dilakukan. “Manfaatnya selain meningkatkan kapasitas kami selaku petani juga membantu peningkatan ekonomi,” tambahnya lagi. Produktivitas hasil kebun pun meningkat.

Pria yang telah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai petani kopra ini berharap pendampingan masih terus dilakukan, dan ke depannya ia berharap pemerintah dan perusahaan dapat membantu pengadaan alat produksi kopra khususnya kopra putih yang nilai jualnya lebih mahal. Diperlukan tambahan oven dan alat pengering kelapa.

Untuk dukungan kepada petani lokal di Minsel, sudah dilakukan pula oleh perusahaan lewat program tanggung jawab korporat seperti distribusi 10.000 bibit kelapa ke 100 petani(2012-2013), program *Coconut Farmers Empowerment* (2016) dengan memberikan pupuk dan bibit secara bertahap, serta memberikan pelatihan *Farming Business School* (FBS) ke 359 petani.

Menanggapi keluhan petani tentang murahnya harga kopra, Cargill Indonesia menjawab melalui bidang kehutanan di Amurang. Marthen mengatakan daya beli dan volume yang diterima perusahaan ditetapkan bervariasi mengikuti permintaan pasar.

“Karena yang mempengaruhi harga pasar global, untuk membantu petani lebih paham pengelolaan ekonomi kopra, kami memberikan dukungan pengembangan kapasitas. Bermitra dengan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) kami mengikutsertakan petani lokal di Farming Business School, sebagai bagian dari pelatihan Rainforest Alliance. Diharapkan mereka lebih mampu mengelola pertanian mereka sebagai bisnis, daripada sekadar subsisten,” terang Marthen Sorongan.

Cargill mengklaim upaya perusahaan justru dilakukan lewat pelatihan pengelolaan bisnis kelapa dan pengetahuan tentang agrikultur lewat Good Agriculture Practice (GAP) meningkatkan produksi, membayar premi untuk kopra yang berkualitas dan berkelanjutan, serta dukungan teknis lain. Melalui upaya ini, Cargill menyebutkan produktivitas petani berhasil meningkat lebih dari 15% dan pendapatan lebih dari 30%.

Meski harga saat ini tergolong murah, hasil penjualan kopra masih tetap dirasakan manfaatnya dalam menopang perekonomian warga di Minsel. Petani kelapa di Minsel seperti Boyke, Jelly, dan petani kelapa lain di Selatan Minahasa masih tetap mengandalkan penghasilan dari kopra.

Karya telah tayang di [Independen.id](https://www.independen.id), 19 April 2020

POTRET PETANI KOPRA DI SELATAN MINAHASA (BAGIAN I DARI 2)

12 April 2020



Harga bahan pokok semakin lama semakin naik, tapi kopra sekarang justru murah. Saat ini kami mulai coba beralih ke alternatif lain, yaitu menjual langsung kelapa biji. Untuk segi harga tidak terlalu jauh, tapi proses pengerjaan dan penjualan kelapa biji lebih cepat, lebih hemat waktu.”

Hal tersebut diungkap seorang petani kopra di Minahasa Selatan (Minsel), Boyke Sondakh (51). Ditemui Sabtu, 21 Maret 2020 lalu ia menyebutkan harga kopra kini berada pada kisaran Rp4.600 per kilogramnya. Harga kerap mengalami naik turun, namun jikapun naik, ia mengatakan hanya berkisar Rp5.000 per

kilogram. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, bisa dikatakan harga saat ini anjlok.

Keresahan perihal harga kopra yang murah, kini tengah dirasakan sejumlah petani kopra di Minsel. Menjadi salah satu kabupaten di Sulut yang juga penghasil kelapa terbesar. Tiap tahunnya Minsel mampu menghasilkan kelapa dengan nilai produksi mencapai lebih dari 40.000 ton (data BPS).

Kopra merupakan produk turunan kelapa yang memiliki banyak fungsi. Sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan, puluhan ribu petani di Minsel sudah merasakan manfaat ekonomi komoditas ini. Minyak kelapa dinilai sebagai makanan kesehatan yang bernutrisi. Minyak kelapa mentah dihasilkan dari kopra yaitu daging kelapa yang dikeringkan.

Meski telah membantu perekonomian petani, beberapa petani mengeluhkan anjloknya harga komoditas ini. Seperti dikisahkan Boyke Sondakh yang merupakan petani kopra di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minsel. Selain harga yang murah, ia harus membagi hasil penjualan dengan pekerja pemetik kelapa karena ia sudah tidak mampu lagi memetik sendiri kelapa. Untungnya, ia pribadi memiliki sendiri moda angkutan roda sapi untuk mengangkut hasil pertanian. Sementara petani lain ada yang harus menggunakan sistem sewa karena tidak punya angkutan sendiri.

Keluhan soal anjloknya harga kopra juga dirasakan petani lain di Tondei. Hukum Tua (Kepala Desa) Tondei, John Kawengian juga kerap mendengar keluh kesah warganya tentang harga kopra. Ia menerangkan beberapa tahun terakhir harga berada di bawah terus sementara bagi petani pemilik lahan yang harus bayar tenaga kerja, upahnya terus naik.

Petani kopra pernah merasakan masa jaya saat kopra pernah dihargai Rp10.000 per kilogramnya, pada awal 2011 dan mengalami penurunan signifikan pada awal 2012.

“Sekarang harganya berada pada kisaran di bawah Rp5.000, saat turun bisa sampai Rp3.000 per kilogram. Otomatis masyarakat desa pada umumnya kecewa karena kopra merupakan sumber penghasilan terbesar masyarakat Tondei,” ungkap John. Jika dihitung secara keseluruhan hasil kopra dari seluruh petani desa Tondei bisa hampir 1000 ton per kuartal. John yang juga memiliki lahan pertanian kelapa sendiri mengatakan kelapa merupakan komoditas pertanian utama desa ini.

Kopra dijual ke sejumlah perusahaan di Minsel hingga ke Bitung oleh petani. Skema penjualan kopra melalui dua cara yaitu melalui pengumpul dan oleh petani langsung. Anjloknya harga, lanjut John, membuat banyak petani di desanya memilih mulai beralih ke penjualan kelapa biji.

Salah seorang warga pemilik kebun dan tempat pembakaran kopra, Donal Lumenta mengatakan di tingkatan pengumpul harga kopra saat ini murah, banyak petani kopra mulai beralih ke kelapa biji yang dianggap lebih mudah. Walaupun masih tergolong murah, Donal mengaku masih dapat keuntungan dari hasil kopranya dan tidak berniat berpindah ke hasil pertanian lain.

Petani kopra lain di Minsel, Wensly (52) mengatakan saat kelapa murah, untuk membantu menambah penghasilannya, ia juga membuat gula aren.

Pohon aren yang tumbuh di tanah Minahasa dianggap sebagai anugerah bagi warga. Meski tidak dibudidayakan sebagai tanaman pertanian, aren yang tumbuh liar di banyak tempat termasuk di area perkebunan dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Sebagian petani memanfaatkannya untuk menghasilkan gula aren, dan bisa pula menjadi bahan utama olahan minuman beralkohol khas Minahasa, *Cap Tikus*. “Sekarang lebih sering bikin gula aren daripada *bakopra*. Ke kebun masih memanen kelapa sesekali, tapi untuk buat kopranya mulai pikirkan untung-rugi. Kalau lebih banyak rugi atau tidak untung, lebih baik jual kelapa biji saja,” terangnya.

Mengenal Kultur dan Sejarah Bakopra

Sulawesi Utara terkenal dengan ragam komoditas pertanian unggulan. Selain cengkih, pala, dan kopi, salah satu yang terbesar adalah kelapa, dengan produk turunannya kopra. Tanaman kelapa tumbuh subur di hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Utara, seperti halnya di Minahasa Selatan ini. Minahasa Selatan merupakan kabupaten di Sulawesi Utara yang terkenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopra terbesar. Menurut data BPS Sulawesi Utara tahun 2018, luas tanaman kelapa perkebunan rakyat Minsel merupakan yang terbesar kedua setelah Minahasa Utara, yakni 45.751 Ha. Kelapa juga menjadi komoditas unggulan di kabupaten dengan 17 kecamatan dan berpenduduk lebih dari 209.000 jiwa ini.

Kopra merupakan turunan kelapa yang penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak bahan dasar kosmetik, makanan, obat, dan banyak lagi.

Berkunjung ke desa-desa penghasil kopra di Selatan Minahasa, sejauh mata memandang akan mudah menemukan orang dengan aktivitas *bakopra*: kegiatan memanen, mengangkut dan mengolah kelapa menjadi kopra di tempat pembakaran.

Tondei merupakan salah satu desa di Minsel yang lebih dari 80% warganya merupakan petani kelapa. Boyke Sondakh salah satunya. Ia menjadi saksi bagaimana kultur *bakopra* masyarakat Tondei telah dibangun bertahun-tahun lamanya. Sebagian besar warga memiliki kebun kelapa sendiri yang diwariskan turun-temurun. Ia merupakan salah satu petani kelapa yang juga mewarisi kebun sekaligus tradisi *bakopra* dari ayah dan kakeknya.

Kegiatan bertani kelapa mudah dijumpai di sejumlah daerah di Sulawesi Utara khususnya di Minsel. Peneliti antropologi di *Anthro Pasific Institute Manado*, Nono S. A. Sumampouw mengungkapkan kelapa sebagai komoditas mulai diperkenalkan di Sulut sejak zaman kolonial.

“Kelapa mulai jadi tanaman kultivasi dikenalkan oleh Belanda. Meski bukan merupakan tanaman introduksi dan sebelumnya telah tumbuh di tanah Sulawesi Utara, kelapa baru menjadi tanaman kultivasi mulanya dikenalkan di Kepulauan Siau, Sulawesi Utara pada 1860. Kopra mulai jadi produk ekspor unggulan pada 1890, dan mulai dikenalkan pada petani di berbagai wilayah di Sulawesi Utara,” ujar Nono, pada Senin 16 Maret 2020.

Selain memproduksi kopra, petani di Minsel juga pandai mengolah kelapa untuk subsisten. Hampir semua petani kelapa paham proses pembuatan minyak kelapa untuk konsumsi sendiri. Kayu kelapa juga oleh petani dan warga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat rumah kayu dan banyak lagi.

Saat ekspansi sawit mulai menggeser hutan dan lahan perkebunan di sejumlah wilayah di Indonesia, kelapa tetap jadi tanaman pertanian pilihan masyarakat Sulut.

Selain memiliki nilai sosio-historis, Nono menambahkan kelapa masih menjadi pilihan petani karena merupakan tanaman yang memungkinkan sistem menanam tumpang sari. “Beda dengan sawit, petani kelapa bisa menanam tanaman lain di sekitar tanaman kelapanya. Selain itu alasan petani tetap memilih kelapa, karena selain dijadikan kopra, hampir semua bagian kelapa bisa digunakan, seperti kayunya untuk bangunan, pelepah, dan sabut kelapa.”

Seperti penuturan Nono, Boyke Sondakh mengaku kebun tanaman kelapa yang dimilikinya turut ditanami tanaman lain seperti cengkik, dan buah durian. Karena umumnya merupakan warisan turun temurun, banyak pohon kelapa di Desa Tondei yang telah berusia lebih dari 100 tahun.

Karya telah tayang di voxdoc.id, 12 April 2020

POTRET PETANI KOPRA DI SELATAN MINAHASA

(BAGIAN 2 DARI 2)

11 APRIL 2020



Selain belajar langsung dari warga sekitar, dari ayahnya, Het Sondakh (78), Boyke mendapat ilmu menanam kelapa dan memproduksi kopra. Keahlian *bakopra* juga diturunkan Boyke kepada anaknya yang saat ini tengah menempuh studi di salah satu perguruan tinggi negeri di Manado.

Kelapa merupakan sumber mata pencarian keluarga ini. Dari hasil kopra kebun kelapanya, Het menghidupi lima orang anak dan kini dari hasil tersebut turut membantu biaya kuliah cucu-cucunya. Selain menanam kopra Ia juga memiliki tanaman

cengkih yang ditanam bersilangan dengan kelapa. Ditemui pada Minggu, 22 Maret 2020, Het mengaku dari segi perawatan kelapa masih tergolong lebih mudah dibanding cengkih. "Kalo cingke (cengkih) harus perawatan ekstra termasuk rutin pembersihan dan penyemprotan hama. Kalau tidak, bisa tidak berbuah dengan baik. Walaupun harga jualnya jauh lebih mahal tapi cingke tergantung musim, hanya berbuah saat panas panjang, dan untuk panen besar bisa menunggu empat hingga lima tahun sekali," terangnya.

Untuk memanen kelapa yang siap diolah menjadi kopra hanya butuh waktu tiga bulan sekali (kuartal). Bisa diatur hingga dua bulan sekali untuk panen kelapa biji. Jika hanya berharap pada panen cengkih, Het menyebutkan petani di Desa Tondei tidak akan 'hidup'.

Pohon kelapa di Desa Tondei banyak yang telah berusia ratusan tahun. Petani hanya perlu peremajaan bagi beberapa kelapa yang sudah merunduk, sementara kelapa tua lainnya masih bisa dipanen.

Peneliti, Nono Sumampouw mengatakan kopra pernah menjadi komoditas ekspor penting di Sulut pada 1920 dengan mengambil bagian sebesar 87% dari keseluruhan nilai ekspor. Hingga saat ini kopra sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan telah membantu perekonomian puluhan ribu petani di Minsel. Tak hanya petani pemilik lahan, pekerja yang memetik dan membantu proses pembakaran kopra pun menerima manfaat ekonomis dari pohon bernama latin *cocos nucifera* ini.

Hal serupa diucap petani Kopra di desa Paslaten, Jelly Rembang. Pria yang telah lebih dari 20 tahun menjadi petani tersebut mengaku dari hasil kopra dirinya mampu membantu penghidupan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Bahkan bisa menciptakan lapangan kerja bagi petani yang tidak punya lahan, dipekerjakan sebagai pemetik kelapa maupun membantu produksi kopra.

Komitmen Perusahaan Bantu Petani

Keluhan tentang murahnya harga kopra membuat petani di Minsel meminta pemerintah membantu intervensi harga. Di samping itu, petani juga meminta perusahaan pembeli kopra membeli dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga saat ini.

“Banyak sekarang yang beralih ke kelapa biji, karena harga kopra yang murah, petani di sini banyak yang memasok kopra ke beberapa perusahaan di Amurang dan Bitung. Petani berharap ada campur tangan pemerintah dan perusahaan untuk membantu membeli kopra dengan harga lebih tinggi dari harga saat ini,” demikian dituturkan Hukum Tua desa Tondei, John Kawengian.

Menjawab hal itu, PT Cargill, salah satu perusahaan pembeli kopra, melalui humas perusahaan di Amurang, Marthen Sorongan, mengatakan daya beli dan volume yang diterima perusahaan ditetapkan bervariasi mengikuti permintaan pasar.

“Karena yang mempengaruhi harga pasar global, untuk membantu, petani lebih paham pengelolaan ekonomi kopra, kami hanya memberikan dukungan lewat pengembangan kapasitas. Kami mengikutsertakan petani lokal di *Farming Business School*, sebagai bagian dari pelatihan *Rainforest Alliance*. Diharapkan mereka lebih mampu mengelola pertanian mereka sebagai bisnis, daripada sekedar subsisten,” terang Marthen Sorongan.

PT Cargill Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang menerima pasokan kopra dari petani di Minsel. Perusahaan ini memiliki fasilitas pengolahan kopra yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Amurang.

Kesejahteraan petani khususnya petani kelapa merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Cargill. Annual Report atau Laporan Tahunan dari data base *Global Reporting Initiative (GRI)*

disebutkan hingga 2018 Cargill telah melatih lebih dari 475.000 petani seluruh dunia dalam praktik pertanian berkelanjutan. Dituliskan pula hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan prioritas serta sorotan pembangunan berkelanjutan dari perusahaan. Bahkan pada 2030 Cargill menargetkan memberikan pelatihan praktik pertanian berkelanjutan dan meningkatkan akses ke pasar untuk 10 juta petani.

Sejak 2017, PT Cargill mulai melakukan pelatihan standar untuk pertanian berkelanjutan kepada 88 petani kopra lokal di Minsel. Petani peserta pelatihan juga menerima sertifikat produksi kelapa berkelanjutan, *Rainforest Alliance*.

Hal ini merupakan bagian dari program perusahaan membantu petani kopra di Indonesia dan Filipina, yang merupakan dua negara produsen kelapa terbesar di dunia, guna mengembangkan kehidupan petani, meningkatkan pendapatan dan pada waktunya mengarahkan pada produksi minyak kelapa yang berkelanjutan.

Jelly Rembang menjadi salah satu petani kopra yang mengikuti pelatihan. Ia mengaku menerima pelatihan seperti pemanfaatan lahan, manajemen, budidaya kelapa, bahkan budidaya tanaman lain.

“Sampai saat ini untuk pelatihan lanjutannya masih terus dilakukan pendampingan dari PT Cargill dan Yayasan Batuna kepada kami petani,” terangnya.

Meski harga saat ini tergolong murah, hasil penjualan kopra masih tetap dirasakan manfaatnya dalam menopang perekonomian warga di Minsel. Petani kelapa di Minsel seperti Boyke, Jelly, dan petani kelapa lain di Selatan Minahasa masih tetap mengandalkan penghasilan dari kopra. Kedepannya petani berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib petani kelapa khususnya dalam hal intervensi harga.

Karya telah tayang di voxdoc.id, 11 April 2020



**Latifa Nurina
Ayuningtyas**

Radar Jogja

Ia lahir di Yogyakarta, 23 Juli 1995. Saat ini, lulusan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada ini bekerja sebagai jurnalis di Jawa Pos Radar Jogja (DIGITAL).

RUMAH KREATIF DORONG UMKM GO ONLINE

Latifa Nurina Ayuningtyas - 17 April 2020



AGAR NAIK KELAS: Beberapa pelaku UMKM anggota Rumah Kreatif BUMN BRI (RKB) Jogja bersama para mentor dalam kegiatan pelatihan. (Ahmad Nur Umam for Radar Jogja)

RADAR JOGJA - Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penyelamat perekonomian Indonesia ketika krisis ekonomi 1998. Sekarang ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kembali UMKM menjadi harapan meski turut terdampak. Namun dengan situasi berbeda, karena kebijakan jaga jarak, maka UMKM Online menjadi pilihan.

Di Jogjakarta, UMKM umumnya bergerak bidang kriya atau *craft*, fesyen, dan kuliner. Mereka masih banyak kendala, mulai dari soal administrasi, permodalan, sampai bagaimana pemasaran *online*. Berbagai pihak mulai dari lembaga pemerintahan, badan usaha, baik negeri maupun swasta berlomba membina UMKM.

Salah satunya melalui program pembinaan UMKM di Rumah Kreatif BUMN Jogja yang dikelola Bank Rakyat Indonesia (BRI). Lokasinya ada di lantai 2 Wisma BRI Jalan Sagan Tim No 123, Terban, Gondokusuman, Jogja. Tempat ini difasilitasi dengan ruang kerja (*co-working space*) yang nyaman, *WiFi*, ruang display produk, beberapa unit komputer untuk desain, ruang pelatihan, hingga kafe.

Merasa perlu wadah dalam dunia bisnis, salah satu pelaku UMKM Jogjakarta, Caecilia bergabung dengan Rumah Kreatif BUMN BRI Jogja (RKB) di tahun 2018. Usaha miliknya bergerak di bidang fesyen *hand made*. Mulai dari baju, tas, dan pernik-pernik lainnya yang dibuat dari bahan kain natural.

Caecilia bergabung dengan RKB sebagai pelaku UMKM semata, bukan sebagai kreditur BRI. Selama kurang lebih enam bulan bergabung, dia mengaku banyak manfaat yang dia dapat.



Pemaparan materi dari mentor dalam salah satu kelas pelatihan di RKB Jogja. (RKB for Radar Jogja)

Sayangnya, dia tidak bisa sering-sering ke RKB karena prioritas produksi dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Ibu dua anak ini mengatakan, UMKM lain yang sudah memiliki tim atau karyawan maupun yang belum berkeluarga lebih rajin dan leluasa datang ke RKB untuk mengikuti setiap kelasnya.

“Yang saya rasakan amat sangat bermanfaat adalah pelatihan FB *advertisement* dengan mentor yang sudah melakukan FB Ads itu sendiri dan omzetnya Rp 100 juta per hari. Beliau menerangkan bagaimana membuat iklan berbayar di FB dengan pertemuan yang cukup banyak,” ungkapnya.

Mentor Tidak Transparan Mengecewakan

Di satu sisi, banyak pula hal-hal yang menurutnya kurang bermanfaat bagi UMKM dan itu membuatnya kecewa. Caecilia merasa kurang pas dengan program konsultasi wajib dengan mentor di RKB.

“Terasa terlalu kaku karena para mentor meminta laporan keuangan tiap bulan. Mentor yang saya dapat sebenarnya bukan mentor yang terbukti berhasil dalam dunia bisnis, sehingga kurang dapat dipercaya ketika dia memberikan masukan harus begini begitu,” keluhnya.

Bagi Caecilia, UMKM dengan kapasitas terbatas seperti dia yang terpenting adalah jualan, lalu dapat untung untuk kebutuhan sehari-hari. Membuat laporan untuk mentor dengan segala tetek bengeknya masih menjadi momok baginya. Dia sendiri memilih menggunakan aplikasi di ponsel untuk mencatat penjualan dan pengeluaran usahanya. Meski modelnya sederhana, cukup praktis untuk tetap mengontrol keuangan.

“Kalau disuruh laporan kan harus ngetik ulang. Ketika kami tidak ada penjualan dianggap malas, kurang berusaha. *Lha*, kalo saya *gini* kan *nyantai*. Walaupun saya punya satu asisten tapi kan *nggak* ngebut seperti pabrikaan,” ujarnya.

Caecilia juga merasa tidak mendapatkan hasil dari konsultasi tersebut karena mentor tidak menguasai bidang yang ditekuni anggota. Misalnya, persoalan bisnis *hand made* tentu akan berbeda dengan bisnis grosiran. “Intinya terlalu banyak teori tapi di lapangan tidak banyak tempat,” tegasnya.

Dalam pembinaan UMKM di RKB, BRI juga memberi kesempatan bagi para anggota untuk mengikuti pameran secara gratis. Peserta pameran akan dipilih melalui kurasi produk. Caecilia pun mengeluhkan sistem kurasi pameran yang menurutnya tidak transparan.

“Ternyata sudah ada *member* favorit atau pilihan lain yang tau hal ini lebih dulu. Sehingga *member* lain yang baru dikasih tahu info mendadak, jadi tidak lolos kurasi. Padahal harus datang malam-malam ke RKB. Ya semacam basa basi saja kurasinya, ini curhatan *member* lain juga,” bebernya.

Caecilia mempertanyakan ketika misalnya UMKM A dipilih lolos kurasi sedangkan UMKM B tidak dipilih, padahal B dinilai lebih berkualitas. Lebih membuatnya kecewa lagi ketika mengetahui produk A adalah produk yang tidak orisinil dalam pembuatannya.

“Pernah dulu dihubungi sore, lalu harus kirim data dan foto produk *deadline* jam 10 malam untuk pameran BRI di Jakarta. Lalu disuruh kirim produk malam-malam ke RKB, padahal banyak UMKM yang rumahnya jauh. Eh besoknya, yang lolos kurasi ya yang itu-itu lagi,” kenangnya kesal. “Ada gosip kalau mau sering lolos kurasi harus dekat dengan mentornya,” tambahnya.

Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi kegiatan RKB untuk membantu UMKM lebih maju. Hanya saja menurutnya lebih banyak teori yang kurang memberikan banyak wadah untuk pemasaran.

“Sayangnya mereka (mentor) bukan UMKM, jadi mereka nggak merasakan seperti apa jadi UMKM. Mereka bekerja karena arahan dari pusat,”

Caecilia berharap, ke depannya RKB dapat memiliki mentor yang benar-benar praktisi aktif dan menguasai permasalahan UMKM. “Yang bikin tidak nyaman cuma subjektivitas mentor dan kurasi, kok. RKJ itu nyaman sebenarnya,” katanya.

Berhasil Inkubasi Bukan Semata Soal Kuantitas, Tapi *Mindset*

Salah satu pelaku UMKM lain yang bergabung di RKB adalah Essy Masita. Desainer busana ini bergabung di RKB pada awal 2019, setelah mendengar dari temannya bahwa RKB dapat membantu siapa saja yang ingin memajukan sebuah usaha.

“Saya pikir bagus sekali ada program seperti ini, sangat membantu UMKM supaya usahanya lebih fokus dan terarah,” ungkapnya.

UMKM miliknya bergerak di bidang fesyen dengan bahan wastra/kain nusantara, tenun, lurik, dan shibori. Penggunaan detil *hand made* sulam tangan Sashiko menjadi ciri khas produknya.

Dengan label Maharani Persada, Essy membuat produk baju perorangan, *custom*, jumlah terbatas dan eksklusif. Dalam perjalanannya, dia merasa tertantang untuk membuat *second line* yang bisa membuat produk masal dan melayani banyak *customer*. Lahirlah label baru bernama Aluna.

“Produk masal tetapi tetap mempertahankan bahan wastra nusantara dan detil *hand made* dalam setiap koleksinya, jadi walau diproduksi masal tetap eksklusif,” ujarnya.

Awalnya Essy mempunyai 10 orang tim dalam menjalankan usahanya. Ketika lahir *second line* Aluna, dia berbenah untuk

mendapatkan sistem yang baik untuk memasarkan produk masal berbasis *online*. Bersamaan dengan menjalani program BRIncubator, Essy mulai merasa tercerahkan mengembangkan label Aluna ini. Kemudian dia membentuk tim khusus berjumlah lima orang untuk mengelola Aluna.

Essy enggan menyebut perbandingan omzet maupun jumlah produksi masalnya. Dia mengaku tidak ada patokan tetap mengenai jumlahnya, menyesuaikan target berapa yang harus dibuat dan bisa dijual.

Dia menilai program yang berjalan enam bulan dengan bermacam materi untuk menyiapkan peserta supaya bisa lebih memajukan usahanya. Namun ketika program berakhir, hasilnya belum bisa langsung dirasakan atau dilihat secara instan.

“Perlu proses dan waktu untuk bisa menerapkan di usahanya. Bagi saya pribadi, keberhasilan itu adalah ketika bisa mengambil manfaat, menerapkan, membuat keberadaan usaha kita menjadi lebih baik dan tertata daripada sebelumnya. Dan agar kita sebagai owner siap mental, siap berkompetisi untuk memajukan usahanya,” paparnya.

Peran dari RKB BRI membantu para peserta membawa dan mengenalkan produk mereka ke kancah yang lebih luas, termasuk mancanegara melalui program pameran, ekspo, dan lainnya. Sehingga pada akhirnya akan mendongkrak omzet dan daerah pemasarannya. Produk Essy sendiri sudah merambah kota-kota besar di Indonesia, untuk pasar mancanegara di antaranya Brazil, Azerbaijan, Amerika Serikat, Inggris, dan Filipina

“Alhamdulillah, banyak manfaat yang bisa saya ambil, sehingga bisa lebih meningkatkan omzet secara bertahap. Untuk ekspor saya baru dalam jumlah yang sedikit, pesanan per orang. Kalau yang dalam jumlah besar kontainer belum. Masih menggarap pasar dalam negeri yang sebenarnya masih banyak untuk bisa dieksplor,” tuturnya.



Desainer senior Essy Masita saat mengikuti pameran yang digelar Bank BRI. (Essy Masita for Radar Jogja)

Banyak hal yang Essy dapatkan selama menjadi anggota RKB. Sama seperti yang disebutkan Caecilia, dia juga menjalani berbagai pelatihan, kelas materi seputar mengelola sebuah usaha yang baik dan benar.

Selain mengikuti program pembinaan di RKB, Essy juga mengikuti BRIncubator, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik kedua. Program lanjutan ini berupa inkubasi UMKM dengan pendampingan yang lebih intens.

“Waktu saya mendapat info bahwa BRI akan mengadakan program BRIncubator, saya *excited*, saya berharap program ini akan lebih mengembangkan diri saya dan usaha saya,” kata dia.

Essy menuturkan, proses mengikuti inkubasi ini dimulai dari kurasi produk. Di tahap ini dia lolos dan masuk sebagai salah satu pesertanya. Fasilitas yang dia dapatkan selama enam

bulan masa inkubasi di antaranya pelatihan-pelatihan, fasilitas pameran satu kali, dan pertemuan intens dengan mentor.

“Ibaratnya saya siap mengosongkan gelas untuk menerima semua masukan, arahan, bimbingan guna membenahi usaha saya,” ujarnya optimistis.

Essy menegaskan program BRIncubator tidak terkait dengan kredit lunak dari bank atau berbeda dari KUR.

“Berbeda ketika kita ingin menjadi mitra binaan dari BRI, tentu akan ada ikatan pinjaman dari BRI ke mitra binaannya. Yang tentu besaran jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing UMKM,” katanya.

Materi yang diberikan mentor di antaranya pengelolaan keuangan untuk UMKM, serba serbi pemasaran daring atau *online marketing*, dan sebagainya. Satu materi yang sangat penting bagi Essy adalah mengenai mentalitas sebagai pemilik usaha.

Essy menganut prinsip bahwa sebuah usaha tidak bisa dijalankan seorang diri. Dari mulai urusan desain, produksi sampai pemasaran. Jika semua masih dipegang sendiri, lanjut dia, maka bersiap kehabisan nafas dan berakhir.

Menurutnya, dengan mendistribusikan pekerjaan pada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan, *owner* akan memiliki waktu untuk bergerak dan lebih memajukan usaha. Artinya, Essy lebih leluasa mengikuti program RKB sementara produksinya dijalankan oleh timnya.

“Betul, tentu sebagai *owner* lebih bisa leluasa untuk bergerak,” ujarnya.

Essy menambahkan, kesiapan mental dari masing-masing individu atas keinginan untuk maju dan bergerak semestinya

datang dari diri sendiri, bukan karena paksaan atau tuntutan. Karena dapat berpengaruh terhadap komitmen peserta untuk bisa konsisten menjalani program BRIncubator.

Dia merasa tidak ada prosesur yang memberatkan atau merepotkannya selama mengikuti program. Menurutnya, jika memang ingin usahanya maju, semua menjadi tantangan yang harus dilakukan dan diwujudkan.

Kendati demikian, Essy mengakui tidak semua materi-materi yang disampaikan di forum bisa diterapkan di lingkup UMKM. Ada beberapa kondisi yang menjadi penyebabnya.

Menurut dia, antar-UMKM maupun mentor memiliki latar belakang dan pendidikan yang berbeda. Hal tersebut berpengaruh terhadap pemahaman dan cara pandang. Jika sang mentor terbiasa menghadapi pengusaha yang memiliki strata tinggi, materinya akan sulit diterima para UMKM yang baru belajar atau baru menjalani bisnisnya.

“Mungkin semestinya ada pemisahan antara pelaku UMKM yang baru dengan yang sudah berjalan lancar, yang *scoope*-nya masih lokal dengan yang sudah kelas ekspor. Kebutuhannya pastilah berbeda,” tuturnya.

Terkait adanya mentor yang bukan praktisi, Essy mengaku tidak masalah. Dia memilah ilmu apa yang bisa diterapkan untuk kondisi usahanya, sedangkan yang tidak bisa, tidak perlu diterapkan. Di sisi lain ada juga yang mendapat mentor pembimbing yang tidak sesuai dengan bidang usaha UMKM. Essy menilai kondisi seperti ini pendampingan tidak maksimal.

“Dari pemikiran saya, dengan selesainya program Inkubasi, tentu akan ada evaluasi, bahwa sebenarnya materi apa yang benar-benar dibutuhkan bagi UMKM, sesuai kapasitasnya. Jadi lebih tepat guna dan tepat sasaran,” tuturnya.

Menurut Essy, ilmu dan wawasan dari mentor RKB akan berpengaruh jika UMKM bisa menerapkan di usahanya untuk bisa lebih berkembang, meningkatkan omzet dan menambah *buyer* atau pelanggan.

“Kembali pada kesiapan masing-masing peserta untuk komitmen mau belajar atau tidak. Misal, diminta oleh mentor untuk pertemuan rutin saja susah, yang sibuk A, sibuk B, repot ini itu. Tentu mentor tidak bisa memaksa semua peserta untuk bisa disiplin. Kembali lagi pada kesiapan mental masing-masing, golnya apa untuk ikut inkubasi, bisakah terus menjaga komitmennya,” bebernya.

Naik Kelas Hingga Bisa Ekspor

Mengutip *Sustainability Report 2019* BRI, dari pendanaan Program Indonesia Sejahtera pada tahun 2019 yang totalnya mencapai Rp 31,34 miliar, beberapa bantuan yang diberikan melalui program ini juga digunakan untuk program pelatihan Pengusaha UMKM dan pelatihan UMKM di Rumah Kreatif BUMN (RKB). Terdapat 54 RKB di seluruh Indonesia dengan lebih dari 306 ribu UMKM anggota.

Sejak 2017 hingga 2019, tercatat sudah 43.713 UMKM yang terdaftar di RKB BRI Jogja, dengan kunjungan aktif anggota 700 sampai 1.000 UMKM. Sebanyak 596 agenda pelatihan telah terlaksana hingga Desember 2019.

Pelatihan UMKM untuk naik kelas digelar di 54 RKB di Indonesia dalam konsep Go Modern, Go Digital, Go Online dan Go Global. Pelatihan Go Modern untuk peningkatan kualitas produk, *branding*, *packaging*, dan manajemen keuangan. Pelatihan Go Digital terkait penggunaan aplikasi digital dan otomasi proses bisnis dan pemasaran. Untuk Go Online, yakni perluasan akses pasar secara online, termasuk situs Blanja.com dan Indonesia Mall. Sedangkan Go Global, dilakukan untuk membantu UMKM menjangkau pasar ekspor termasuk *international marketplace*.

Pemimpin Cabang BRI Jogjakarta-Cik Ditiro, Teguh Aribowo mengklaim semua UMKM yang bergabung ke RKB telah mencapai Go Modern, Go Digital, dan Go Online. Sedangkan Go Global baru tercatat 63 UMKM. Karena masih banyak UMKM yang belum memiliki standar ekspor.

“Jadi yang bergabung ke kami sudah pasti dilatih untuk *packaging* lebih bagus, memiliki website atau toko *online*, bisa mengakses pasar yang lebih luas lagi tidak hanya di Jogja saja. Yang Go global itu memang tidak semua karena ada seleksi kualitas produk, yang memenuhi standar internasional,” paparnya.

Berkaitan dengan anggaran yang diberikan dari Kantor Pusat BRI, penggunaannya disesuaikan kebutuhan RKB di masing-masing daerah. Di RKB Jogja sendiri, kata Teguh, ada anggaran inkubasi, pelatihan, pendampingan, operasional dan lain lain. Dalam satu tahun anggaran tersebut sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1 Miliar.

“Itu untuk pelatihan dan operasional harian fasilitas RKB, penelitian dan sebagainya. Kalau sampai biaya pameran dan sebagainya itu besar sekali tapi tidak di kami pengelolanya, tapi dari pusat untuk nasional,” terangnya.



BERBAGI ILMU: Suasana kelas pelatihan di RKB Jogja. (RKB Jogja for Radar Jogja)

Teguh menilai aktivitas dan program di RKB Jogja sudah cukup optimal. Terlebih RKB Jogja sering dikunjungi instansi-instansi hingga kementerian, sehingga produk UMKM di sana mendapatkan ruang untuk diketahui oleh pihak-pihak pemangku kebijakan. Namun, menurutnya keaktifan kunjungan RKB masih dapat dioptimalkan lebih jauh lagi. Pihaknya terus mencoba mengajak instansi pemerintah, Dinas Koperasi, perguruan tinggi dan sebagainya untuk bersinergi memanfaatkan RKB.

“Untuk 2020 ini akan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam program *entrepreneurship*, mengajak belajar di RKB. Sehingga akan ada calon *entrepreneur* muda yang lahir dari mahasiswa. Sedang kami rancang detailnya dengan beberapa rektor kampus, mudah-mudahan setelah pandemi Covid 19 selesai bisa dimulai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Teguh menyebut setiap UMKM yang mengikuti pelatihan di RKB sudah menjadi bagian dari proses inkubasi. Sebagai embrio UMKM yang bisa *survive* di tingkatan lebih tinggi. Kemudian ada inkubasi lanjutan melalui kurasi yang disebut BRIncubator. “RKB ini didesain bagian dari inkubasi. Nanti ada inkubasi yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.

BRIncubator atau inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang baru diinisiasi pada 2018 ini berorientasi pada pemberian akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas. Serta kapabilitas UMKM secara digital dan mampu memenuhi persyaratan ekspor. BRIncubator diselenggarakan di kota Jakarta, Sidoarjo, Jogjakarta, Semarang, dan Denpasar untuk meningkatkan kapabilitas 50 hingga 100 UMKM di masing-masing kota.

Manajer RKB Jogja Alfian Krisna menyebutkan, semua bidang UMKM di Jogjakarta bisa bergabung di RKB. Mulai dari fesyen, kerajinan atau *craft*, kuliner, maupun jasa. Tidak harus sebagai mitra binaan atau nasabah BRI. Alfian menyebutkan pelatihan yang dilakukan di RKB bersifat kontinyu atau berkelanjutan. Melalui tahap lanjutan peserta bisa mengikuti program inkubasi BRIncubator.

Disebutkan ada lima orang mentor untuk memberikan pelatihan reguler. Sedangkan untuk mentor BRIncubator ada 10 orang dengan 50 peserta UMKM di bidang *craft*, fesyen, dan kuliner. Tiap satu mentor mendampingi lima UMKM peserta BRIncubator. Alfian mengakui kendala saat ini adalah banyaknya sektor UMKM yang membuat pihaknya susah untuk mendampingi secara detil per UMKM.

Melihat dua kondisi yang dicontohkan kedua anggota RKB di atas, Alfian menyadari adanya *gap* antara UMKM yang telah memiliki tim dan yang berjalan perorangan. Menurut dia hal tersebut bukanlah masalah besar. Kembali ke kebutuhan masing-masing bidang UMKM. Untuk segmen yang memang membutuhkan produksi banyak, lanjut dia, otomatis sangat membutuhkan banyak tim. Namun untuk yang bergerak di bidang jasa, tidak perlu dikerjakan bersama banyak orang.

“Contoh seorang desainer atau bergerak di desain produk, ya pasti dikerjakan dengan tim yang tidak perlu banyak. Yang jelas, secara global, berbicara masalah kuantitas pasti membutuhkan banyak tim,” ungkapnya.

“Dalam proses pendampingan jika kami melihat kelas UMKM tersebut sudah memerlukan kuantitas yang banyak, terutama yang sudah bisa ekspor, pasti kami arahkan untuk membentuk tim yang lebih banyak juga,” sambungnya.

Dia menilai masa program reguler maupun inkubasi selama 6 bulan udah cukup ideal. Asalkan dari UMKM sendiri juga bisa aktif mengikuti program yang sudah dibuat.

“Karena pada kenyataannya, ada beberapa UMKM yang punya banyak kesibukan dan bahkan belum bisa fokus pada bisnisnya sendiri,” keluhnya.

Evaluasi, Ada yang Baru di 2019

Alfian menuturkan, medio 2017 hingga 2018 BRI menunjuk vendor atau pihak ketiga dalam pengelolaan RKB. Akan tetapi melalui banyak pertimbangan dan evaluasi, akhirnya diputuskan untuk dikelola sendiri tanpa pihak ketiga pada tahun 2019 sampai sekarang.

Dari hasil evaluasi, dibuat pula aplikasi UMKM SMART diluncurkan saat HUT BRI ke-124 pada 16 Desember 2019 lalu. Aplikasi UMKM Smart yang bisa diunduh di *smartphone*. Dari aplikasi tersebut para pelaku UMKM bisa memamerkan bisnis dan produk mereka yang bisa dilihat oleh peserta lainnya dari seluruh Indonesia. Mereka juga dapat mencatat keuangan, mengikuti pelatihan secara *online* dari RKB BRI di seluruh Indonesia, serta mengetahui agenda maupun pameran-pameran yang akan diikuti oleh BRI.

“UMKM tidak ditarget, solusinya kami buat aplikasi UMKM SMART, jadi mengurangi *wira-wiri* ke RKB, tapi bisa belajar ikut pelatihan secara *online*,” ujarnya.

Alfian memastikan semua UMKM anggota binaan RKB akan dibantu permodalannya jika membutuhkan. Bahkan BRI juga memiliki program yang tidak hanya ke pengusaha Mikro, tapi juga Ultra Mikro. Skalanya lebih kecil dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain program-program peningkatan kualitas, RKB juga menyediakan toko untuk *display* produk-produk UMKM untuk meningkatkan pemasarannya, Co Working Space gratis, Junio Cafe untuk membentuk komunitas-komunitas milenial, hingga pameran.

“Kami sering mengajak anggota binaan kami untuk pameran di event-event baik dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.

Pameran terbarunya bertajuk BRILianpreneur yang digelar di JCC Jakarta pada Desember 2019 lalu. BRI menghadirkan calon *buyer* dari 80 negara yang dipertemukan dengan para UMKM untuk melakukan *bussines matching*.

Kendati demikian, Alfian mengaku belum ada parameter yang lebih detil dari sistem untuk mengetahui UMKM yang telah berhasil Go Modern, Go Digital, dan Go Online. Sehingga belum diketahui secara pasti jumlah UMKM anggota RKB yang benar-benar telah menjalankannya.

Belum Tertib Administrasi, Belum Sadar Online

Dalam program BRIncubator, mulai tahun 2019 BRI menggandeng mitra dari Global Entrepreneur Professions (Genpro) sebagai mentor. Genpro adalah sebuah komunitas pengusaha dari semua jenis usaha dan berjejaring di Indonesia. Mentor bisnis Genpro adalah praktisi usaha dengan latar belakang UMKM juga. Mereka telah melewati masa *start up* dan *skill up*, memiliki sertifikasi sebagai pendamping UMKM di bawahnya.

Koordinator Genpro untuk mentor inkubasi RKB Jogja Ahmad Nur Umam menjelaskan, masalah yang dihadapi para UMKM umumnya tentang pemasaran, manajemen, permodalan, hingga pengelolaan SDM.

Selama program inkubasi pada akhir Juli hingga Desember 2019, ditemukan masih banyak UMKM yang belum tertib dalam administrasi, pemahaman terhadap manajemen keuangan kurang, dan masih banyak yang belum sadar *online*, padahal pasar terbuka luas di sana. "Administrasinya ya, bukan soal omzet atau apa, karena tidak ada pencatatan secara tertib," ujarnya menekankan.

Menurut Umam, hal tersebut terjadi karena kebanyakan UMKM masih dikerjakan sendiri, belum punya karyawan yang khusus menangani pembukuannya. Secara otomatis mengganggu produktifitas.

“Ya yang bagus-bagus memang kelihatan sudah punya tim. Yang kesulitan yang baru dikerjakan sendiri, dengan pasangan. Punya satu atau dua karyawan pun biasanya yang jadi marketing atau *customer service*,” jelasnya.



Peserta BRIncubator saat berdiskusi dengan mentor. (Ahmad Nur Umam for Radar Jogja)

Memangnya, sepenting dan seberpengaruh apa tertib administrasi bagi UMKM? Umam mengatakan, UMKM yang sudah punya pencatatan yang jelas merasakan betul manfaatnya.

Laporan mengenai omzet bulanan, pemasukan, pengeluaran, dan lainnya lebih mudah dianalisis. Terlebih bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan dari bank, tertib administrasi menjadi syaratnya.

Kendala lainnya, beberapa peserta inkubasi tidak memanfaatkan waktu enam bulan dengan optimal. Misalnya, tatap muka langsung secara formal hanya sekitar tiga bulan. Sisanya, bisa membuat janji pertemuan sendiri dengan mentor.

“Nah, ini tidak banyak yang memanfaatkan. Banyak yang menunggu mentornya yang aktif. Oleh karena itu mentor tidak sekadar *ngajari*, kadang kami harus *menggeret*, kadang *ndorong*,” ujarnya.

Menurut Umam, bagi beberapa orang yang ingin membesarkan usahanya, sebaiknya ada intervensi dari orang yang sudah sukses menjalankan. Sosok seperti itu dibutuhkan dalam ekosistem UMKM, selain komunitas dan lembaga keuangan.

Hindari Mafia UMKM

Sejatinya, tidak ada batasan pencapaian yang telah diraih suatu UMKM untuk bisa mengikuti pelatihan maupun inkubasi. “*Nggak* ada batasan yang beromzet berapa. Yang memilih BRI, kami terimanya dari BRI. Idealnya menurut saya, BRI punya kriteria dan kuota, kami juga,” kata Umam.

Mantan anggota Komisi B DPRD Kota Jogja ini menyarankan, agar pelaku UMKM yang dipilih untuk inkubasi adalah orang yang benar-benar punya potensi dan ambisi. Jangan sampai ada kecurangan yang menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial antarUMKM.

“Ini juga menjadi *rasan-rasan* mentor Genpro maupun mentor dari pemerintah, ada UMKM yang bahasa kami itu menyebutnya mafia UMKM,” ujarnya.

“Misalnya dia dibina BRI, nanti dia ikut BUMN lain, dia ikut lagi, karena yang dituju adalah modal kerja, pameran gratis dan sebagainya, ada yang seperti itu,” lanjutnya.

Umam juga menyinggung soal sistem keikutsertaan dalam pameran. Dia mencontohkan, misalnya jika pernah pameran di tingkat kecamatan, suatu UMKM harus bisa maju ke pameran yang lebih tinggi, setingkat *event* Sekaten misalnya. Kemudian naik lagi di tingkat provinsi dalam pameran unggulan daerah, dan seterusnya. “Kalau sudah ikut beberapa kali harus naik. Jangan berkali-kali itu-itu terus, biar diisi UMKM yang lain, gantian sama yang lain,” ujarnya.

Kalau perlu, lanjut Umam, memilih UMKM yang belum pernah

dibina BUMN mana pun. Tujuannya agar evaluasinya lebih objektif dan terlihat bedanya sebelum ikut program dan setelah ikut program. “Ya meskipun ini juga tidak mudah,” tandasnya. (tif)

*Karya telah tayang di radarjogja.jawapos.com (Radar Jogja),
17 April 2020*



**Marshal
Datundugon**

SKH Posko Manado
dan Zonautara.com

Lahir di Kopandakan, 17 Maret 1985.
Saat ini ia bekerja sebagai jurnalis di
SKH Posko Manado dan Kontributor
di Zonautara.com.

RESTORASI MANGROVE YANG SETENGAH HATI DI TELUK LABUAN UKI (I)

Marshal Datundugon - 27 April 2020

PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu berniat merestorasi lahan mangrove yang rusak di Desa Baturapa Satu, Lolak, Bolaang Mongondouw. Belakangan diketahui lahan itu bermasalah dan bibit tak sesuai dengan yang dilaporkan.



Foto: Zonautara.com

CSR PT PLN di lahan bermasalah di Desa Baturapa Satu, Bolmong

Sambil menenteng pancing tradisional yang terbuat dari bambu, Johans Masabare serius mencari ikan berukuran kecil di sela-sela akar bakau untuk dijadikan umpan. Anjing peliharaannya mengekor seakan mengerti apa yang sedang dilakukan tuannya.

Beberapa ekor ikan kecil yang ia tangkap, dimasukkan ke dalam botol minuman kemasan bekas yang terikat di pinggangnya menggunakan tali rafia.

Pria berusia 45 tahun itu adalah warga Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tradisional di Teluk Labuan Uki. Dengan segala keterbatasan, mulai dari peralatan tangkap seadanya, hingga umpan yang digunakan, Johans menghidupi keluarganya.

Cuaca cerah saat itu, awal April 2020. Matahari hampir selurus dengan ubun-ubun, bersinar dengan teriknya. Sengatannya mampu membuat seluruh tubuh bermandi peluh. Pohon-pohon bakau atau mangrove yang kiranya menjadi peneduh tak lagi rapat.

Johans kenal betul. Dulunya, tanaman mangrove di pesisir Baturapa tumbuh lebat. Pohonnya besar-besar lengkap dengan dedaunan rimbun yang menutup cela langit. Kondisi itu membuat berbagai hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, siput dan lain-lain mudah dijumpai. Ya, mangrove memang habitat penting bagi biota laut.

Berbeda dengan kondisi saat ini, apa yang dia pernah lihat dulu tak lagi sama. Itu lantaran, sebagian besar tempat hewan laut berkembang biak tidak ada lagi. "Kayu-kayu besar habis ditebang. Yang tersisa hanya yang ukuran-ukuran kecil saja," tutur Johans.

Pria yang juga menjabat kepala dusun 2, Desa Baturapa Satu itu,

merupakan salah satu dari sebagian besar warga Baturapa Satu yang biasa mencari ikan di kawasan hutan bakau. Sebagian hasil pancingan ia jual. Tentunya, sebagian ia bawa pulang ke rumah.



Johans Masabare, 45 tahun, nelayan di desa Baturapa Satu. (Foto: Marshal D.)

Masih teringat jelas di ingatan Johans. Dulu, ada kapal perusahaan pengolahan ikan kaleng masuk ke wilayah perairan Teluk Labuan Uki. Tapi, sepertinya itu hanya kedok. Tak ayal ribuan pohon mangrove dibabat. Kemudian diangkut ke kapal. “Sekitar lima hektar yang dibabat. Entah dibawa ke mana. Kami warga di sini tidak tahu persis,” katanya.

Dugaan perusakan dan eksploitasi tanaman mangrove sebenarnya tak hanya dilakukan perusahaan pengolahan ikan kaleng itu. Berbagai macam aktivitas pembabatan hutan mangrove kerap dilakukan tanpa pencegahan. “Saya masih ingat persis. Saat itu saya masih anak-anak. Saya selalu ikut ayah ke kebun melewati kawasan itu,” cerita Johans.

Kisah kegelisahan yang sama juga datang dari Agustinus Budiman (51). Pria yang akrab disapa Om Deka itu, bahkan mengaku menyaksikan langsung bagaimana benteng utama yang memproteksi kawasan pesisir Baturapa itu dirusak. “Dari dulu, jalur ini memang menjadi akses kami menuju ke laut untuk memancing. Saat lewat, mereka sementara melakukan pembabatan. Jadi saya tahu persis,” ungkapnya.

Seperti Johans, Om Deka juga nelayan. Ia punya perahu katinting bantuan dari pemerintah sekitar tahun 2006 silam. Hanya saja, tak seperti nelayan lain yang sepenuhnya menggantungkan nasib dari melaut, cuaca adalah tolok ukur sakral baginya. Kalau cuaca tak memungkinkan, ia akan lebih memilih bercocok tanam. Kebun yang ia garap tak sampai satu kilometer dari kawasan hutan mangrove. Sehingga melaut atau berkebun, jika bersinggungan dengan mangrove, baginya sama saja. Dia selalu berpapasan dengan keadaan yang tidak begitu baik untuk mangrove bisa berumur panjang.

Dirinya bercerita, selain perusahaan pengolahan ikan kaleng, pembabatan mangrove juga dilakukan pengusaha besar di kecamatan Lolak. Dia menyebut nama Tenges Tuera. Warga tentu keberatan, termasuk dirinya. Tapi, tak berani melayangkan protes lantaran takut. “Siapa yang berani berhadapan dengan orang berduit seperti itu. Apalagi kami di sini saat itu masih sangat awam soal dasar hukum perlindungan mangrove.”

Sebagai pengusaha yang terbilang besar dan cukup ternama di Kecamatan Lolak, Tenges Tuera yang dimaksud Deka, memang memiliki lahan perkebunan kelapa yang sangat luas di kawasan itu. Lahan tersebut, menurut Deka, berbatasan langsung dengan kawasan hutan mangrove, “Tapi, setahu kami itu (mangrove) tidak masuk. Tiba-tiba diklaim. Bahkan katanya sudah ada sertifikat.”



Agustinus Budiman, 51 tahun, nelayan di desa Baturapa Satu. (Foto: Marshal D.)

Sangadi (kepala desa) Baturapa Satu, Yolanda Kalimbe mengaku kaget saat mendengar kabar soal permasalahan kawasan mangrove di desa itu. Maklum, salah satu Sangadi perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) itu baru menjabat sekitar empat Bulan. Ia dilantik bersama 104 sangadi terpilih lainnya pada Desember 2019 lalu.

Selain peningkatan sumber daya manusia, salah satu poin unggulan dalam visi misinya saat mencalonkan diri sebagai sangadi adalah menjadikan Desa Baturapa Satu sebagai kawasan ekowisata mangrove.

“Baru belakangan saya tahu bahwa kawasan mangrove di sini ternyata bermasalah. Bahkan ada papan pelarangan adanya aktivitas di situ. Saya sudah tanyakan ke beberapa aparat desa, tapi mereka juga mengaku tidak tahu menahu soal itu,” kata Yolanda.

Selama ini, ia beranggapan bahwa kawasan mangrove itu dilindungi. Apalagi bagi masyarakat pesisir, mangrove itu penting. Selain dari sisi manfaat secara ekonomi, juga sebagai benteng ketika terjadi bencana di laut.

“Makanya, saya bercita-cita memanfaatkan hutan mangrove yang ada di sini untuk dijadikan kawasan ekowisata. Dengan begitu, secara otomatis habitat mangrove akan lebih terjaga dan terpelihara dengan baik,” sahutnya.

Sebagai Kepala Desa, Yolanda bertekad, mendalami kembali terkait status lahan tersebut. Termasuk asal usul lahan. Jika memungkinkan, pemerintah desa akan mengambil alih kembali lahan itu. “Iya, saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah,” tandasnya.

“Kami mendukung jika ada upaya pemerintah desa untuk kembali memperjuangkan kawasan ini (mangrove),” harap Agustinus mengamini keinginan kepala desanya.



Screen capture dari Google Map, lokasi restorasi mangrove.

* * *

Menjaga ekosistem tanaman mangrove memang merupakan bagian dari strategi mempertahankan garis pantai. Apalagi, secara geografis, 57 dari 202 desa dan kelurahan di 15 kecamatan se-Kabupaten Bolmong berada tepat di wilayah pesisir dengan panjang garis pantai 150,79 kilometer.



Lokasi restorasi mangrove, bagian dari CSR PT PLN (Persero) Area Kotamobagu. (Foto: Marshal D.)

Sebagai wilayah pesisir, penting untuk tetap menjaga kawasan hijau sebagai penyangga garis pantai yang rentan terhadap hempasan gelombang. Mangrove yang tumbuh berjajar di sepanjang pesisir mampu menjadi benteng pencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut.

Abrasi merupakan momok yang cukup menakutkan bagi sebagian warga pesisir. Secara ekonomi, mangrove juga merupakan rumah bagi berbagai spesies ikan, kepiting, dan udang yang banyak membawa manfaat bagi masyarakat.

Sayangnya, saat ini sebagian besar hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Bolmong terbilang kritis. Sebut saja, kawasan hutan bakau seluas 92,84 hektar di Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak, seperti yang dikeluhkan Johans dan Agustinus.

Beruntung, sekarang mangrove mulai tumbuh lagi. Berkat peran dari beberapa kader lingkungan yang peduli terhadap ekosistem mangrove. Upaya untuk merestorasi kembali ekosistem mangrove mulai dilakukan. Baik oleh kelompok pemerhati lingkungan, mahasiswa, maupun pihak swasta.

Karya telah tayang di Zonautara.com, 27 April 2020

RESTORASI MANGROVE YANG SETENGAH HATI DI TELUK LABUAN UKI (2)

Marshal Datundugon - 28 April 2020

Tenges Tuera, seorang pengusaha di Lolak mengklaim lahan restorasi mangrove yang didanai dari CSR PT PLN sebagai miliknya. Dia bahkan memasang papan peringatan di antara bibit mangrove yang sudah ditanam.



Hutan mangrove di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/ Marshal D.)

CSR PT PLN di lahan bermasalah di Desa Baturapa Satu, Bolmong

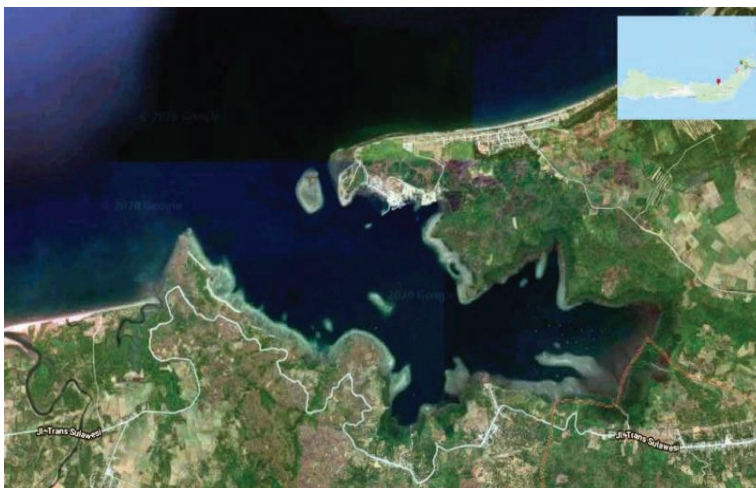
Pada Juli 2019 lalu, dilakukan penanaman seribu pohon bibit mangrove di kawasan restorasi Desa Baturapa Satu. Aksi itu merupakan bagian dari program *corporate social responsibility* (CSR) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PT PLN (Persero) Area Kotamobagu. Pihak PLN berkomitmen tak hanya menanam mangrove tetapi juga memberikan jasa pemeliharaan.

“Kami juga sudah membuatkan gapura pengawasan restorasi hutan mangrove di jalan masuk wilayah ini. Tujuannya agar banyak yang melihat dan ikut tergerak untuk memelihara kawasan ini,” ungkap Manager UP3 PT PLN Area Kotamobagu, Meyrina Turambi saat menyampaikan sambutannya pada acara penanaman bibit waktu itu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang yang turut hadir dalam penanaman mengakui manfaat mangrove sangat besar untuk masyarakat Bolmong terutama yang berada di pesisir pantai. “Mungkin saat ini manfaatnya belum bisa dirasakan. Tapi bagi anak cucu kita nanti, ini akan sangat berguna. Ancaman terbesar di pesisir pantai wilayah Bolmong datang dari laut Pasifik. Daerah Bolmong termasuk wilayah rawan bencana,” kata Tahlis, yang saat itu menyampaikan sambutan atas nama pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolmong memang mencatat, secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, kabupaten Bolmong juga berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik bumi. Wilayah pesisir utara kabupaten Bolmong adalah laut Sulawesi yang juga terdapat sesar aktif.

Ini juga yang menjadi salah satu alasan sehingga PT PLN berkomitmen untuk turut melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta bertujuan mewujudkan *zero waste material* dan memberi kontribusi bagi citra positif PLN.



Teluk Labuan Uki (Dicapture dari Google Map)

Aksi tersebut juga sebagaimana menjadi salah satu poin yang tertuang dalam *sustainability reporting* (SR) atau lebih dikenal dengan laporan berkelanjutan PT PLN (Persero) tahun 2018. Bahkan, untuk mewujudkan itu, Perseroan telah menyusun delapan program utama di bidang lingkungan. Salah satunya adalah penghijauan, yang bertujuan mendukung perbaikan kualitas lingkungan dan mitigasi perubahan iklim terutama di sekitar kegiatan operasi Perseroan.

Program tersebut dinilai sejalan dan mendukung upaya Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Dalam SR PT PLN 2018 itu disebutkan, lokasi penanaman pohon difokuskan pada lokasi masyarakat umum (pesisir laut, sempadan sungai, dan lahan gundul). Pelaksanaan penanaman pohon melibatkan lembaga pendidikan, dinas lingkungan hidup, komunitas peduli lingkungan hidup, dan lain-lain.

Beberapa program pendukung lain juga dilakukan untuk menggenjot capaian penghijauan, antara lain mengimbuai

kepada seluruh unit untuk melakukan gerakan penghijauan di area sekitar unit maupun di area sekitar masyarakat. Keharusan mencantumkan program penghijauan sebagai kriteria penilaian *maturity level* keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) bagi Unit PLN, serta melakukan gerakan sosial dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan gerakan mencegah penebangan pohon secara liar dan pembukaan lahan baru, juga dilakukan.

Total biaya yang digelontorkan PLN untuk kegiatan lingkungan hidup di seluruh wilayah kerja se-Indonesia selama tahun 2018 lalu sebesar Rp336 miliar. Biaya tersebut mencakup kegiatan pembuatan dokumen lingkungan, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.



Papan informasi manfaat mangrove di area restorasi yang terdapat di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/Marshal D)

Di desa Baturapa Satu, PLN menganggarkan dana sebesar Rp 60 juta untuk CSR lingkungan. Alokasinya untuk penanaman bibit mangrove.

Tapi belakangan kegiatan CSR lingkungan PT PLN di Desa Baturapa Satu itu mengundang polemik. Seperti yang terjadi di kawasan restorasi mangrove di desa Baturapa Satu itu. Lahan seluas 18.325 M2 dan 18.327 M2 itu diklaim sebagai milik dari Tenges Tuera yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama Natalia C Tuera, dengan Nomor: 18.05.11.04.1.00200, serta atas nama Dewi Mulia Tuera dengan nomor SHM: 18.05.11.04.1.00202.

Lahan tersebut rencananya akan dialihfungsikan menjadi tambak udang. Di antara bibit-bibit mangrove yang sudah ditanam, terdapat papan peringatan dari pemilik lahan yang melarang aktivitas apa pun di atas lahan itu.

Ketika ditemui di kediamannya di Desa Lolak, Kecamatan Lolak, awal April 2020, Tenges Tuera kembali menegaskan soal kepemilikannya atas lahan tersebut. Bahkan menurut Tenges, dirinya sempat menyatakan protes keras saat acara penanaman bibit lalu. Di tempat itu juga, sembari melarang adanya kegiatan di atas lahan miliknya, Tenges menunjukkan lima buah sertifikat tanah. Masing-masing atas namanya sendiri, nama anak dan ada juga yang atas nama istrinya.

Setelah sempat alot berdiskusi, akhirnya disepakati bahwa kegiatan tersebut hanya penanaman secara simbolis.

“Dengan catatan, setelah itu tidak boleh ada lagi kegiatan dalam bentuk apa pun di lokasi itu. Termasuk perawatan bibit yang ditanam tidak boleh. Kalau ada yang coba-coba maka saya akan usir dari situ. Bahkan bisa saja saya bawa ke ranah hukum,” katanya.

Lahan tersebut menurut dia, merupakan warisan dari orang tuanya dan sudah ada sejak dulu. Memang sempat ada yang mempertanyakan status lahan tersebut. Sehingga dirinya meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit 1 Bolmong dan Bolaang Mongondow Utara di Kotamobagu untuk

menerbitkan surat keterangan bahwa status lahan itu bukan kawasan hutan lindung melainkan areal penggunaan lain (APL).



Hutan mangrove di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/ Marshal D.)

Surat keterangan hasil peninjauan lokasi tanah yang dikeluarkan UPTD KPHP Unit 1 dengan Nomor 522/KPHP.I/13/I/2019 menjadi bukti kuat bagi Tenges. Dalam surat yang diterbitkan 28 Januari 2019, disebutkan bahwa dari hasil *overlay* pada peta lampiran keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.734/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Sulawesi Utara, disimpulkan bahwa tanah tersebut secara administrasi kehutanan terletak pada areal penggunaan lain, atau bukan kawasan hutan.

“Iya betul. Surat itu dikeluarkan oleh KPHP Unit 1 sebelumnya,” kata Kepala UPTD KPHP Unit 1, Usman Buchari, saat dihubungi melalui saluran telepon pada awal April.

Aksi yang dilakukan PT PLN tersebut disambut baik masyarakat Baturapa Satu. Setidaknya, itu juga diakui Agustinus Budiman. Menurutnya, masyarakat setempat sangat bersyukur karena

akhirnya mangrove akan kembali tumbuh lebat di desanya. Sayangnya, lahan itu justru dipermasalahkan. Buntutnya, banyak bibit yang ditanam akhirnya mati.

“Kalau begini kan masyarakat yang lagi-lagi dirugikan. Banyak sekali keuntungan mangrove bagi kami. Apalagi kalau musim angin barat bertiup, itu sangat terasa hingga ke pemukiman warga,” katanya.

Karya telah tayang di Zonautara.com, 28 April 2020

RESTORASI MANGROVE YANG SETENGAH HATI DI TELUK LABUAN UKI (3)

Marshal Datundugon - 29 April 2020

Johans dan Agustinus tak paham siapa yang benar. Saling klaim tak menyelesaikan masalah. Mereka hanya berharap kawasan mangrove di desanya tetap lestari.



Papan informasi manfaat mangrove di area restorasi yang terdapat di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/Marshal D)

CSR PT PLN di lahan bermasalah di Desa Baturapa Satu, Bolmong

Polemik restorasi mangrove di lahan bermasalah itu, kontradiktif dan tidak sejalan dengan poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) sebagaimana tertuang dalam *Sustainability Reporting* (SR) PT PLN (Persero) tahun 2018.

Bisa saja, klaim pencapaian program penghijauan sampai dengan semester 1 tahun 2018 yaitu telah dilaksanakannya penanaman pohon secara serentak oleh 34 unit PLN pada dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2018, dengan target jumlah penanaman pohon sebanyak 34.000 tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Persoalan lain juga timbul setelah itu. Aktivis lingkungan di Bolmong, Sabdar Gobel mengungkap, jumlah bibit mangrove yang ditanam PT PLN tidak sesuai dengan yang dilaporkan saat kegiatan penanaman yakni 1000 pohon, melainkan hanya sekitar 300-an pohon.

Sabdar yang juga ketua komunitas peduli kelestarian lingkungan hidup "Bumi Lestari" itu juga menyorot soal kualitas bibit yang ditanam. Akibatnya, banyak bibit yang mati. Dari informasi yang dia himpun, bibit yang ditanam itu bukan dari hasil pembibitan. Melainkan hanya dicabut dari habitat mangrove di tempat lain.

"Itu merupakan kesalahan besar. Dapat saya pastikan bibit itu tidak akan tumbuh. Fakta di lapangan saat ini, 90-an persen mangrove yang ditanam semuanya mati. Jumlah yang ditanam juga hanya 350 pohon," bebernya.

Ia juga menyayangkan, program CSR PT PLN tidak diserahkan ke kelompok yang betul-betul paham soal mangrove. Harusnya, agar program dapat berjalan sesuai target dan yang diharapkan, maka sebaiknya dikelola oleh orang ataupun komunitas yang bergerak di bidang itu.

“Misalnya mangrove ini. Mulai dari pembibitan kemudian ditanam, juga harus dipelihara dan dirawat. Kalau ada bibit yang mati maka harus ada penyulaman kembali. Sehingga program itu bisa dibilang sukses,” kata Sabdar.



Penggiat lingkungan Bolmong, Sabdar Gobel (54) / Foto: Zonautara.com/ Marshal D.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong, Abdul Latief turut membenarkan soal jumlah bibit yang ditanam. “Iya, itu bukan 1.000 pohon yang ditanam. Hanya 350-an pohon,” kata Abdul Latief saat ditemui di ruang kerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, UP3 PT PLN (Persero) Area Kotamobagu dinilai tidak serius dalam menjalankan program penghijauan lewat CSR-nya guna memenuhi target penanaman pohon. Mulai dari tahap pemilihan lokasi, pemilihan kualitas bibit mangrove dan tidak adanya pemeliharaan pasca tanam yang mengakibatkan sebagian besar bibit mati.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana K3 dan Lingkungan, UP3 PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu, Denny Teremia menyebut

tidak semua unit CSR itu *ter-cover* dalam SR. Melainkan hanya beberapa saja yang menunjang. Untuk kegiatan restorasi di Baturapa Satu, menurut Denny, sudah direncanakan sejak 2018.

“Mulai dari survei lokasi dengan melibatkan pemerhati lingkungan, masyarakat sekitar dan mahasiswa perikanan dan kelautan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado,” kata Denny.

Kegiatan tersebut disetujui pihak manajemen PLN pada tahun 2019. Sehingga akhirnya penanaman pun dilaksanakan. “Tahun ini (2020) kita tinggal memantau perkembangan mangrove yang ditanam itu. Dan semua kegiatan yang kita laksanakan tahun 2019 termasuk CSR sudah kita laporkan ke pusat melalui PLN Wilayah Suluttenggo di Manado,” ungkapnya.



Kantor PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu (Dcapture dari Google Street View)

Kendati tidak semua unit CSR *ter-cover* dalam SR, tapi program penghijauan yang termuat dalam SR itu salah satunya adalah penanaman mangrove. Karena memang salah satu misi PLN menjalankan kegiatan yang berwawasan lingkungan.

“Kami ada target kinerja. Misalnya, wajib melaksanakan kegiatan penghijauan sebanyak sekian pohon untuk tahun ini. Tahun 2019 kami tanam 1.000 pohon di kawasan restorasi Baturapa.

Sebanyak 500 pohon dari PLN Kotamobagu dan 500 pohon dari PLN UP2D Manado. Total anggaran Rp 60 juta,” jelas Denny.

Soal bibit, menurut Denny, pihaknya meminta peran dari warga setempat untuk pengadaan. Ada beberapa juga yang dipesan dari Likupang, Kabupaten Minahasa Utara lewat mitra kerja atau pihak ketiga.

“Intinya, kami dari PLN hanya tahu bibitnya ada. Terserah diambil dari mana. Soal kriteria bibit kita tidak punya syarat khusus. Yang penting tingginya antara 30 hingga 50 centimeter. Karena pada intinya dan yang terpenting adalah perawatan. Kendati bibit kualitas bagus tapi tidak dirawat dengan baik tetap mati. Jadi tergantung pada perawatan,” ujar Denny.

Sementara untuk perawatan, dijelaskan, bahwa itu menjadi tanggung jawab warga setempat. Karena di sisi lain, jika mangrove tumbuh dengan baik maka dampaknya juga ke masyarakat itu sendiri. Termasuk dijadikan objek wisata mangrove. “Kan kami sudah berikan bantuan bibit. Penanaman juga kita fasilitasi. Sehingga kita minta *support* warga untuk menjaga itu. Tapi memang sudah beberapa bulan terakhir kita belum sempat mengecek langsung ke lokasi,” aku Denny.

Kaitan dengan dana CSR, diakuinya bahwa itu dikelola langsung oleh PLN dan tidak diserahkan ke kelompok atau warga karena khawatir tidak tersalur. Dari Rp 60 juta dana yang dikucurkan, sudah termasuk pengadaan bibit, ajir (patok), dan pembuatan gapura di pintu masuk kawasan restorasi.

Yang merekomendasikan lahan di Baturapa itu justru aktivis lingkungan, Sabdar Gobel dan didukung warga setempat. Kemudian PLN melakukan survei. Karena syarat pengusulan dana CSR itu salah satunya lahan harus jelas. “Jadi kami survei. Termasuk wawancara dengan warga. Setelah dianggap memenuhi syarat, kemudian hasil itu kita usulkan ke manajemen. Dan disetujui serta didukung penuh oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” jelas Denny.

Denny terus bercerita. Bahwa selama tahapan itu tidak pernah ada komplain. Tiba-tiba, kata dia, pada saat penanaman diklaim bahwa lahan tersebut milik dari Tenges Tuera. PLN tidak pernah tahu kalau lahan itu bermasalah.



Papan peringatan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di area restorasi mangrove di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/Marshall D)

DLH pun sependapat. Sesuai koordinat, lokasi penanaman itu tidak masuk di kawasan yang diklaim milik Tenges Tuera. Tapi, walaupun memang bermasalah, maka PLN siap menghentikan seluruh kegiatan. Masalah gagal atau tidak, menurut Denny tergantung tingkat keberhasilan bibit yang hidup. Intinya PLN sudah punya itikad baik merestorasi kembali ekosistem mangrove yang sudah kritis.

“Solusi lain, kami akan coba kolaborasi dengan pemilik lahan. Atau, skenario terburuk, PLN akan cari lokasi baru. Intinya, PLN peduli dengan lingkungan yang rusak,” tegas Denny.

Sabdar Gobel membenarkan keterlibatan dirinya saat pemilihan lokasi. Dia pun berdalih, tak tahu bahwa lahan tersebut bermasalah. Sebagai orang yang peduli terhadap kelestarian

lingkungan, ia hanya melihat kondisi hutan bakau di Baturapa yang kritis akibat pembabatan secara besar-besaran sekitar tahun 2005 silam. Sehingga perlu ditanami kembali.

“Dasar itulah sehingga saya anggap perlu dilakukan restorasi kembali. Sebagai penggiat lingkungan saya merasa terpenggil untuk memperbaiki kawasan itu,” ucap Sabdar.

Di sisi lain, terkait persoalan lahan yang bermasalah, dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Ir. Ridwan Lasabuda, M.Si yang melakukan penelitian ekosistem mangrove di kawasan Teluk Labuan Uki yang di dalamnya termasuk kawasan pesisir Desa Baturapa Satu, juga mempertanyakan bagaimana proses sertifikat kepemilikan itu bisa keluar. Sebab menurut Ridwan, dari hasil penelitian, area itu adalah bagian dari ekosistem mangrove.

“Untuk membuktikannya sederhana saja. Tanam bibit mangrove di situ. Jika tumbuh berarti itu memang habitat mangrove,” kata Ridwan, saat ditemui di kampus Unsrat.

Menurut dia, tak apa jika memang ada alih fungsi di zona pemanfaatan. Asal ada upaya konversi di lahan lainnya. Misal, ambil sekian, tanam kembali sekian. Salah satu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dengan mahasiswanya adalah soal valuasi ekologis, yang menghitung nilai mangrove.

“Harus ada nilai ekologis agar saat alih fungsi, konversinya bisa ditetapkan,” sahut Ridwan.

Menetapkan nilai valuasi itu menurut Ridwan tidaklah gampang. Berbagai pihak harus duduk bersama, membahas dan menetapkan standar. Kalau sudah didapat ini akan mudah untuk menilai apakah layak diberikan izin alih fungsi atau tidak.

“Kalau keuntungan dari alih fungsi itu lebih rendah dari nilai valuasi, mending tidak diberikan izin,” ucapnya.



Papan informasi manfaat mangrove di area restorasi yang terdapat di Desa Baturapa, Lolak, Bolmong. (Foto: Zonautara.com/Marshal D)

Ridwan juga mengkritik upaya Pemkab Bolmong yang dinilai belum optimal menangani ancaman rusaknya ekosistem mangrove. Persoalan ini juga sudah dilaporkan pemerhati lingkungan, Sabdar Gobel ke pemerintah Kabupaten Bolmong dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Sayangnya, laporan tertulis yang dilayangkan Sabdar pada 12 Agustus 2019 lalu sama sekali tak direspon. Lagi-lagi, Sabdar menuding Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolmong tak serius menangani ekosistem mangrove.

“Kami akan tindaklanjuti laporan itu. Kami akan panggil semua pihak terkait termasuk pemilih lahan Tenges Tuera. Tapi hingga saat ini kami juga masih sibuk dengan berbagai agenda. Jadi belum sempat. Rencananya dalam waktu dekat,” kata Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief, ketika dikonfirmasi.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow, kawasan hutan bakau di Desa Baturapa Satu itu merupakan bagian dari 51,11 hektare kawasan budidaya.

Tanggapan berbeda datang dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah B3, DLH Kabupaten Bolmong, Deasy Makalalag. Menurut dia, DLH tidak terlibat dalam penentuan lahan restorasi. Yang menentukan, kata dia, adalah pihak PLN dan pemerhati lingkungan. DLH menyayangkan karena PLN seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui DLH dalam hal penentuan lokasi untuk dijadikan kawasan konservasi.

“Termasuk berkoordinasi dengan pihak kehutanan yang notabene paham tentang kawasan-kawasan hutan mangrove (lahan kritis yang perlu dilakukan konservasi),” kata Deasy.

Menurut Deasy, saat itu pihak DLH hanya menerima laporan sekaligus diundang oleh PLN untuk menghadiri acara penanaman 1000 pohon mangrove. Dalam laporannya, PLN mencantumkan titik koordinat lokasi yang akan ditanami.

“Jadi kami minta ahli GIS (*geographic information system*) untuk melihat kembali koordinat. Baik milik Tenges Tuera dan koordinat yang ditentukan PLN. Dan hasilnya memang lokasi keduanya berbeda. Sehingga kami tidak lagi mempersoalkan itu dan penanaman dilaksanakan,” kata Deasy.

* * *

Johans Masabare pulang ke rumah. Dia tak harus mengeluh, meski dia tahu betul bahwa semakin bakau hilang, semakin susah dia mencari ikan. Tapi sebagai warga biasa, dia tak bisa berbuat apa-apa, selain kesungguhan dan niat baik dari semua pihak merestorasi ekosistem mangrove di desanya.

Pun, demikian dengan Agustinus Budiman. Meski saban saat dia melihat ada kerusakan di bentang kawasan pesisir desanya, dia hanya bisa menelan ludah pahit. Bahkan, laporan aktivis lingkungan Sabdar pun tak digubris pemerintah, apalagi keluhannya.

Maka Johans dan Agustinus hanya berharap, niat baik Sangadi mereka menjadikan kawasan mangrove sebagai destinasi ekowisata bisa bersambut gayung dengan kesadaran PT. PLN (Persero) Area Kotamobagu mengevaluasi restorasi setengah hati ini.

Sebagaimana dua nelayan di pesisir Teluk Labuan Uki ini, tentu juga kita semua berharap, apa yang dilakukan oleh PLN tak sekadar memenuhi laporan berkelanjutan perusahaan dalam menerbitkan *Sustainable Reporting*. Pun berharap, klaim Tenges Tuera di lahan itu, bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ini demi mereka, yang menggantungkan hidup dari lestarinya mangrove.

Karya telah tayang di Zonautara.com, 29 April 2020



**Muhammad
Naufal Hafizh**

Ayobandung.com

Lahir di Bandung, 27 April 1995. Saat ini ia bekerja sebagai jurnalis di Ayobandung.com. Ia lulusan Universitas Pendidikan Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

MENDAYAGUNAKAN SAMPAH SEKOLAH

Muhammad Naufal Hafizh - 4 Mei 2020



Tiga siswa SMKN 6 Kota Bandung memanen sosin di kebun sekolah. Mereka menggunakan kompos yang diproduksi sendiri untuk pupuk tanaman tersebut. (Istimewa)

"Kangen berkebun, tapi ya itu tea, ada virus."

Sabtu, 14 Maret 2020, Kota Bandung memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Mencegah penyebaran corona jadi alasan utama. Semua siswa mesti belajar daring. Tak boleh ada pertemuan langsung, termasuk praktik lapangan. Namun bagi siswa yang memiliki program tani di sekolah, setelah sebulan lebih ditinggalkan, apa kabar kebunnya kini?

Muhamad Azmi Azhari (17) termasuk siswa yang memikirkan hal itu. Siswa kelas 11 Jurusan Desain Pemodelan dan Informasi ini terlibat dalam penggarapan kebun sekolah sejak masuk SMKN 6 Bandung.

SMKN 6 Bandung fokus pada teknologi dan rekayasa. Karena itu, kebun, cangkul, pupuk, dan tanah, bukan “mainan utama”. Namun sejumlah siswanya, yang tergabung di divisi lingkungan Rohis, mengaku antusias “menggali” ilmu semasa remaja di kebun sekolah. Divisi itulah yang diketuai Azmi.

Setiap Sabtu, pukul 08.00 WIB, Azmi dan 20 temannya bertemu di salah satu sudut sekolah. Mereka lalu mengelilingi sekolah yang luasnya sekitar 5 hektare. Setiap ada daun gugur dan berserakan, mereka memungutnya. Daun itu dimasukkan ke karung. Setelah seluruhnya terkumpul, biasanya 3-4 karung, dedaunan itu disimpan di Rumah Kompos.

Selain dengan memungut, dedaunan kering itu mereka peroleh dari petugas kebersihan sekolah. Dalam sehari, petugas rata-rata mengumpulkan 15-20 kg daun gugur.

Dedaunan yang terkumpul—dan sudah kering—langsung dicacah. Cacahan daun ini menjadi bahan utama kompos, yang nantinya, menjadi pupuk alami buah tangan siswa untuk kebun sekolah.

Perjalanan pengelolaan sampah organik di SMKN 6 Bandung dimulai sejak 2006, seiring muncul mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Saat itu, salah seorang guru kimia bernama Atiek Kusumayati ditunjuk sebagai guru PLH.

Berbagai program dibuatnya. Salah satunya pengomposan tradisional. Caranya sederhana, cukup mengubur dedaunan kering di sebuah lubang berukuran 1x1x1 meter. Setelah 5-6 pekan, tanah bisa digunakan sebagai media tanam. Meski cara ini mudah, namun prosesnya membutuhkan tenaga lebih dan waktu yang relatif lama.

Atiek mengatakan, pengomposan dilakukan karena sebelumnya sampah organik dan anorganik tidak dipisah. Pengelolaan sampah diserahkan seluruhnya kepada petugas RW tempat sekolah berada. Kendala lain, saat itu, di sekolah tidak ada tempat pemilahan sampah.

Pada 2009, siswa Jurusan Permesinan SMKN 6 Bandung membuat mesin pencacah. Pengomposan tradisional pun beralih ke cara yang lebih modern. Sejak saat itu, sampah daun diolah menggunakan mesin karya siswa.



Mesin pencacah sampah yang dibuat oleh siswa Jurusan Permesinan SMKN 6 Bandung. (Ayobandung.com/M Naufal Hafizh)

Proses pembuatan pupuk organik secara modern ini hanya memakan waktu sepekan. Setelah dedaunan dicacah, hasilnya dicampur *Micro Organisme Lokal* (MOL). MOL terbuat dari nasi basi yang difermentasi dengan larutan gula. Nasi basi itu didapatkan dari bekal siswa yang tidak habis. Satu kepal MOL bisa untuk satu *polybag* cacahan daun. Setelah didiamkan sepekan, kompos siap digunakan.

Pada 2016, SMKN 6 Bandung mendapatkan bantuan Rumah Kompos dari bank bjb. Bentuknya tertutup, tidak semi terbuka. Luasnya lebih kurang 3x5 meter. Di sana, proses pencacahan daun hingga kompos siap pakai disimpan. Namun, kata Azmi, tidak jarang kompos di simpan di luar Rumah Kompos karena kapasitasnya kurang.

Ketika kompos siap dipakai. Azmi mengumpulkan teman-temannya untuk berkebun. Cangkul, bibit, hingga selang disiapkan. Lahan pun digarap. “Kira-kira 2 jam,” kata Azmi, Jumat (18/4/2020).

Ketika sudah selesai, semua anggota mendapatkan jadwal piket harian untuk mengontrol kebun.

Kegiatan itu terus berjalan. Uniknyanya, seluruh pengelolaan memang dilakukan turun-temurun oleh siswa dari ekstrakurikuler keagamaan, Rohis. Bukan ekstrakurikuler pertanian.

Memanen Karya dan Siklus Kendala

Luas kebun SMKN 6 Bandung lebih kurang 500 meter persegi. Lahan itu dibagi beberapa bagian untuk sejumlah tanaman dalam sekali masa tanam.

Azmi dan teman-temannya mengaku bisa panen tiap 6-8 pekan. Di usia muda, dia mengaku beruntung bisa berkebun dan pupuknya dibuat sendiri. “Alhamdulillah (sekolah) punya lahan. Kita dikasih area untuk berkegiatan. Belum tentu siswa sekolah lain bisa,” kata dia.

Panen menjadi masa yang paling ditunggu siswa dari sekian proses yang dijalani. “Seru. Pulang sekolah buka sepatu, *nyeker*, bawa pacul, terus bisa makan bareng. Kami kan dari jurusan yang beda. Jadi pake bajunya juga beragam pas berkebun

dan panen. Kalau udah panen, teman-teman yang gak ikutan (Rohis) juga suka minta. Senang lah bisa bagi-bagi hasil tanam, bisa botram (makan bersama),” kata Dikri (17), siswa Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, yang merupakan anggota bidang lingkungan.

Dikri mengaku bersyukur karena bisa mendapat ilmu baru di luar bidang yang dia geluti. “Beruntung sekali pertama kali berkebun di sekolah. Ya dapat ilmu baru, termasuk bikin kompos,” kata dia.

Sayuran yang ditanam Azmi, Dikri, dan teman-temannya sangat beragam, mulai dari sosin, pakcoy, jagung, terong, singkong, tomat, hingga kacang.

“Tapi yang lebih utama menanam tanaman yang cepat panen,” kata Atiek, yang juga Staf Sarana Lingkungan Hidup yang kerap berkoordinasi dengan Azmi.

Sejauh ini, 30-40 guru rutin membeli hasil panen siswa. Mereka rata-rata memesan 1,5 kg sayuran. Harganya tidak dipatok, seikhlasnya. Uang hasil jualan itu dikelola siswa untuk operasional kebun sekolah selanjutnya.

“Hasil panen dijual ke guru-guru. Ibu-ibu guru juga sudah tahu sayuran organik itu lebih sehat. Kalau beli juga lebih mahal. Dan Alhamdulillah panen anak-anak selalu habis,” ujar Atiek.

Salah seorang guru yang rutin membeli panen siswa adalah Yulis. Hal itu tidak terlepas dari kebanggaannya karena anak didiknya bisa mengolah sampah hingga memiliki nilai guna.

“Bangga bangetlah, anak jurusan teknologi pun kalau ada niat ternyata bisa kok bertani, sampah organik jadi kompos, terus bisa panen,” kata guru bahasa Indonesia itu.

Selain dijual, sayuran itu diolah dan dikonsumsi Azmi bersama

teman-temannya di sekolah. Mereka mengolahnya setelah berkeringat memanen karya. “Sering makan hasil panen sendiri. Nikmat. Biasanya makan di sekre Rohis,” kata Azmi.

“Alhamdulillah selama 2 tahun ini tidak ada yang keracunan,” ujarnya sembari sedikit tertawa.

Namun, selama 2 tahun mengelola sampah organik dan kebun sekolah, Azmi mengaku kerap dihadapkan pada siklus “kendala”. Mulai dari adanya PR, ujian, kegiatan Rohis yang lain, “Hingga regenerasi pengurus jika kami lulus,” ujarnya.

Dikri menambahkan, ada juga anggota Rohis yang aktif saat kelas 10 namun berhenti ketika naik ke kelas 11. Hal itu membuat adanya pergeseran anggota dari divisi lain ke divisi lingkungan.

Selain itu, menurut Atiek, kendala lainnya setiap tahun siswa yang masuk sekolah memiliki minat yang berbeda. Tidak semua siswa tertarik terhadap lingkungan, apalagi tidak ada jurusan pertanian di SMK tersebut.

Yulis menambahkan, tidak sedikit siswa yang mengikuti 2 organisasi selama sekolah. Karena itu, ada salah satu yang dikorbankan. “Kemudian, karena SMK banyak tugas, yang piket tidak *full*. Terus sekarang kendalanya corona,” kata dia.

Mereka pun berharap, pandemi corona ini segera berakhir, siswa kembali bersekolah, berkebun, dan panennya bisa sama-sama dinikmati.

Rumah Kompos

Dalam *Sustainability Report* bank bjb tahun 2016 *Bertumbuh Bersama di Dalam Keberagaman*, dituliskan bahwa kontribusi bank bjb dalam peningkatan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat difokuskan pada 3 sektor: pendidikan, kesehatan,

dan lingkungan hidup.

Di sektor lingkungan hidup dan pendidikan, salah satu program unggulan bank bjb adalah bjb Greenschool. Program bjb Greenschool menekankan pada pengetahuan, tindakan, serta kesadaran siswa tentang lingkungan.

bjb Greenschool meliputi materi dan pembelajaran langsung yang berhubungan dengan alam secara nyata. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami persoalan dan dapat dipraktikkan secara langsung.

Pada tahun 2016, program bjb Greenschool dilaksanakan, salah satunya di SMKN 6 Bandung, dalam bentuk pembangunan Rumah Sampah/Rumah Kompos. Rumah Kompos berfungsi menampung sampah organik untuk diolah menjadi sampah produktif berupa kompos.

Dalam *sustainability report* tersebut disebutkan, keberadaan Rumah Kompos bertujuan menata kebersihan lingkungan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas lingkungan agar lebih bersih, sehat, tertata rapi, dan hijau yang berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan warga SMKN 6 Bandung.

Di sisi lain, Pakar Lingkungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin Supardiono mengatakan, SMKN 6 Bandung sudah memberikan contoh penerapan *urban farming*, yakni memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam di perkotaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, dia menilai harus ada 3 hal yang terus diterapkan.

Pertama, kata Sobirin, siswa di sekolah tidak untuk dididik menjadi petani. "Tapi belajar bagaimana caranya lingkungan itu diperbaiki dan bagaimana cara memanfaatkan lahan."

Kedua, dalam pengelolaan kebun sekolah, siswa harus berpangkal pada budaya, yakni tidak meninggalkan nilai-nilai untuk menghargai alam, merawat alam, dan berterima kasih kepada alam.

Ketiga, setelah berpraktik membuat kompos di sekolah, siswa dan guru harus menyumbangkan pengetahuannya ke lingkungan yang lebih luas. Misalnya kepada tetangga sekolah. “Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk sendiri.”

Selain itu, dia menilai cara pembuatan Rumah Kompos harusnya sesuai dengan sifat kompos itu sendiri. Rumah Kompos harus semi terbuka, bukan tertutup. Hal itu agar kompos tetap mendapat udara dan cahaya, tapi juga terlindungi dari ancaman yang merusaknya. “Kira-kira, mirip seperti kandang sapi,” kata dia.

Kemudian, ruang 3x5 untuk rumah kompos masih kurang. Dia menyarankan agar ukurannya ditambah menjadi 2x8 meter atau yang setara. “Harus ada ruang yang cukup untuk mengaduk kompos. Jadi ada ruang membuat kompos, ruang menyimpan bahan, terus ruang untuk kompos yang jadi untuk dicampur MOL,” ungkapnya. Dengan begitu, kompos tidak rusak.



Tanaman kacang di salah satu sudut kebun sekolah SMKN 6 Bandung pada Jumat (18/4/2020). Setelah diberlakukan kebijakan belajar dari rumah sejak 14 Maret 2020, siswa dilarang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pengelolaan kebun pun akhirnya diserahkan kepada petugas kebersihan. (Ayobandung.com/M Naufal Hafizh)

Kemudian, lanjutnya, di ruangan tersebut mesti ada meja dan kursi untuk pengurus mencatat sehingga administrasi tertata. Dengan begitu, data bisa digunakan untuk pembelajaran dan evaluasi.

Organisasinya pun mesti ditingkatkan meski siswa memiliki tugas lain selain kebun sekolah, tambahna.

Kepala Departemen Antropologi Universitas Padjadjaran Profesor Opan Suhendi Suwartapradja menilai, siswa harusnya diajak mengenali sektor pertanian lebih dalam, seperti karakteristik sayuran yang ditanamnya, perawatannya, hingga kandungan gizi yang ada di dalamnya.

Lalu, siswa harus mengetahui sejauh mana pupuk organik itu berperan terhadap sayuran yang ditanam.

Menurutnya, penggunaan pupuk organik yang dilakukan SMKN 6 Bandung sudah baik karena tidak merusak tanah. "Tidak membuat tanah jadi gersang, tandus, padat, dan tidak membuat tingkat kesuburannya berkurang," tuturnya.

"Kalau sudah punya bekal bertani dengan pupuk organik dan bisa diterapkan setelah lulus, paling kecil dampaknya itu siswa memiliki pengalaman jika suatu saat dia ingin bertani atau berkebun," kata dia.

Di sekolah pun, lanjutnya, siswa bisa diajak untuk edukasi dan latihan transfer ilmu. Transfer ilmu bukan hanya dari pembimbing atau guru kepada siswa, tapi dari siswa kepada siswa, dan sebagainya.

Efeknya, ketika mereka lulus atau sedang praktik kerja lapangan di luar sekolah, ilmu pengelolaan sampah bisa sampai kepada orang lain.

"Kemudian, Guru bisa membuat modul tentang cara, teknik

bercocok tanam, dan membuat kompos. Dalam modul dilengkapi dengan evaluasi berupa pertanyaan,” ujarnya. Dengan begitu, setiap tahun, guru terus menyempurnakan pembelajaran pengelolaan sampah organik.

Rencananya, pada Juli tahun ini, pihak sekolah meluncurkan Ekstrakurikuler pertanian. Jika terlaksana, Azmi, Dikri, dan teman-teman kelas 11 yang akan menginjak kelas 12, mungkin akan lebih lega. Pasalnya, pengelolaan sampah dan kebun lebih optimal.

Di luar itu, dengan masih diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Bandung Raya, Azmi mesti menahan keinginannya melihat dan merawat tanaman yang terakhir dia tanam. Padahal di awal Maret, dia menanam kacang bersama teman-temannya.

Dia pun berharap pandemi segera usai dan berkesempatan berkebun lagi, meski sekali. “Kangen berkebun, tapi ya itu *tea*, ada virus,” ujar Azmi.

“Tapi kemungkinannya kecil bisa berkebun,” tutur Dikri. “Saya pas masuk sekolah langsung PKL satu tahun.”

Karya telah tayang di Ayobandung.com, 4 Mei 2020



Susanti

Katuju.id

Lahir di Samarinda, 05 Oktober 1991. Lulusan dari FKIP Universitas Mulawarman ini bekerja sebagai jurnalis di Katuju.id.

KONTRAKTOR NAKAL, RUGIKAN PEKERJA PT BADAK NGL

Susanti - 1 Mei 2020



Kantor PT Badak NGL, Bontang, Kaltim (istimewa).

Jarum jam dinding telah menunjukkan pukul 05.00 WITA. Rudi (bukan nama sebenarnya), sudah bergegas menuju ke lokasi kerja. Di lokasi PT Badak NGL. Jarak dari rumah ke tempat kerjanya sekitar 20 menit jika ia menggunakan sepeda motornya.

Alat *safety* lengkap mulai dari helm, kacamata hingga sepatu selalu setia menemaninya tiap hari. Sesampainya di lokasi kerja, ia tidak bisa langsung memulai pekerjaan. Harus memeriksa perlengkapan *safety* terlebih dahulu.

Memastikan agar tidak ada yang tertinggal. Hingga, aktivitas selama di lingkungan perusahaan sampai pukul 16.00 WiITA. Saat ini Rudi sudah berusia senja. Sekitar 16 tahun hidupnya dipakai untuk mengabdikan di perusahaan minyak terbesar di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).

Tentu, segala macam suka duka, cerita sedih, bahagia sudah terekam dalam kepala ayah anak tiga ini. “Rencana tahun depan mau pensiun,” katanya saat ditemui Katuju.id, di kediamannya, di Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Minggu (15/3/2020).

Walaupun pemeriksaan *safety* yang begitu ketat. Ada saja kejadian kecelakaan kerja yang sering ia saksikan. Bahkan, pernah terjadi kepada rekan timnya.

“Saat itu teman-teman pada motongi rumput. Tanpa sengaja terpotong paku dan potongnya itu terkena ke mata teman saya yang persis di sebelahnya. Tak lama mengalami perobatan teman saya meninggal dunia,” kenangnya pada peristiwa tahun 2005.

Tidak hanya kejadian tersebut, pernah juga terjadi kebocoran tabung gas. Hingga, membuat rekannya terlempar dengan jarak yang cukup jauh. Dua dari banyak hal yang sering terjadi di lingkungan PT Badak NGL. Manajemen perusahaan pun hanya memberikan kasih. “Sebutnya tali asih bagi keluarga yang ditinggalkan. Hanya itu saja,” ucapnya.

Sebagai mitra PT Badak NGL, ia dan rekan lainnya setiap dua tahun sekali mesti melakukan pembaharuan perjanjian kerja. Tapi, bukan langsung ke PT Badak NGL. Melainkan, kepada perusahaan pihak kedua yang melakukan kerja sama dengan perusahaan BUMN ini.

Dijelaskannya, perusahaan mitra ini tidak memiliki karyawan tetap. Mereka dikontrak perusahaan mitra dan menjadi pekerja alih daya (*outsourcing*) di PT Badak NGL. Perusahaan mitra

sekali melakukan perekrutan bisa mencapai 50 sampai 100 orang dengan berbagai macam pekerjaan, di antaranya engineering sampai *cleaning service*.

Kepada media ini, Rudi membeberkan bahwa surat perjanjian kerja tidak dia terima. Surat perjanjian tersebut dipegang oleh kontraktor tempat ia bekerja, sebagai pihak kedua yang membawanya kerja di PT Badak. “Saya kan di bawah perusahaan kontraktor itu,” ucapnya.

Mengenai tunjangannya sendiri. Dalam *Sustainability Report* (SR) atau Laporan Berkelanjutan 2018, PT Badak NGL menjamin kesejahteraan pekerja alih daya maupun kontrak, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta cuti tahunan.

Sedangkan bagi pekerja tetap mendapat fasilitas yang sama pekerja kontrak, namun ada tambahan tunjangan. Tunjangan tambahan bagi pekerja tetap adalah tunjangan perumahan bagi yang pekerja belum menempati fasilitas perumahan perusahaan, tunjangan pendidikan untuk anak-anak pekerja (maksimum 3 orang), lalu hak cuti kelahiran anak yang diberikan kepada pekerja laki-laki, saat istrinya melahirkan.

Di waktu yang berbeda, salah satu pekerja alih daya PT Badak NGL, Ari (bukan nama sebenarnya) mengeluhkan uang transportasi sudah lama tidak naik. Sekarang masih mengikuti hitungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yaitu premium. Sementara, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bontang sudah sulit menemukan premium. Bensin termurah adalah pertalite, yang selisih lumayan jauh dengan patokan harga premium.

“Selama ini masih premium seharga Rp 6.450 per liter. Kami sudah menghitung-hitung untuk bisa dinaikkan dengan perhitungan pertalite, kami sudah usul dengan beberapa teman dari tim pengupahan, agar menghitung dengan hitungan pertalite,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia juga meminta kebijakan manajemen PT Badak NGL, untuk memberikan bonus produksi kepada mitra. Selama ini, hanya karyawan tetap yang mendapatkan bonus produksi.

“Karena yang berkontribusi dalam produksi juga pekerja alih daya. Tapi dapat bonusnya tidak sebanding saja. Hanya sekedar *reward* pemberian tas seperti *reward safety*. Beda dengan penghargaan soal produksi per setahun sekali, yang kita inginkan dari teman-teman buruh itu soal bonus,” ungkapnya.

Laporan Keberlanjutan 2018 menyebutkan komposisi pekerja PT Badak NGL didominasi oleh pekerja alih daya. Hanya ada 792 pekerja tetap (24,6%), sementara mayoritas sebanyak 2.430 orang adalah pekerja alih daya dan sebagian kecil pekerja kontrak. Upah pokok bagi pekerja baru pada tahun 2018 di PT Badak NGL adalah Rp 4.337.000,00/bulan. Lebih tinggi dari pada Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bontang untuk Jasa Penunjang Migas, yaitu sebesar Rp3.782.500,00 per bulan.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Badak NGL Fajar Gunawan menambahkan, setiap status pekerja, sudah memiliki klausul (kesepakatan) yang menjadi hak dan kewajiban para pekerja. Untuk pekerja alih daya di perusahaan mitra memang menganut sistem kontrak.

“Kalau soal kompensasi, tunjangan, pesangonnya sih nggak perlu dikecewakan. Bisa langsung diklaim, langsung dibayarkan, nggak ada masalah. Mengenai kecelakaan kerja, kalau di area PT Badak, itu mereka akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja,” terang Fajar Gunawan.

Permasalahannya, para kontraktor/perusahaan mitra di PT Badak NGL juga banyak yang bermain curang. BPJS banyak yang belum dibayarkan semua, sehingga terjadi kendala.

“Misalnya saya nih mitra kerja, bekerja terus terjadi kecelakaan, mau masuk rumah sakit kan harus pakai BPJS kan, tapi kalau kontraktornya itu bermain-main BPJS-nya, jadi macet,” bebernya.

Menurutnya, di Laporan Berkelanjutan PT Badak NGL memang disebutkan perusahaan sudah menjamin itu semua. Namun terkadang perusahaan kontraktor/mitra yang lebih sering nakal, dengan menahan dana kompensasi dan tunjangan pekerja. Maka tidak heran jika hak para pekerja tidak terpenuhi seratus persen.

“Ya, namanya juga mereka (kontraktor) ingin mendapatkan keuntungan kan. Makanya, mereka terkadang menahan apa yang sudah menjadi hak para pekerja. Perjanjian Kerja Bersama pun kami tidak dikasih kok,” ungkapinya.

Karena pekerja alih daya tidak memegang surat Perjanjian Kerja Bersama, maka perusahaan kontraktor bisa nakal. Fajar memberi contoh, gaji pekerja paling lambat keluar setiap tanggal 10 setiap bulannya. Tapi ada kontraktor membayar pekerja lewat dari tanggal 10, misal sampai tanggal 15.

“Terkait tanggal pencairan gaji, sebenarnya kan sudah diatur di dalam kontrak. Tapi, karena pekerja alih daya ini tidak mendapatkan kontrak kerja. Jadi, mereka tidak mengetahui. Alhasil, banyak pekerja yang tidak puas, yang disasar ya ke PT Badak,” katanya.

Besarnya gaji pokok, menurut Fajar tidak ada perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja alih daya. Dia mencontohkan dirinya, sebagai *engineering* mendapat gaji antara 9 - 15 juta rupiah. “Tapi, yang membedakan tunjangan saja,” kata Fajar.

Di waktu yang berbeda, Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang Syaifullah menerangkan, keluhan pekerja seperti di atas sering didengarnya. Tapi menurutnya memang pasti ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja alih daya.

“Yah kami mungkin *gini aja*, umpamanya, saya punya toko, terus anak saya yang jaga, pastikan upahnya berbeda dengan saya nyuruh orang lain. Hampir mungkin di seluruh Indonesia

ketika ada pekerja tetap dengan pekerja alih daya itu pasti berbeda kesejahteraannya,” teranginya.

Tapi menurutnya permasalahan yang sering terjadi adalah salah penafsiran mengenai undang-undang tenaga kerja. Maka Dinas Tenaga Kerja menerapkan konsep pembinaan. Tidak hanya terhadap PT Badak NGL, tapi juga perusahaan mitra atau kontraktor

Salah satu contoh pembinaan yang dilakukan adalah ketika Disnaker akan melakukan perumusan upah minimum. Pasti, para perusahaan mitra atau kontraktor ini diikutkan untuk memberi masukan, tata cara dan lainnya. Walaupun mereka tidak ikut berunding.

“Tiap tahun juga kami ada bimtek-bimtek (bimbingan teknis) tentang pengurus SP, bagaimana tata cara menyelesaikan perselisihan dan segala macam. Kita undang mereka semuanya, dan pintu kita terbuka untuk mereka konsultasi setiap saat, 24 jam,” tandasnya.

Sementara itu, Cindy R dari Humas PT Badak NGL mengatakan, hak pekerja yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama serta yang tertulis dalam Laporan Berkelanjutan, sudah dipenuhi. Seperti fasilitas kesehatan, perusahaan menanggung kesehatan satu keluarga pekerja (istri/suami dan anak).

“Kesejahteraan dan kesehatan keduanya menjadi prioritas sesuai dengan aturan. Yang jelas, semua yang tertulis di *Sustainability Report* yang kita telah publikasi. Itu semua sudah kita lakukan. Tidak dilebihkan, bahkan dikurangkan. Karena, itu kan hak mereka,” pungkasnya.

Karya telah tayang di Katuju.id, 1 Mei 2020



**Yulistyne
Kasumaningrum**

Pikiran Rakyat

Lahir di Sangatta, 13 Juli 1982. Saat ini ia bekerja sebagai jurnalis di Pikiran Rakyat. Tyne, panggilan dia, lulus dari Universitas Padjadjaran, Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

TREN 'A-BANK', LAYANAN BANK TANPA KANTOR, MUDAHKAN INKLUSI KEUANGAN

Yulistyne Kasumaningrum - 14 April 2020



Irman, agen *branchless banking* di kios miliknya yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jumat, 2 Februari 2020.* /YULISTYNE/PR

Pagi itu sembari pulang berbelanja dari pasar, Endah (33) menyempatkan diri menyambangi kios bernuansa biru di pinggir Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung.

Sekelebat tampak wajah Muhammad Hoesni Thamrin dari selembur kertas berwarna abu-abu yang ia sodorkan bersama

kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Tak lama berselang, kartu ATM itu kembali ke tangannya bersama secarik kertas struk. “Tadi uang sisa belanja hari ini,” ujar Endah mengawali pembicaraan, Sabtu, 28 Maret 2020.

Ibu rumah tangga itu mengisahkan pendapatan sang suami yang berprofesi sebagai supir di toko tidaklah istimewa. Makanya tak terbersit untuk memiliki rekening tabungan. Selain karena nominal uang yang bisa ditabungkan tak besar, ia pun sungkan jika harus menyambangi gedung bank yang berdiri megah. Meski tak jauh dari kediamannya ada kantor salah satu bank.

Namun, semua berubah sejak pertemuannya dengan Irman (34), salah seorang agen *branchless banking* (BB) atau layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai).

Dikisahkan, kala itu ia sedang menanti sang buah hati pulang dari sekolah. Di sana, Irman yang akrab disapa “a-bank” (baca: abang) menawarkan padanya untuk membuka rekening tabungan di kios miliknya yang berlokasi tak jauh dari sekolah sang anak.

Persyaratannya sangat mudah, hanya menyerahkan KTP, pengisian formulir dibantu, dan ia tak perlu mengantri. “Kalau mau ke bank itu, harus ngantri. Belum lagi kalau kita menabung cuma sedikit malu rasanya. Tapi kalau di kios, uang sisa belanja juga bisa, jajan anak-anak juga bisa. Sekarang anak-anak malah seringnya ingin menabung. Mau Rp 2.000 juga *gapapa*, *ga malu*,”katanya.

Hal senada diungkapkan Dewi Anggraeni (33). Ia yang bekerja sebagai buruh pabrik sepatu di wilayah Bandung Selatan selalu terkendala jam operasional saat ingin membuka rekening tabungan.

Setiap hari ia bekerja hingga pukul 16.30 yang artinya bank sudah menutup jam operasionalnya. Jika ingin membuka rekening maka ia terpaksa harus mengambil cuti kerja.

“Mau ke bank itu susah, tapi untung ada “a-bank” buka rekening mudah, sehari langsung jadi tinggal *ngasihin* KTP, KK. Pagi persyaratan dikasih sore sudah ada,” katanya.

Kios agen yang buka hingga pukul 21.00 pun sangat membantu para buruh pabrik. Karena mereka masih memiliki kesempatan untuk menabung meski hari sudah menjelang malam. Begitu pun jika ia sedang membutuhkan uang secara mendadak, agen dapat melayani kebutuhannya.

“Mudah teh, tidak perlu *ngantri* saat di bank atau di ATM, mau transaksi apa juga bisa di kios *mah* yang pasti orangnya juga *enakeun*, kami suka *diingetin* untuk nabung. Alhamdulillah sedikit sedikit mulai terkumpul,” katanya.

Membangun Kepercayaan

Irman, pria lulusan dari Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran ini menuturkan pada awalnya ia merupakan kios PPOB (*Payment Point Online Bank*) Mandiri pada 2016.

Saat itu ia melayani transaksi pembelian dan pembayaran yang sistemnya berbasis *website*. Saat Bank Mandiri mulai gencar dengan program BB atau laku pandai pada akhir Desember 2018, ia bergabung menjadi agen pada Januari 2019.

Mengawali kiprah sebagai agen, Irman mengaku tak mudah. Ia sering menerima tatapan curiga dari masyarakat. Hal itu menurutnya wajar karena masyarakat masih belum memahami betul praktik dari layanan tersebut. “Dulu saat awal jadi agen

ada nasabah yang sampai foto-foto saya mungkin karena takut kena tipu,” katanya.

Meski demikian, Irman tak patah arang. Ia menyadari keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar kiosnya karena masih banyak yang belum mengenal bank.

Meski lokasi kiosnya berada di pinggiran Bandung dan telah berdiri kantor bank di sana, tidak sedikit masyarakat yang sungkan untuk datang ke bank. Ditambah lagi, jam operasional perbankan yang tidak cocok dengan jadwal buruh pabrik di wilayah tersebut.

“Nasabah saya mayoritas pedagang pasar yang belum kenal bank, buruh pabrik yang hanya punya waktu sabtu-minggu, dan KTP yang berbeda dengan domisili. Kalau posisi bukan di perkotaan, data KTP itu bisa berbeda-beda, ini yang dibantu. Juga ada anak sekolah,” katanya.

Ia pun berinisiatif menjemput bola. Ia gencar mendatangi dan mengedukasi ibu-ibu yang tengah berkumpul menunggu anak pulang sekolah, melakukan pendekatan langsung ke sekolah dan menyambangi pabrik terdekat. Hal itu ia lakukan sepanjang hari untuk membangun relasi dengan masyarakat sekitar.

Hasilnya, seiring waktu, kepercayaan masyarakat terbentuk. Melalui pelayanan paripurna yang ia berikan, masyarakat mulai memercayakan transaksi keuangannya pada kios Irman.

“Pengalaman saya yang paling berkesan selama jadi agen, setiap datang ke tempat berkumpulnya masyarakat baik itu lingkungan sekolah, komplek, atau pabrik mereka selalu menyambut saya dengan baik, dengan adanya agen kata mereka *ga* usah jauh-jauh atau berlama-lama *ngantri* ke bank. Kadang mereka sendiri merasa malu untuk melakukan setoran dengan nominal kecil,

jadi datangnya agen dengan pelayanan *pick up* servis sangat membantu sekali para nasabah," katanya.***

Karya telah tayang di Pikiran Rakyat Online (PikiranRakyat.Com), 14 April 2020

SERING DICURIGAI, IRMAN TAK PATAH ARANG HINGGA JADI AGEN JEMPOLAN BRANCHLESS BANKING

Yulistyne Kasumaningrum - 14 April 2020



Nasabah tengah melakukan transaksi di kiosk agen branchless banking, di Kabupaten Bandung, belum lama ini.* /YULISTYNE KASUMANINGRUM/PR

Irman, pria lulusan dari Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran ini menuturkan pada awalnya ia merupakan kios PPOB (*Payment Point Online Bank*) Mandiri pada 2016.

Saat itu ia melayani transaksi pembelian dan pembayaran yang sistemnya berbasis *website*. Saat Bank Mandiri mulai gencar dengan program BB atau laku pandai pada akhir Desember 2018, ia bergabung menjadi agen *branchless banking*, pada Januari 2019.

Mengawali kiprah sebagai agen, Irman mengaku tak mudah. Ia sering menerima tatapan curiga dari masyarakat. Hal itu menurutnya wajar karena masyarakat masih belum memahami betul praktik dari layanan tersebut. “Dulu saat awal jadi agen ada nasabah yang sampai foto-foto saya mungkin karena takut kena tipu,” katanya.

Meski demikian, Irman tak patah arang. Ia menyadari keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar kiosnya karena masih banyak yang belum mengenal bank.

Meski lokasi kiosnya berada di pinggiran Bandung dan telah berdiri kantor bank di sana, tidak sedikit masyarakat yang sungkan untuk datang ke bank. Ditambah lagi, jam operasional perbankan yang tidak cocok dengan jadwal buruh pabrik di wilayah tersebut.

“Nasabah saya mayoritas pedagang pasar yang belum kenal bank, buruh pabrik yang hanya punya waktu Sabtu-Minggu, dan KTP yang berbeda dengan domisili. Kalau posisi bukan di perkotaan, data KTP itu bisa berbeda-beda, ini yang dibantu. Juga ada anak sekolah,” katanya.

Ia pun berinisiatif menjemput bola. Ia gencar mendatangi dan mengedukasi ibu-ibu yang tengah berkumpul menunggu anak pulang sekolah, melakukan pendekatan langsung ke sekolah dan menyambangi pabrik terdekat. Hal itu ia lakukan sepanjang hari untuk membangun relasi dengan masyarakat sekitar.

Hasilnya, seiring waktu, kepercayaan masyarakat terbentuk. Melalui pelayanan paripurna yang ia berikan, masyarakat mulai memercayakan transaksi keuangannya pada kios Irman.

“Pengalaman saya yang paling berkesan selama jadi agen, setiap datang ke tempat berkumpulnya masyarakat baik itu lingkungan sekolah, komplek, atau pabrik mereka selalu menyambut saya dengan baik, dengan adanya agen kata mereka *ga* usah jauh-jauh atau berlama-lama ngrantri ke bank. Kadang mereka sendiri merasa malu untuk melakukan setoran dengan nominal kecil, jadi datangnya agen dengan pelayanan *pick up* servis sangat membantu sekali para nasabah,” katanya.

Agen Jempolan

Berjalan satu tahun, rata-rata transaksi yang dicatatkan kios Irman ada di angka 1.600 transaksi per bulan yang menjadikannya salah satu agen jempolan jago 2019 di tanah air. Ia bahkan diganjar *grand prize* satu unit kendaraan bermotor roda dua.

“Sejak SMP saya sering membantu di pasar jadi sudah biasa menghadapi konsumen ibu-ibu. Yang terpenting mereka ingin dihargai dan kami harus mengetahui dulu kebutuhan mereka. Ini gampang-gampang sulit karena tidak semua enak,” katanya.

Dari sisi bisnis, Irman mengakui, pendapatannya sebagai agen *branchless banking* cukup menggiurkan. Ia tak menampik semakin banyak nasabah yang ikut menabung, semakin untung untuk usahanya karena semakin banyak *fee* yang ia peroleh dari transaksi yang terjadi.

Dicontohkan, untuk bisa menjadi agen jempolan, paling tidak ada 100 pembukaan rekening baru per bulan di kiosnya. Dengan *fee* Rp 5.000 per rekening, dari pembukaan rekening ia mendapatkan Rp 500.000.

Belum ditambah dengan *fee* Rp 5.000 untuk setiap transaksi yang dilakukan, seperti tarik, tunai, transfer, atau pembayaran lainnya yang mencapai 1.600 transaksi per bulan.

Namun, pada prakteknya Irman tidak selalu mengenakan biaya pada transaksi yang dilakukan. Untuk transaksi dengan *limit* tertentu, ia tak menarik biaya atau dengan kata lain digratiskan.

Alasannya sederhana, nominal yang ditabungkan atau ditarik tidak seberapa sehingga jika dikenakan biaya tambahan maka jumlahnya akan semakin sedikit.

Hal itu dilakukannya demi membantu mendukung program pemerintah yakni memperkenalkan sistem perbankan kepada masyarakat khususnya yang belum kenal dengan bank. “Uniknya tiap *abis* lebaran bukan saya yang *ngasih* malah saya suka dikasih tambahan pas mereka *narik* uang di agen, ya mungkin budaya mereka *kayak gitu kali yah,*” ujarnya.***

Karya telah tayang di Pikiran Rakyat Online (PikiranRakyat.Com), 14 April 2020

PERJALANAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA SEJAK 2016 HINGGA MENCAKUP KAUM MARGINAL

Yulistyne Kasumaningrum - 14 April 2020



Nasabah tengah melakukan transaksi di kios agen branchless banking, di Kabupaten Bandung, belum lama ini.* /YULISTYNE KASUMANINGRUM/PR

Pada 2016, pemerintah Indonesia menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.

Penetapan strategi ini tentunya tidak terlepas dari masih rendahnya angka inklusi keuangan di tanah air yang baru mencapai 36%.

Sementara berdasarkan literatur, inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian suatu negara dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Mandiri dalam Laporan Berkelanjutan 2018 “Better Future is In Our Hand” untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan telah mengimplementasikan program Laku Pandai secara nasional per tanggal 13 Juli 2016.

Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat *unbanked*, baik di daerah *urban* maupun *rural*.

Di wilayah Jabar tercatat pada 2019 ada 4.500 agen *branchless banking* dengan jumlah nasabah sebanyak 43.157 yang mayoritas merupakan masyarakat *unbanked*. Sebaran para agen ini didominasi di wilayah Kabupaten yang mengambil proporsi 70% dari total jumlah agen.

“Keberadaan agen ini mendorong peningkatan pertumbuhan rekening, penghimpunan dana, dan volume transaksi. Untuk penghimpunan dana mencapai Rp 376 miliar pada akhir Desember 2019 lalu. Untuk selama 2020 kami menargetkan penambahan 3.300 agen dan 79.000 rekening,” ujar Corporate Manager Bank Mandiri Region VI Jabar I Vicki Vigandhi.

Inklusi keuangan di Indonesia diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun. Dari indikator tersebut, inisiatif BB terlihat menunjukkan perkembangan yang positif.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan jumlah agen layanan keuangan tanpa bank ini pada secara nasional mencapai 1,2 juta pada triwulan I-2019 dengan jumlah nasabah 25 juta rekening. Adapun nominal tabungan yang dihimpun Rp 1,7 triliun. Sedangkan di Jabar, tercatat ada 263.138 agen, 5,4 juta nasabah dengan dana yang dihimpun Rp 248 miliar.

Namun demikian, tujuan inklusi keuangan mestinya tidak hanya sampai pada memberikan akses kepada masyarakat agar uangnya aman dan terjamin. Tetapi juga untuk membuka peluang akses lainnya, seperti pembiayaan, asuransi, dan layanan pembayaran (remitansi). Namun sayangnya data belum menunjukkan perubahan berarti untuk akses lainnya, walaupun untuk asuransi masyarakat telah terbantu melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya.

Misalnya, untuk nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan melalui agen ternyata masih minim. Menurut data OJK, di Jabar total nasabah yang mendapatkan pembiayaan melalui agen tersebut baru mencapai 291 debitur.

“Lebih banyak di sisi DPK dibandingkan pembiayaan. Untuk pembiayaan memerlukan kapasitas dan kemampuan untuk melakukan penilaian *repayment capacity*. Tidak mudah, oleh karena itu mesti dibangun dulu kemampuan ini,” kata Kepala Kantor Regional 2 OJK Jabar Triana Gunawan.

Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Kurniawan Saefullah mengatakan prinsip inklusi keuangan adalah agar masyarakat bisa mengakses layanan keuangan formal. Ia menekankan, inklusi keuangan itu bukan hanya tabungan tetapi juga pinjaman. Selain itu, advokasi juga semestinya masuk dalam kegiatan inklusi keuangan agar literasi keuangan masyarakat baik.

Namun, dengan indikator inklusi keuangan yang diukur dari

penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun, menurutnya, menunjukkan bahwa fokus program inklusi keuangan saat ini lebih kepada akumulasi dan distribusi dana. Bukan pada jumlah orang yang ingin dijangkau atau dalam keuangan mikro disebut sebagai aspek *outreach*. Padahal keterjangkauan itulah yang mestinya menjadi fokus dari program inklusi keuangan jika pemerintah bermaksud mendorong pemerataan.

Ia menjelaskan di dalam teori keuangan terdapat istilah jumlah uang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang beredar tidak selalu proporsional dengan jumlah orang yang memilikinya. Sebagai ilustrasi, uang yang beredar misalnya Rp 10 miliar. Dengan jumlah orang 100, bisa jadi Rp 9 miliar hanya dimiliki oleh 10 orang. Jadi ada kecenderungan fokusnya bukan agar akses inklusi keuangan menysasar 100 orangnya tetapi meraih yang Rp 10 miliar.

“Di sini sebenarnya kritik pada inklusi keuangan yang hanya menargetkan pada jumlah rekening. Padahal dalam keuangan mikro, kita ingin juga menysasar yang 90 orang (misalnya dengan penciptaan kredit/pembiayaan) agar kegiatan ekonominya tumbuh. Baru inklusi keuangan bisa dianggap efektif dan adil bagi kelompok marginal,” katanya.

Lebih lanjut Kurniawan menilai, secara umum program inklusi keuangan melalui BB yang dilakukan perbankan tanah air, termasuk Bank Mandiri terus berkembang. Hal itu di antaranya bisa dilihat dari bentuk agen BB yang kini bisa perseorangan dari sebelumnya masih terbatas pada lembaga.

Hanya, ia menyoroti, agar inklusi keuangan yang sebenarnya dapat terwujud maka perbankan harus mulai memberanikan diri untuk tidak hanya fokus dalam meningkatkan jumlah rekening tabungan tetapi juga keterjangkauan pembiayaan.

Ia menyadari hal tersebut tidaklah mudah selain karena ada faktor literasi namun juga ada aspek kultur yang harus dipertimbangkan. Pasalnya, praktik di lapangan masih banyak ditemui masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap layanan perbankan karena terkendala pengetahuan maupun atas dasar pertimbangan-pertimbangan kultural dan pemahaman keagamaan.

Riset Unpad bersama Bank Mandiri yang dilakukan pada 2013/2014, lanjutnya, mengungkap dari 150 sampel di Losari, Karangampel dan Rancaekek, ada persepsi dan tradisi masyarakat yang menjadi faktor penghambat program inklusi keuangan di masyarakat melalui bank.

“Ini bisa jadi dasar mengapa kondisi kultural masyarakat perlu diperhatikan. Maka agar inklusi keuangan bisa efektif dan adil bagi kelompok marginal, perlu dipertimbangkan kultur masyarakat sekitar agar layanan keuangan formal bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Misalnya dengan memahami kebiasaan masyarakat setempat, menggandeng tokoh masyarakat setempat, atau dikolaborasikan dengan tradisi setempat,” katanya. ***

Karya telah tayang di Pikiran Rakyat Online (PikiranRakyat.Com), 14 April 2020



**Zakarias Demon
Daton**

Kompas.com

Saat ini bekerja sebagai jurnalis di Kompas.com. Ia lulusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman.

DUA KAMPUNG DI BONTANG DALAM KEPUNGAN GAS AMONIA

Zakarias Demon Daton - 2 Mei 2020



Tampak dari kejauhan pabrik produksi amonia di Kawasan Industrial Estate (KIE) berbatasan pagar dengan Kelurahan Guntung, Kota Bontang, Kaltim, Minggu (29/3/2020). (KOMPAS.COM/Zakarias Demon Daton)

“Bau amonia pabrik jadi keseharian kami di sini”. Ungkapan itu dilontarkan Anwar Lafang, warga RT 33, Gang Merpati,

Kelurahan Loktuan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, di Pelabuhan Loktuan saat ditemui *Kompas.com*, Minggu (29/3/2020). Di belakang dia, kurang lebih satu kilometer, berdiri pabrik produksi amonia milik empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang. Perusahaan terbesar di kawasan itu adalah PT Pupuk Kaltim, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pabrik itu bersisian dengan Pelabuhan Loktuan dan juga pemukiman padat yang ada di wilayah itu. “Ada rumah berdempetan dengan pagar pembatas pabrik,” kata pria berusia 47 tahun ini sambil menunjuk ke arah pemukiman padat.

Kelurahan Loktuan dan Guntung adalah dua kelurahan di Kecamatan Bontang Utara, yang berbatasan langsung dengan pabrik amonia milik empat perusahaan itu. Mata pencaharian warga di dua kelurahan itu, sebagian nelayan, pegawai, dan pekerja harian lepas industri, pedagang dan lainnya. “Di wilayah Bontang Utara memang penduduknya paling banyak, karena mungkin daerah industri. Termasuk di Loktuan dan Guntung,” ungkap Anwar.

Anwar menetap di lokasi Loktuan sejak 1989, setelah berdiri pabrik 1977. “Rata-rata pabrik berdiri *dulu*,” kata dia. Sejak 1950 awalnya Bontang hanya desa kecil. Kemudian, berubah jadi kecamatan membawa 11 desa pada 1972. Dua tahun kemudian, PT Liquefied Natural Gas (LNG) Badak dan PT Pupuk Kaltim berdiri di Bontang, pada 1974 dan 1977. Kemudian, berlanjut hingga 1984 Bontang menjadi sebuah kecamatan hingga akhirnya menjadi kotamadya pada 2001.

Kawasan Loktuan awalnya ditempati nelayan tradisional, sebelum industri berdiri. Begitu pula dengan di kelurahan Guntung. Ada komunitas masyarakat Kutai sebelum masuk industri. Namun seiring waktu, berdirinya industri, arus migrasi penduduk masuk dan keluar ke daerah ini lumayan tinggi. Data BPS Bontang 2018, misalnya, terdapat 675 orang datang dan 923 keluar dari Loktuan. Sementara di Guntung pada tahun sama terdapat 230 orang datang dan 292 orang keluar.



Kasnowati warga RT 07 Kelurahan Guntung, Bontang, Kalimantan Timur, saat ditemui Kompas.com, Minggu (29/3/2020). (KOMPAS.COM/Zakarias Demon Daton)

Hilir mudik orang ini memicu kepadatan penduduk di dua wilayah tersebut. Loktuan tercatat sebagai penduduk terbanyak di Kecamatan Bontang Utara tahun 2018 yakni 22.794 jiwa tersebar di 52 RT (BPS 2018). Dengan tingkat kepadatan penduduk 6.357 jiwa per kilometer persegi, Loktuan menempati wilayah seluas 3,58 kilometer persegi. Sementara Guntung memiliki tingkat kepadatan penduduk 818 jiwa per kilometer dari total penduduknya sebanyak 8.998 jiwa pada 2018. Jumlah itu tersebar di 25 RT dengan luas wilayah berkisar 8,49 kilometer persegi (BPS 2018). Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara rata-rata sebanyak 2.541 jiwa per kilometer persegi.

Karena dua kelurahan tersebut berdekatan industri, warganya sering menerima dampak bau amonia dari keseluruhan masyarakat Bontang, 181.618 jiwa pada 2019. Jumlah itu tersebar di tiga kecamatan, yakni di Bontang Selatan, 69.063 jiwa atau 38,02 persen, di Bontang Utara, 82.626 jiwa atau 45,50 persen dan di Bontang Barat 29.929 jiwa persen 16,48 persen. "Warga yang berada di dua wilayah itu umumnya ada yang nelayan, karyawan subkontraktor, pekerja industri dan pedagang,"

ungkap Kepala BPS Bontang Srie Sis Sugianto saat dihubungi, Sabtu (25/4/2020).

Tampak dari kejauhan, deretan cerobong pabrik-pabrik di KIE melepas kepulan asap ke udara. “Bau menyengat itu biasanya mengikuti arah angin,” kata Faisal, warga lain di Loktuan kepada Kompas.com. Tak jarang warga Loktuan, kata Faisal sering kena sakit pernapasan. “Jangan jauh-jauh, anak saya dua orang masih kecil sering kena,” ungkap dia.

Rata-rata warga tak tahu persis alasan terjadi bau. Sebagai imbalan, perusahaan memberi tes kesehatan gratis bekerja sama dengan puskesmas setempat. Ada pula bantuan lain dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Lurah Loktuan Muhammad Takwin menganggap wajar bau amonia karena kelurahan yang ia pimpin berada di wilayah pabrik. “Memang bau itu tercium. Tapi tidak setiap hari. Mungkin pada proses tertentu di perusahaan,” kata Lurah.

Beberapa kali dilakukan pertemuan para RT dengan manajemen perusahaan. Pada kesempatan itu perusahaan selalu menjelaskan bau amonia yang terpapar di bawah baku mutu. Artinya tak mengancam kesehatan warga. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang juga melakukan uji kadar kebauan di Loktuan dan Guntung, hasilnya di bawah ambang batas. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, kata Lurah, perusahaan memberikan tes kesehatan gratis rutin setiap bulan.

Setelah dari Kelurahan Loktuan, saya berbalik arah menuju Kelurahan Guntung. Melintasi Jalan Pupuk Raya di pinggiran areal pabrik yang dipagari seng. Dari luar pagar pembatas berjarak kurang lebih satu kilometer meter saya menghitung sekitar tujuh cerobong mengeluarkan asap ditambah satu cerobong api. Kelurahan Loktuan dan Guntung kira-kira berjarak tiga kilometer.

Di Guntung sebelah utara Bontang, saya menemui Kasnawati (50). Warga RT 07 ini juga menuturkan keluhan sama. “Kalau

arah angin ke sini, kami harus menghindar berlawanan biar enggak bau,” ungkap istri Ketua RT 07 ini.

Jika bau terlalu menyengat bisa buat mata perih. Biasanya, Kasnawati bersama anaknya menutup hidung menggunakan kain basa. Ketua RT 08 Kelurahan Guntung, Abidurahman menyampaikan warganya sering mengeluh sakit tenggorokan, batuk dan flu. “Tapi karena keseringan jadi kami terbiasa dengan bau amonia itu. Istri dan anak saya sering kena batuk-batuk, flu, bahkan kulit flek-flek,” kata dia. “Namanya hidup berdampingan dengan perusahaan mau bagaimana lagi,” sambung dia pasrah.

Soal keluhan ini sudah lama disampaikan ke perusahaan maupun pemkot. Tapi, kata Abidurahman, tetap saja warga merasakan bau. Tak jauh dari rumah Abidurahman saya bergeser ke pagar pembatas areal pabrik.

Di sekitar lokasi itu tampak lahan gundul. Menurut warga, lahan itu bekas hutan bakau. Namun dibersihkan perusahaan. “Sejak bakau-bakau itu ditebang, nyaris enggak ada penyaring. Begitu arah angin kesini, bau menyengat sekali,” tutur Abidurahman menunjuk ke lahan gundul.

Di titik yang sama, terdapat drainase ukuran besar menyorok ke arah laut. Di sisi kanan bersisian dengan pabrik terdapat genangan air kekuning-kuningan.

Cerobong pabrik terus melepas kepulan asap ke udara. Kepulan asap itu akan bergerak mengikuti arah angin di langit Bontang. DLH Bontang dan PT Pupuk Kaltim menyebut bau amonia tak berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Awal Februari 2019 DLH menguji sampel udara di dua kelurahan itu menggunakan alat Single Gas Detector (OdaLog Logger) selama satu jam. Hasilnya, tingkat kadar kebauan gas amonia di pemukiman warga di bawah satu ppm. Besaran itu dinilai layak dihirup manusia karena tak melampaui baku mutu.

Keputusan Menteri LH nomor 50/MEN/LH/III/96, batas maksimal paparan kebauan di area pemukiman warga 2,0 ppm selama 24 jam secara terus menerus. Di atas dari itu dianggap mengancam. Sementara, batas maksimal paparan di area kerja 3,25 ppm selama delapan jam sesuai Surat Edaran Menaker Nomor 02/MENAKER/78. Tapi, Anwar, Faisal, Kasnawati, Abidurahman mewakili suara warga di pinggiran pabrik, berharap ada solusi dari pemerintah daerah dan perusahaan agar tak ada lagi bau.

Tabel batas maksimal ppm amonia terhadap dampak kesehatan

Besaran ppm	Dampak terhadap kesehatan
0,5 - 1,0 ppm	Bau mulai tercium
2.2,0 ppm	Batas maximal paparan kebauan di area pemukiman secara terus menerus (24 jam) Kep. Men LH Nomor 50/MEN-LH/II/96
3.25 ppm	Batas maximal paparan di area kerja (8 jam) Surat Edaran Menaker Nomor 02/MENAKER/78.
4.40 ppm	Beberapa orang mungkin akan menderita iritasi ringan.
5.100 ppm	Iritasi pada mata dan rongga hidung setelah beberapa menit terpapar.
6.400 ppm	Iritasi berat pada tenggorikan, rongga hidung dan saluran pernafasan atas.
7.700 ppm	Iritasi berat pada mata.
8.170 ppm	Pemaparan di atas 30 menit korban akan terbatuk-batuk dan berakibat fatal.
9.500 ppm	Korban menderita edema serius, tercekik, sesak nafas dan berakibat fatal dalam waktu singkat.

Sumber : Antisipasi PT Pupuk Kaltim terhadap bahaya kebocoran sistem tanki penyimpanan amonia, Tesis, 2007, hlm 26.

Menurut Dokter Spesialis Paru RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda, dr Ridmawan Wahyu Jatmiko, amonia dalam kadar tertentu jika dihirup terus menerus bisa merusak sistem pernapasan manusia. Pasalnya, amonia merupakan senyawa kimia nitrogen yang berikatan dengan hidrogen atau sering dikenal rumus kimia NH_3 .

Gas ini memiliki sifat tak berwarna, mudah larut dalam air, menimbulkan bau dan pH basa. "Karena bersifat basa, jika terhirup terus menerus, tenggorokan akan terasa kering dan bisa terjadi kerusakan pada paru," ungkap dia saat ditemui di Ruang Sakura, RSUD AWS, Jumat (24/4/2020).

Selain itu, amonia berupa gas juga sebagai pembius. Jadi, ketika terjadi kebocoran gas amonia maka bisa membuat orang yang menghirupnya menjadi pingsan. Kendati demikian, ada sifatnya baiknya, yakni amonia berupa gas mudah larut dalam air sehingga cukup disiram dengan air bisa memberikan pertolongan pertama pada orang yang keracunan. "Bawa korban sejauh mungkin dari tempat kejadian dan segera siram dengan air lalu beri pertolongan oksigen. Tata laksananya cukup dengan itu saja," terang dia.

Menurut penelitian, kata dia, kadar amonia 25 ppm jika dihirup secara terus menerus oleh manusia, maka butuh waktu sekitar tiga setengah tahun untuk jatuh sakit. "Karena itu perlu diingat dalam jumlah tertentu perhatikan gejala-gejalanya. Misalnya tenggorokan terasa kering menandakan adanya kerusakan pada mukosa (selaput lendir) saluran nafas," jelas dia.

Jika masyarakat sudah merasakan batuk, iritasi seperti luka bakar pada kulit berarti kadar amonia bisa diperkirakan tinggi di sekitar itu. Salah satu tandanya adalah itu. Yang paling berbahaya yaitu korban sampai pingsan," sambung dia.

Adapun usia yang lebih rentan adalah usia-usia dewasa, karena usia itu daya tahan tubuhnya tidak stabil. Tapi usia anak juga rawan terdampak.

Data BPS Bontang sejak 2015 sampai 2018 dua penyakit pernapasan tertinggi melanda warga Bontang. Keduanya, yakni infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan faringitis. Sepanjang tahun itu ISPA selalu menduduki urutan pertama, sedang faringitis menduduki urutan ketiga dari daftar 10 penyakit terbesar yang diderita warga Bontang.

Tahun	ISPA	Faringitis
2015	22.508	7.758
2016	21.833	8.864
2017	18.088	9.239
2018	10.060	5.644
2019	5.820	6.272

Sumber : BPS Kota Bontang

Ridmawan menjelaskan umumnya kedua penyakit pernapasan di atas sama. Hanya, ada perbedaan keduanya, jika hanya batuk dan pilek maka disebut ISPA. Sementara, ada rasa nyeri saat menelan disebut faringitis. "Penyebabnya, sama. Yang paling banyak virus," kata dia. Hanya, dokter sering menempatkan berdasarkan pemeriksaan anatomi. "Misalnya, bagian mana yang kena, ada yang disebut tonsilo faringitis atau amandel. Termasuk klasifikasi ISPA," tambah dia.

Jika merujuk pada keluhan gejala sakit yang dialami masyarakat Loktuan dan Guntung di wilayah pinggiran pabrik amonia, Ridmawan tak mau berspekulasi. "Perlu ditelisik lebih jauh. Jika yang dikeluhkan masyarakat hanya bau saja, tidak masalah. Tapi bahaya jika ada gejala sakit," terang dia.

Kabid Kesmas Dinkes Bontang Jamila Suyuthi, membantah penyakit ISPA dan faringitis yang menyerang warga Bontang dari amonia pabrik. "Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu akibat dari industri pabrik. Karena distribusi dua penyakit itu kan se-Kota Bontang. Bukan terfokus ke wilayah *buffer zone*," kata dia.

Lagi pula, belum ada penelitian khusus mengulas penyebab ISPA dan faringitis di Kota Bontang. Kalau orang kena ISPA itu variabelnya banyak. “Harus ada data pendukung,” tutur dia.

DILEMA

Pemberitaan media lokal awal November 2019 lalu, Komisi III DPRD Kota Bontang menemui jajaran PT Pupuk Kaltim di Ruang Pirus Hotel Grand Equator, Kota Bontang. Pertemuan itu membahas keluhan masyarakat Loktuan dan Guntung. Para wakil rakyat ingin mengetahui detail penanganan pengolahan limbah gas perusahaan, khususnya warga di sekitar perusahaan. Pertemuan dilakukan berulang kali. Namun tidak bisa menghentikan bau amonia. Karena memang itu wilayah pabrik.

Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan masalah bau amonia dan keberadaan masyarakat sekitar bukan hal baru. “Persoalan ini sudah klasik, namun seakan menemui jalan dilema,” kata dia.

Pasalnya, sejak awal keberadaan masyarakat dan pabrik hampir beriringan. Pemukiman di sekitar pabrik menjadi padat juga seiring perkembangan perusahaan. “Istilahnya ada gula ada semut. Sekarang menemui persoalan begitu. Kami enggak mungkin minta pabrik tutup, itu mustahil. Begitu pula dengan memindahkan ribuan warga itu,” kata dia.

Di samping keberadaan pabrik itu juga bagian dari sumber pendapatan daerah dan masyarakat setempat. Sejak awal, politisi Gerindra ini melihat tidak ada ketegasan pemkot atau perusahaan pun yang mengatur sekian jarak dari pabrik steril pemukiman warga.

Kenyataannya sekarang tidak begitu. Ribuan rumah warga bermukim dekat perusahaan, bahkan bersisian langsung dengan pagar pembatas areal pabrik. “Lalu, apakah ribuan rumah warga itu dipindah. Kan dilema juga. Sementara tingkat risiko terdampaknya tinggi,” jelas dia.

Kendati demikian, Amir meminta perusahaan harus bertanggung jawab mengendalikan tingkat risiko atas bau amonia yang berdampak bagi masyarakat. Perusahaan, lanjut Amir, harus memastikan pengujian kualitas udara atau tingkat kebauan di wilayah *buffer zone* secara berkala. Hingga saat ini tak ada tersedia alat pendeteksi kualitas udara yang dipasang di wilayah *buffer zone*. DLH turun menguji kualitas udara berdasarkan keluhan atau panggilan masyarakat. “Pemkot enggak menjemput bola. Harusnya mereka sampaikan ke perusahaan pasang alat-alat yang mengukur udara, karena ini berkaitan dengan risiko hidup masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bontang belum memiliki perda khusus pengendalian pencemaran udara sebagaimana Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Pada, pasal 5 ayat 6, yang menyebutkan bupati atau wali kota wajib menyampaikan indeks standar pencemaran udara kepada masyarakat di daerahnya setiap hari. Ayat 7 bupati atau wali kota wajib melakukan evaluasi indeks standar pencemaran udara secara periodik di wilayahnya. “Kami memang belum punya perda pencemaran udara. Sedang kami rencanakan untuk menggodoknya. Kemarin, DLH hanya mengusulkan pengelolaan limbah B3,” jelasnya.

Alat tak memadai

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Bontang, Sapriansyah, mengakui pihaknya melakukan uji sampel udara di wilayah *buffer zone* bila mendapat laporan masyarakat. Itu karena DLH hanya punya alat portable yang bisa merespon pengujian sesuai keluhan. Tak ada alat pengukur permanen yang dipasang di wilayah *buffer zone*. “Karena itu hasil ujinya pada waktu tertentu saja. Tidak 24 jam. Sementara bau ini selalu mengikuti arah angin,” ungkap dia.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Bontang, DLH diminta penyediaan alat ukur permanen uji kualitas

kebauan amonia kepada perusahaan untuk dipasang di wilayah *buffer zone*. “Soal itu, kami sempat bicarakan ke perusahaan. Tapi sementara, perusahaan juga punya alat *portable*. Tak ada alat yang dipasang permanen. Kami sedang usulkan,” terang dia.

Hasil uji kadar bau amonia di wilayah *buffer zone* terakhir dilakukan DLH pada awal Februari 2019. DLH menggunakan alat *single gas detector* dengan durasi uji selama satu jam. Hasilnya, tingkat kebauan gas amonia di permukiman warga di bawah satu ppm. Selama ini, kata Sapriansyah, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk uji emisi gas dengan memasang alat sejumlah alat uji di perusahaan.

Setiap tiga bulan, tim dari DLH melapor hasil tersebut ke Kementerian LHK. “Hanya program itu yang rutin,” jelas dia.

Persoalan lain, kata dia, laboratorium milik DLH Bontang juga belum terakreditasi sehingga pihaknya harus mengirim uji sampel ke Samarinda untuk hasilnya, termasuk hasil uji sampel air dan lainnya. Karena berbagai permasalahan itu, Sapriansyah tak menampik bahwa kontribusi polusi udara yang terjadi di Bontang berkorelasi dengan tingginya penyakit pernapasan di Bontang. “Secara logika korelasi dengan tingginya penyakit ISPA memungkinkan. Karena Bontang adalah kota kecil yang dikelilingi perusahaan,” terangnya.

DLH meminta ke semua pabrik amoniak, agar menginformasikan ke DLH setiap kali melakukan kegiatan pabrik yang memicu bau, seperti pembersihan tangki dan lainnya. “Biar kami bisaantisipasi,” sambung Sapriansyah.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengakui dampak bau amonia sudah berlangsung lama. Hanya saja baku mutu selalu di bawah standar.

“Memang jarak pabrik dengan permukiman dekat. Terlebih bila ada angin, saya juga mencium bila sedang di Guntung.

Tapi selalu dipantau dan dalam pengukurannya menunjukkan nilai di bawah baku mutu,” kata Neni. “Tapi akan diproses sesuai Permen bila amonia di atas baku mutu,” sambung Neni. Seharusnya sesuai aturan, kata Neni, jarak pabrik dan rumah warga minimal dua kilometer. Aturan tersebut, kata Neni, tidak berlaku surut bagi pabrik yang sudah terlebih dahulu berdiri sebelum aturan itu terbit.

Perda Bontang Nomor 1/2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi 2016-2036 menempatkan Bontang Utara sebagai pusat industri strategis, perdagangan dan jasa serta pariwisata budaya. Rencana sub bagian perkotaan akan diprioritaskan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota (CBD); kawasan penyangga industri Pupuk Kalimantan Timur; kawasan konservasi Taman Nasional Kutai; kawasan perumahan di atas air; dan kawasan sekitar jalan lingkar pesisir.

PT Pupuk Kaltim merupakan pabrik kimia terbesar di Bontang. Saat ini Pupuk Kaltim mempunyai lima pabrik yang telah beroperasi. Pembangunan pabrik dilakukan bertahap. Pabrik pertama dan kedua diresmikan bersamaan pada 29 Oktober 1984. Pabrik kelima atau yang terakhir, baru diresmikan tahun 2015 lalu. Produk utama PT Pupuk Kaltim adalah amonia, pupuk urea dan pupuk NPK.

Saat ini kapasitas produksinya 3,43 juta ton pupuk Urea, 2,74 juta ton amonia dan 350.000 ton pupuk NPK. Produk PT Kaltim dijual pada segmen pasar dalam maupun luar negeri. Pasar dalam negeri, PT Pupuk Kaltim selain menjual pupuk non subsidi, juga memproduksi pupuk subsidi pesanan pemerintah. Untuk pasar luar negeri, Pupuk Kaltim melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan lain sebagainya.

Pada 2019 Pupuk kaltim menerima penghargaan sebagai BUMN kategori Big Corporate dengan nilai pendapatan di atas Rp 3 triliun. Humas PT Pupul Kaltim, Wahyudi mengatakan

perusahaannya selalu mematuhi regulasi dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah. “Terutama terkait *safety* dan dampak lingkungan. Jika kami melanggar SOP atau peraturan tentu saja kami akan ditegur bahkan diberi sanksi,” ungkap dia.

PT Pupuk Kaltim, kata Wahyudi, selalu menurunkan tim mengecek lapangan bersama DLH Bontang jika ada laporan masyarakat terkait dampak amonia. “Kami juga bekerja sama dengan pihak kelurahan Loktuan dan Guntung, LPM dan pihak terkait lainnya, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini,” jelasnya.

Namun ia mengingatkan, di KIE Bontang bukan hanya PT Pupuk Kaltim yang memproduksi dan menggunakan amonia. Ada beberapa perusahaan lain seperti PT Kaltim Parna Industri (PT KPI), PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) dan PT Black Bear Resources Indonesia (BBRI). Ketiga perusahaan ini juga memproduksi amonia seperti Pupuk Kaltim. Namun kapasitas produksi ketiga perusahaan jauh di bawah kapasitas produksi PT Pupuk Kaltim. PT KPI (495.000 ton/tahun), PT KNI (300.000 ton/tahun) dan PT BBRI (82.000 ton/tahun)

Dikutip dari Laporan Berkelanjutan 2018, PT Pupuk Kaltim melaporkan rutin pengujian sampel kualitas air, kualitas emisi gas buang, kualitas udara ambien, serta parameter lingkungan lainnya di laboratorium pengujian yang telah memiliki akreditasi ISO 17025:2008 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sepanjang tahun 2018, perusahaan menyatakan tidak mendapat sanksi administratif ataupun denda terkait dengan pelanggaran baku mutu lingkungan dan pelanggaran peraturan pengelolaan lingkungan. Di tahun yang sama, Pupuk Kaltim telah mengalokasikan anggaran Rp 37,5 miliar untuk pengelolaan limbah bekerjasama sama pihak ketiga.

Dalam Laporan Berkelanjutan, Pupuk Kaltim juga melaporkan emisi gas buang amonia (NH₃) setiap tahunnya. Sejak tahun 2014 - 2018 terus terjadi kenaikan emisi atau gas buang yang dilepas ke udara, seperti yang terlihat di tabel ini :

Emisi Gas Buang PT Pupuk Kaltim

Tahun	Amonia (ton/per tahun)
2014	504,99
2015	767,83
2016	830,61
2017	955,37
2018	1.123,19

Sumber : Laporan Berkelanjutan PT Pupuk Kaltim 2018

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DLH Kaltim Suyitno mengatakan tingkat kebauan amonia yang dialami masyarakat di wilayah *buffer zone* di bawah baku mutu maka dianggap bukan polusi. “Kan semua sudah diatur oleh aturan. Acuan kami ke Permen LH baku mutu tentang kebauan itu. Kalau di bawah ambang batas menurut kami bukan pencemaran,” kata dia. Kendati demikian, karena tingkat kebauan sudah mengganggu masyarakat sekitar, maka ia menyarankan Pemkot Bontang memberi peringatan kepada perusahaan agar mengendalikan masalah itu. “Apalagi korelasi terhadap tinggi penyakit ISPA di Bontang. Jadi pemerintah daerah bisa menjadikan dasar itu untuk mengevaluasi perusahaan bersangkutan,” terang dia. Langkah tersebut dilakukan agar perusahaan bisa lebih ketat melepas emisi dari aktivitas pabrik tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Bontang, Yohana Tiko mengatakan DLH harusnya tidak terjebak pada urusan melebihi ambang atau tidak. Tapi, melihat dalam konteks dampak bau yang dirasakan masyarakat. “Masyarakat sudah terganggu atas bau tersebut. Artinya sudah masuk dalam kategori pencemaran,” ungkap dia. Karena itu, DLH harus menekan perusahaan perlu agar ada penanganan khusus untuk mengendalikan persoalan itu. “Ada ribuan masyarakat yang hidup di sana akan menghirup itu setiap harinya. Jangan sampai ada jatuh korban,” kata Tiko.

Karya telah tayang di Kompas.com, 2 Mei 2020



**Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik
Penerima Beasiswa Liputan
Sustainability Reporting 2020**

ISBN 978-979-3530-46-8



9 789793 530468